

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

759.864

S

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara



TANGGAL	No. INDIK
7 AUG 1984	1095

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
1978/1979

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P. dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari:
 - 1) B. Bhurhanuddin
 - 2) Syamsuddin, B.A.
 - 3) A. Mulku Zahari
 - 4) Ch. Pingak
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota :
 1. Prof. Dr. Haryati Soebadio
 2. Abdurachman Surjomihardjo
 3. A.B. Lopian
 - Ketua : Sutrisno Kutoyo
 - Sekretaris : M. Soenjata Kartadarmadja
 - Anggota :
 1. Anhar Gonggong
 2. Mardanas Safwan
 3. Masjkuri
 4. Surachman

- 5. Muchtaruddin Ibrahim
- 6. Sri Sutjiatiningsih
- 7. Frans Hitipeuw

- 7. Editor : Sutrisno Kutoyo
- 8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

11	11
13	13
13	13
40	40
42	42
52	52
52	52
74	74
75	75
83	83
83	83
82	82
87	87
88	88
100	100
109	109
119	119
125	125
132	132

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

Halaman

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Masalah	8
D. Ruang Lingkup	8
E. Pertanggung Jawaban Ilmiah Prosedur Penelitian	9
F. Hasil Akhir	11

BAB II. SULAWESI TENGGARA PADA AKHIR ABAD

KE 19	13
A. Pemerintahan	13
B. Sosial Budaya	40
C. Kehidupan Ekonomi	45

BAB III. KEADAAN DI DAERAH SULAWESI TENGGARA DARI TAHUN ± 1900 – 1928.

A. Pengaruh Politik Kolonial Belanda Desentralisasi di Sulawesi Tenggara	52
B. Kegiatan Masyarakat yang Dapat Dikatakan Relevan Dengan Atau Pun Merupakan Embrio Proses Kebangkitan Nasional di Daerah	74
C. Interaksi di Daerah	75

BAB V. KEADAAN DI SULAWESI TENGGARA DARI TAHUN 1928 – 1942

A. Pengaruh Politik Pemerintah Hindia Belanda	83
B. Depresi Ekonomi (1930)	85
C. Pendidikan	87
D. Interaksi Terhadap Kegiatan Organisasi/Partai	88
E. Keadaan di Sulawesi Tenggara Menjelang Keruntuhan Pemerintah Hindia Belanda	100
F. Kedatangan Pasukan Pendudukan Jepang	109

BAB V. PENUTUP

119

LAMPIRAN/FOTO/PETA	125
--------------------	-----

INDEKS	132
--------	-----

DAFTAR SUMBER	143
A. Daftar Kepustakaan	143
B. Daftar Informan	144

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

"Sulawesi Tenggara" sebagai istilah geografis telah dikenal sejak abad XIX. A. Ligvoet dalam bukunya *Beschrijving en Geschiedenis van Boeton* (1877) menyebutkan jazirah Sulawesi Tenggara (*Het Zuidoostelijk schiereiland van Celebes*). Kemudian Paul dan Frits Sarasin menulis *Reise von der Miengkoka Baai nach Kendari, Sudost Celebes* pada 1903 dan Dr. Alb. C. Kruyt menulis *Een en Ander over de Tolaki van Mekongga (Zuidoost Celebes)* pada 1922. Istilah geografis Sulawesi Tenggara atau Jazirah Tenggara Sulawesi ini tidak meliputi pulau-pulau sekitarnya utamanya pulau-pulau besar di sebelah selatan, yaitu Buton, Muna dan Kabaena.

Sulawesi Tenggara menjadi istilah politik (pemerintahan) sejak 1951 ketika *Afdeeling Buton* dan Laiwui dirubah menjadi Daerah Sulawesi Tenggara dengan ibu kota BauBau. Dalam pengertian pemerintahan Sulawesi Tenggara meliputi pulau-pulau di sekitarnya, sehingga geografis Sulawesi Tenggara dapat dibedakan antara daratan (Kabupaten Kendari dan Kolaka) dan kepulauan (Kabupaten Buton dan Muna).

1. Kelompok Etnis dan Logat.

Secara garis besar penduduk Sulawesi Tenggara dapat dibedakan atas empat suku:

- a. Suku Tolaki yang mendiami bagian daratan.
- b. Suku Muna yang mendiami pulau Muna dan sebagian pulau Buton.
- c. Suku Buton yang mendiami pulau Buton dan pulau-pulau di sekitarnya.
- d. Suku Moronene yang mendiami pulau Kabaena dan ujung barat daya daratan Sulawesi Tenggara.

Tetapi jika diteliti lebih mendalam dari latar belakang budaya (dan bahasa) maka akan ditemukan jenis suku yang lebih banyak. Suku Buton sebenarnya terdiri dari banyak suku yang amat berbeda-beda jika ditinjau dari segi warisan budayanya apalagi jika ditilik dari segi bahasanya. Kesatuan mereka ke dalam suku Bu-

ton adalah sebagai akibat dari kesatuan politik berabad-abad lamanya (Kesultanan Buton kemudian Kabupaten Buton). Suku Buton ini hanya akan kelihatan satu jika mereka berada di luar wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan kata lain bahwa pada jaman lampau – jaman Kesultanan Buton – mereka merupakan "bangsa" Buton yang terdiri dari berbagai "suku" dan mempergunakan bahasa yang berbeda-beda. Penentuan jenis suku ini akan lebih mudah jika ditetapkan melalui penelitian kekerabatan bahasa. Kelompok bahasa ini di Sulawesi Tenggara dapat dibagi atas dua jenis yaitu: Bahasa-bahasa daratan (Bungku Laki), dan Bahasa-bahasa kepulauan (Buton – Muna).

a. Bahasa-bahasa daratan

Bahasa-bahasa daratan yang sekelompok dengan bahasa-bahasa Mori dan Bungku di Sulawesi Tengah terdiri dari :

- 1) Bahasa Tolaki :
 - a) Dialek Konawe
 - b) Dialek Mekongga
 - c) Dialek Laiwui
- 2) Bahasa Landewa/Mopute :
 - a) Dialek Landewa
 - b) Dialek Mopute
- 3) Bahasa Moronene
- 4) Bahasa Wawonii/Kulisusu :
 - a) Dialek Wawonii
 - b) Dialek Kulisusu

b. Bahasa-bahasa kepulauan

Bahasa-bahasa kepulauan (Buton–Muna) tidaklah merupakan suatu kelompok bahasa menurut teori ilmu bahasa. Bahasa-bahasa kepulauan terdiri dari:

- 1) Bahasa Muna
 - a) Dialek Muna
 - b) Dialek Pancana
 - c) Dialek Siompu/Kadatua
 - d) Dialek Katobengke
- 2) Bahasa Cia - Cia
 - a) Dialek Kaesabu
 - b) Dialek Mambulu/Laporo:
 - (1) Sub dialek Mambulu/Sampolawa

(2) Sub dialek Laporo

c) Dialek Wabula:

(1) Sub dialek Wabula

(2) Sub dialek Wali

(3) Sub dialek Watuata

(4) Sub dialek Kondowa

(5) Sub dialek Takimpo

(6) Sub dialek Burangasi

(7) Sub dialek Holimombo

3) Bahasa Wolio (Buton).

Bahasa ini merupakan *lingua franca* Kesultanan Buton pada masa yang silam, walaupun pemakaiannya hanya sekitar kota Bau-Bau sekarang. Bahasa ini lebih dekat kekerabatannya dengan bahasa-bahasa Sulawesi Tengah (Kelompok Kaili – Pamona) dari bahasa-bahasa sekitarnya.

4) Bahasa Lasalimu

5) Bahasa Kamaru

6) Bahasa Wakatobi (p.p. Tukang Besi):

a) Dialek Wanci

b) Dialek Kaledupa

c) Dialek Tomia

d) Dialek Binongko.

Hampir seluruh pulau Buton mempergunakan bahasa Muna – Cia-Cia karena wilayah bahasa Wolio, Kamaru dan Lasalimu terbatas sekali seakan-akan ke tiganya ibarat tiga pulau kecil di tengah laut. Penelitian secara saksama amat diperlukan pada bahasa-bahasa kepulauan ini karena kebanyakan penduduknya dapat berbicara dalam beberapa bahasa dan dialek.

2. Latar belakang sejarah pemerintahan.

Kerajaan-kerajaan Sulawesi Tenggara menurut ungkapan tradisi setempat diawali dengan tokoh legendaris yang luar biasa. Ada kerajaan yang diawali dengan tokoh dari kahyangan dengan sebutan *Sangia Ndudu* (bhs. Tolaki; sangia = sang hiang, Ndudu = turun dari atas) atau *To Manurung* (orang mula yang diturunkan ke bumi). Sangia Ndudu ini dikenal di kerajaan-kerajaan Tolaki (Konawe dan Mekongga) dan Moronene. Dengan kata lain bahwa

kerajaan-kerajaan daratan diawali dengan Sangia Ndudu. Kerajaan Konawe mengenal tiga Sangia Ndudu yang pertama *To Lahianga*, menyusul *Wekoila* dan yang terakhir *Anawi Ngguluri*.

Kerajaan Mekongga diawali dengan Sangia Ndudu (*To Manurung*) *La Rumpalangi* yang turun dari kahyangan di atas selembar sarung.

Kerajaan-kerajaan yang muncul di kepulauan menurut tradisi masing-masing diawali dengan munculnya raja pertama mereka secara luar biasa dari dalam bambu. Kerajaan Buton dengan raja perempuan *Wakaaka* yang disebut pula *Mobetena i Tombula* (yang muncul dari dalam bambu tolang). Demikian pula kerajaan Muna diawali dengan *Beteno ne Tombula*.

Di Tiworo muncul *Mobetena i Paria* (Orang muncul dari bambu pering) sedangkan di Kabaena dikenal *Tebota tula Nggadi* (orang muncul dari bambu gading).

Juga di Kolaka Utara dikenal tokoh yang keluar dari bambu yang disebut *Bulo Manurung*.

Kedatangan orang Kahyangan dan orang-orang rumpun bambu ke Sulawesi Tenggara yang tidak masuk akal ini seakan-akan pernah terjadi betul-betul karena adanya barang-barang peninggalan mereka. Di antara peninggalan yang amat menarik adalah *Soro Pinda* peninggalan Anawi Ngguluri yang sekarang masih disimpan oleh Wesiya di Wanggudu Kecamatan Asera (Kab. Kendari) yang berupa kain batik dengan motif Lasem.

Penelitian yang saksama akan kain ini (sudah hampir hancur) akan membuka tabir mitologis yang mengelilingi Anawaingguluri (Putri Burung Nuri) sebagai Sangi Ndudu.

Semua kerajaan tersebut di atas diperkirakan awal munculnya dengan urutan silsilah tradisional mereka masing-masing yaitu kira-kira akhir abad ke 15 atau sesudah 1450, kecuali barangkali kerajaan Konawe.

Silsilah Konawe yang diungkapkan Sdr. Abd. Hamid Hasan tokoh sejarah dan budaya Tolaki dapat membawa kita ke awal kerajaan ini pada jaman *To Lahianga* (*To Hianga*) pada abad ke 9, dengan patokan dari Raja (*Mokole*) *Melamba* yang memerintah pada pertengahan abad XVI dan adalah generasi ke 28 dari *To Lahianga* (± 700 tahun).

Pada waktu kemunculan *Wekoila* yang menurut tradisi bersamaan dengan *La Rumpalangi* di Mekongga, di Konawe terdapat beberapa kerajaan yang masing-masing diperintah oleh seorang

Mokole:

- a. Mokole Padangguni
- b. Mokole Wawolesea
- c. Mokole Besilutu

Wekoila muncul di Padangguni dan kawin dengan Raman-dalangi anak To Tongano Wonua Mokole Padangguni. Tetapi kemudian Wekoila ini (seorang putri) diakui sebagai Mokole More i Konawe dengan menggabungkan ketiga daerah tersebut di atas. Rupanya Wekoila adalah pendiri kerajaan Konawe. Dalam menjalankan pemerintahan ia dibantu oleh seorang yang *Wati* sebagai Perdana Menteri.

Walaupun pemerintahan telah ada sejak To Lahianga, tetapi kerajaan Konawe barulah berdiri sejak Wekoila yang mempersatukan tiga wilayah yang merupakan *primus inter pares* dari kerajaan Konawe itu. Wilayah kerajaan Konawe sejak Wekoila sampai pada akhir abad XVII meliputi hampir seluruh daratan jazirah Tenggara Sulawesi kecuali wilayah Mekongga di dekat Kolaka sekarang dan wilayah Moronene di ujung barat daya jazirah itu. Menjelang akhir abad ke 17 wilayah Mekongga berkembang dengan dimasukkannya wilayah Konawe sebelah barat sungai Konawe. Sejak itu wilayah Konawe yang kemudian disebut Laiwui sampai menjadi Kabupaten Kendari hampir tidak mengalami perubahan.

La Rumpalangi dirajakan di Mekongga oleh tujuh orang Toonomotuo (orang tua = kepala kampung). Kerajaan Mekongga ini yang diawali tujuh kampung saja kemudian bertambah luas karena perkawinan antara Mokole Mekongga dengan seorang anak salah satu Kepala Wilayah kerajaan Konawe, yang menghadiahkan sebagian besar wilayahnya pada putrinya permaisuri Mokole Mekongga.

Kerajaan Mekongga ini kemudian menjadi wilayah kerajaan Luwu (Sulawesi Selatan). Kapan mula tergabungnya Mekongga ke dalam Kerajaan Luwu tidak dapat ditelusuri secara pasti. Kerajaan Mekongga meliputi Kabupaten Kolaka sekarang minus bagian Kolaka Utara yang sejak lama menjadi bagian langsung kerajaan Luwu.

Putri Wakaaka dirajakan oleh empat Bonto yang mengepalai empat kampung. Perluasan wilayah terjadi melalui perkawinan dan penggabungan sukarela dari beberapa daerah di seputar pusat kerajaan. Sejak Raja III kerajaan Buton telah menguasai Kabaena dan telah punya pengaruh atas Tiworo dan Moronene. Kerajaan

Buton merupakan pemegang hegemoni politik di Sulawesi Tenggara pada jaman Sultan Buton I (Raja VI) yang terkenal dengan nama Murhum yang memerintah ± 1541 – 1588. Dia adalah putra Raja Muna V (Sugi Manuru), tetapi dalam tubuhnya mengalir pula darah Buton, Konawe/mekongga, Tiworo dan juga menjalin hubungan kekeluargaan dengan Mokole Moronene. Dia yang pertama kali membentuk jalinan kesatuan Sulawesi Tenggara.

Dia menjelajahi seluruh Sulawesi Tenggara membawa perdamaian ke dalam dan mengusir penyerang dari luar (Tobelo–Ternate). Pada waktu Murhum (Lakilaponto di Muna, Halu Oleo di Tolaki/Moronene) memerintah di Buton, di Buton, di Konawe memerintah Melamba saudaranya, La Posasu di Muna juga saudaranya, di Morenene (Poleang) memerintah Elu Utentoluwu iparnya, di Tiworo memerintah kerabat dekatnya demikian pula Mokole Mekongga masih punya hubungan kekerabatan dengannya. Kesultanan Buton merupakan kerajaan Sulawesi Tenggara yang terbesar dan dapat memelihara diri dalam persinggungan politik antara Ternate, Gowa dan VOC (Belanda). Di puncak kekuasaannya kesultanan Buton meliputi seluruh Kabupaten Buton dan Muna sekarang ditambah pulau Wawonii (Kabupaten Kendari).

Sejak awal abad ke 20 ini Belanda secara langsung mengatur pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Wilayah kerajaan yang tradisional diubah menjadi Distrik dan Onderdistrik. Kemudian terbentuklah afdeling Buton en Laiwui yang meliputi kesultanan Buton (termasuk Muna) dan kerajaan Liwui (pengganti Konawe). Onderafdeling Kolaka (bekas Mekongga) termasuk dalam Afdeling Luwu yang meliputi Kerajaan Luwu (Sulawesi Selatan). Pembagian wilayah tetap pada jaman Jepang, kecuali perubahan nama kesatuan wilayah. Pada zaman NIT Onderafdeling Kolaka digabungkan ke dalam Afdeling Buton dan Laiwui tetapi Kolaka Utara masuk wilayah Onderafdeling Malili (Afdeling Luwu). Pada jaman itu dibentuk pula Gabungan Pemerintah Hadat se Sulawesi Selatan (termasuk Tenggara) dengan pimpinan Hadat Tinggi yang terdiri dari 5 orang dengan Ketua Andi Pabenteng Raja Bone pada waktu itu. Gabungan ini merupakan federasi Swapraja se Sulawesi Selatan (termasuk Tenggara) terdiri dari Swapraja asli dan Neo Swapraja. Di Sulawesi Tenggara anggotanya 2 Swapraja asli (Buton dan Laiwui) dan 2 Neo Swapraja (Muna dan Mekongga) yang sebelumnya dianggap bagian dari Swapraja Buton dan Luwu.

Sesudah pengakuan kedaulatan yang disusul dengan pemu-
baran NIT (17 Agustus 1950) dan penghapusan Pemerintahan
Sulawesi Selatan (Hadat Tinggi) dibentuklah tujuh daerah di
Sulawesi Selatan (dan Tenggara) yang wilayahnya sama dengan
ketujuh Afdeling. Afdeling Buton dan Laiwui menjadi Daerah
Sulawesi Tenggara yang wilayahnya meliputi bekas Onderafdeling
Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka (minus Kolaka Utara).

Pada 1960 (PP Nomor 29 Tahun 1959) Daerah Sulawesi
Tenggara dipecah menjadi empat kabupaten yaitu Kabupaten Ken-
dari, Kolaka (plus Kolaka Utara), Buton, dan Muna. Pada waktu
itu Sulawesi terbagi atas dua propinsi yaitu Sulawesi Utara dan
Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).
Empat tahun kemudian (1964) masing-masing propinsi ini di-
pecah lagi menjadi dua propinsi antaranya Propinsi Sulawesi
Tenggara.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian Sejarah Daerah khususnya yang menyangkut
jaman Kebangkitan Nasional di daerah merupakan bagian dari
usaha realisasi pola kebijaksanaan kebudayaan yaitu meningkat-
kan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan, untuk mem-
perkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional termasuk meng-
gali dan memupuk kebudayaan daerah sebagai unsur penting yang
memperkaya dan memberi corak kepada Kebudayaan Nasional,
membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah
yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta ke-
manfaatn Nasional untuk diwariskan kepada generasi muda.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengumpulkan,
mencatat, meneliti dan mengolah sumber-sumber Sejarah Daerah
yang mempunyai hubungan, kaitan dan peranan dalam Jaman
Kebangkitan Nasional di Daerah Sulawesi Tenggara (1900-1942)
yang kemudian dapatlah disusun Sejarah Kebangkitan Nasional
di Sulawesi Tenggara yang merupakan pencerminan konsep-kon-
sep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan
Kebudayaan Nasional sehingga dapat melengkapi dan menun-
jang Sejarah Nasional.

C. MASALAH

1. Jaman Kebangkitan Nasional merupakan sebagian dari proses pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang penting, karena dasar-dasar dari kenegaraan dan Kebudayaan Indonesia tercermin pada jaman itu.

2. Proses pergerakan dan perjuangan Kemerdekaan Nasional itu sendiri terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah dengan berbagai corak ragamnya. Karena itu perlu diadakan penelitian dan pencatatan serta penulisan tentang Sejarah Kebangkitan Nasional di daerah-daerah secara lebih luas mendalam dan terperinci untuk lebih mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai jaman itu.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan sendirinya mempunyai ke-*bhinekaan* budaya, demikian juga mengenai prosès pergerakan dan perjuangan kemerdekaan di daerah. Dan ke-*bhinekaan* kegiatan perjuangan itulah nantinya akan terjangkau ke Tunggal-Ikaannya.

4. Jaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Sulawesi Tenggara mempunyai corak tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain, khususnya di Jawa karena di dalam jaman itu tercakup secara serempak: periode Hindia-Belanda, periode Politik Etis, dan periode munculnya organisasi-organisasi sosial-politik, di mana di daerah lain (khususnya di Jawa sebagai cermin periodisasi Sejarah Nasional) ketiga periode tersebut timbul dengan jarak yang relatif panjang.

D. RUANG LINGKUP

1. Penulisan tematis Sejarah Kebangkitan Nasional di Sulawesi Tenggara ini akan meliputi segi-segi:

- a. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan
- b. Kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya pendidikan dan agama
- c. Kehidupan organisasi sosial politik yang meliputi: kepe-mudaan/kependuan, organisasi sosial, organisasi politik.

2. Data yang dicatat dan diteliti difokuskan pada materi yang diperoleh di daerah dengan kemungkinan pengkaitan dan pengembangan secara regional dan nasional.

E. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Persiapan

a. Pembagian tugas Tim

Tim yang terdiri dari lima orang dikelompokkan kembali ke dalam:

- 1) Tim peneliti empat orang untuk bertugas di masing-masing Kabupaten (empat):
 - B. Bhurhanuddin, Kabupaten Muna dan luar daerah (Ujung Pandang)
 - Syamsuddin, BA. Kabupaten Kendari
 - A. Mulku Zahari Kabupaten Buton
 - Ch. Pingak, Kabupaten Kolaka.
- 2) Tim Pengolah Data:
 - B. Bhurhanuddin
 - Haeba Syamsuddin, BA.
 - Syamsuddin, BA.
- 3) Penyusun Naskah:
 - B. Bhurhanuddin
 - Haeba Syamsuddin, BA.

b. Jadwal Kegiatan

NO.	Kegiatan	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nop	Desa	Jan	Pebr
1.	Persiapan								
2.	Penelitian								
	– Lapangan								
	– Kepust.								
3.	Peng. Data								
4.	Peny. Naskah								
5.	Serah Terima I								
6.	Evaluasi (Jkt)								
7.	Serah Terima II								

c. Seleksi dan penentuan Informan

Hal ini dilakukan oleh masing-masing Tim Peneliti di tiap Kabupaten dengan batasan:

- Umur di atas lima puluh tahun
- Berpengalaman dalam Pemerintahan (Belanda atau Kerajaan) atau
- Bekas tokoh adat, atau
- Dianggap tahu tentang sesuatu hal yang sedang diteliti.

2. Penelitian

a. Sumber-sumber:

- 1) Data Primer : – Informan
– Dokumen otentik/Pemerintah dan organisasi.
- 2) Data Sekunder : – Kepustakaan.

b. Tehnik Penelitian:

1) Penelitian Kepustakaan

Kepustakaan di sini adalah tulisan-tulisan baik berupa buku yang telah diterbitkan dicetak/distensil maupun naskah dari hasil penelitian dari badan-badan resmi atau naskah-naskah perorangan yang telah diterbitkan.

2) Penelitian lapangan

– Penelitian atas dokumen-dokumen otentik dari kalangan Pemerintah dan Organisasi baik yang ada di Kantor Daerah (Bupati/Gubernur), dan organisasi sosial/politik maupun yang dimiliki secara perorangan oleh bekas tokoh pemerintahan/organisasi.

– Wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian berupa laporan penelitian dari tiap peneliti dengan lampiran-lampiran:

- Wawancara (tertulis atau cassette)
- Foto copy
- Foto (hitam putih)

3. Pengolahan Data

Penelitian dilakukan dengan tidak memakai obyek sample dengan maksud untuk memperoleh materi sumber yang lengkap, dan menyeluruh dan mencakup seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan semua sumber Sejarah Kebangkitan Nasional Sulawesi Tenggara. Laporan

an Penelitian (beserta lampiran-lampiran) dikumpul kemudian dikelompokkan ke dalam jenis materi dan periode yang tergambar dalam TOR dari P3KD Pusat (Jakarta).

Pengelompokkan data ini kemudian dianalisa untuk mendapatkan:

- a. gambaran riil
- b. jangkauan wilayah
- c. pembobotan ditinjau dari lingkungan regional maupun Nasional.

4. Penulisan Naskah

Penulisan Naskah dilakukan oleh Ketua dengan bantuan seorang anggota, mengalami proses sebagai berikut:

a. *Naskah awal*

Naskah awal ini adalah naskah yang ditulis berdasarkan pengolahan data yang kemudian disampaikan bab demi bab pada semua anggota peneliti untuk dikoreksi. Koreksi yang dimaksud berupa:

- a) penambahan,
- b) pengurangan,
- c) perubahan,
- d) pembedulan.

tetapi tidak merupakan mutlak diterima, jadi sekedar menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Tim (Penyusun Naskah) yang juga memimpin pengolahan data. Dengan kata lain bahwa koreksi ini berfungsi sebagai tambahan keterangan data penelitian dan menjaga adanya kemungkinan analisa dalam pengolahan data.

b. *Naskah*

Setelah masa koreksi dilalui maka naskah awal menjadi naskah. Sekali lagi naskah ini disampaikan pada semua anggota Tim Peneliti untuk mendapatkan saran-saran terakhir.

c. *Naskah Final* (Baku)

Naskah inilah yang disampaikan pada Ketua Proyek (Serah Terima I).

F. HASIL AKHIR

Naskah ini aslinya disusun oleh Tim daerah Sulawesi Tenggara

ra dengan mendasarkan pada suatu kerangka yang dibuat oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat. Kemudian dalam suatu loka-karya naskah ini mengalami penyempurnaan dan pada akhirnya dilakukan editing. Dalam melakukan editing ini ada tiga hal yang diperhatikan yaitu: materi atau bahan, penyajian dan pendekatan, serta bahasa. Pada materi diadakan perbaikan, sesuai dengan permasalahannya. Sedangkan pada penyajian dan pendekatan, selain diperhatikan segi sistematika, juga diusahakan agar asas-regiosentrisme sejauh mungkin didekati. Pada penulisan sejarah daerah sudah wajar ditempuh pendekatan serupa itu. Mengenai kebahasaan, dilakukan perbaikan terutama pada segi susunan kalimat dan ejaan. Pada akhirnya naskah ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan *terms of reference* yang dimaksud. Selanjutnya naskah ini dengan kelebihan dan kekurangannya, hendaknya dilihat sebagai hasil usaha perintisan.

Naskah awal ini adalah naskah yang ditulis bahasa kan per-
talian data yang kemudian dikoreksi dan diperbaiki oleh
penyempurnaan peneliti untuk dikoreksi dan diperbaiki
dan penyempurnaan.
dan penyempurnaan.
dan penyempurnaan.
dan penyempurnaan.

terjadi untuk memperbaiki naskah dan untuk memperbaiki
dan penyempurnaan bagi Kota dan Kabupaten.
dan penyempurnaan data. Dengan cara lain naskah ini
perbaikan sebagai tambahan keterangan data penelitian dan
dan penyempurnaan analisis dan penyempurnaan data.

A. Naskah
Naskah ini adalah naskah yang ditulis oleh orang-orang
dan penyempurnaan ini dilakukan oleh orang-orang yang
dan penyempurnaan naskah ini dilakukan oleh orang-orang yang

Naskah (Naskah Final) (Bahan)
Naskah inilah yang disampaikan pada Kota dan Kabupaten
dan penyempurnaan.

HASIL AKHIR
Naskah ini adalah naskah yang ditulis oleh orang-orang
dan penyempurnaan.

BAB II

SULAWESI TENGGARA PADA AKHIR ABAD XIX

A. PEMERINTAHAN

I. KESULTANAN BUTON

1. Bentuk Pemerintahan

Buton telah menerima agama Islam, pada 948 H (1541 M) dan sejak itu raja-rajanya bergelar Sultan. Pada awal abad XVII *Sapati* (Perdana Menteri) *La Singga* telah mengumandangkan Islam (aliran tasawuf disebut Martabat Tujuh) menjadi dasar pemerintahan dan pemerintahan kerajaan. Sejak itu pula kealiman dalam ilmu agama menjadi ukuran pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan dari Sultan sampai pejabat terendah.

Kesultanan Buton ini mencapai puncak kebesarannya pada jaman Sultan Muh. Idrus yang memerintah pada 1824-1851. Dua orang anak-anaknya berturut-turut memerintah sesudahnya yaitu Sultan Muh. Isa (1851-1871) dan Sultan Muh. Shalihi (1871-1885). Mereka ini dari golongan bangsawan (*Kaumu Kumbewaha*).

Dalam Kesultanan Buton ada tiga golongan bangsawan dan disebut *Kamboru-mboru Talu Palena* (*Kamboru-mboru* = tiang, *Talu* = tiga, *pale* = batang, *na* = nya), yaitu *Kumbewaha*, *Tana I landu*, dan *Tapi-Tapi*. Penetapan adanya tiga golongan ini bermula pada awal abad XVII, yang juga diundangkan oleh *Sapati La Singga*. Cakal-bakal dari tiga golongan ini adalah tiga orang pejabat kerajaan tertinggi pada waktu itu yaitu:

- a. Sultan *La Elangi* (1597-1631) sebagai golongan *Tana I landu*.
- b. *Sapati* (Perdana Menteri) *La Singga* sebagai golongan *Tapi-tapi*.
- c. *Kenepulu* (semacam Menteri Kehakiman) *La Bula* sebagai golongan *Kumbewaha*.

Mereka itu merupakan kerabat dekat.

Ketiga golongan bangsawan ini secara bergilir memerintah Kesultanan Buton. Tetapi pergiliran ini bukan berarti giliran yang tertib karena didasarkan atas pemilihan Dewan Kerajaan (Sio Limbona) dan juga ada kekecualian yaitu yang disebut *Anana Bangule*. Anana Bangule adalah putra Sultan yang lahir dalam masa jabatannya, sehingga menurut adat dia mempunyai hak langsung untuk menggantikan bapaknya tanpa melalui pemilihan. Sultan Muh. Isa adalah Anana Bangule sehingga ia langsung menggantikan bapaknya Sultan Nuh. Idrus. Saudaranya Sultan Shailihi (1871-1885) menjadi Sultan karena hasil pemilihan. Sesudah Sultan Muh. Shailihi, memerintah Sultan Muh. Umar (1885-1904) dari golongan Tanailandu yang disusul dengan Sultan Muh. Asyikin (1904-1911) dari golongan Tapi-tapi dan sebelum Muh. Idrus memerintah Sultan La Dani (1822-1824) juga dari golongan Tapi-tapi.

Perkawinan antar golongan bangsawan amat sering terjadi sehingga untuk menentukan jenis golongan dilihat dari aliran bapak. Dewan yang mempunyai wewenang mengangkat (dan mencatat malah menjatuhkan hukuman) Sultan (dan pejabat-pejabat kerajaan Tertinggi) adalah *Sio Limbona* (*Sio* = sembilan, *Limbona* = negeri) yaitu sembilan orang Bonto (Kepala Negeri) dari sembilan limbo. Sembilan limbo ini merupakan wilayah inti Kesultanan yang terletak dalam ibukota kerajaan (keraton). Pada awal Kerajaan Buton hanya ada empat limbo (*Pata Limbona*) yang berkembang menjadi sembilan limbo pada masa Pemerintahan Raja Buton III. (Sultan Buton I adalah Raja Buton VI). Kesembilan Bonto dari Sio Limbona adalah:

- a. Bontona Baluwu
- b. Bontona Peropa
- c. Bontona Gundu-Gundu) Pata Limbona
- d. Bontona Barangkatopa
- e. Bontona Gama
- f. Bontona Siompu
- g. Bontona Wandailolo
- h. Bontona Rakyat
- i. Bontona Melai.

Dari antara sembilan Bonto ini dua di antaranya mempunyai kedudukan khusus (nomor 1 dan 2) karena tanggung-jawabnya dalam memimpin pemilihan-pemilihan dan pelantikan-pelantikan Sultan serta pengawasan atas benda-benda upacara kerajaan. Em-

pat Bonto (*Pata Limbona*) dianggap tua dalam kedudukan dan merupakan inti dari Sio Limbona.

Sio Limbona ini juga bertugas mengawasi jalannya peraturan (adat-istiadat) pemerintahan dan mencatat silsilah ketiga golongan *Kaumu* malah meneliti gerak-gerik, tingkah-laku para bangsawan khususnya dan rakyat pada umumnya.

Anggota dari Sio Limbona berasal dari kaum Walaka yaitu kaum yang berasal dari *Mia Patamiana* (Mia = orang) yaitu empat orang kepala kaum sebelum merayakan Raja Buton I. Dengan kata lain bahwa kaum bangsawan (*Kaumu*) bersumber dari Raja dan Kaum Walaka berasal dari pimpinan masyarakat pertama (*Mia Patamiana*) yang mula-mula mengangkat raja (*primus inter paris*). Namun dalam perjalanan sejarah kedua golongan ini menjalin kekerabatan yang erat melalui perkawinan yang tentunya membawa efek-efek standar bagi keturunannya masing-masing. Larangan perkawinan antar kedua golongan ini dilakukan oleh *Sultan Langkariri* (1712-1750) dari golongan bangsawan Kumbewa. Dalam kerajaan Buton ada tiga puluh orang Bonto dari kaum Walaka, termasuk Sio Limbona. Yang terpenting di antaranya sesudah Sio Limbona adalah *Bonto Gampikaro* yang merupakan pengawal pribadi (ajudan Sultan dan memegang protokol = istana kerajaan). Karena dia ini dari kaum Walaka maka sering terjadi Bonto Gampiko merupakan informan dari Sio Limbona tentang tindak-tanduk Sultan dan jalannya pemerintahan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh:

- a. *Sapati*
- b. *Kenepulu*
- c. *Lakina Surowolio*
- d. *Lakina Baadiya*
- e. *Kapitalau Matanayo*
- f. *Kapitalau Sukanayo*
- g. *Bonto Ogena Matanayo*
- h. *Bonto Ogena Sukanayo*.

Tugas utama dari *Sapati* adalah menjalankan pemerintahan dan undang-undang kerajaan, dengan kata lain bahwa *Sapati* adalah semacam Perdana Menteri atau Mahapatih. *Sapati* juga menurut adat mempunyai kuasa atas wilayah Pulau Kabaena. ¹⁾ Kene-

1) Ligoet, *Reschrijving en Geschiedenis van Boeton*, halaman 18.

pulu merupakan pembantu utama Sapati dalam menjalankan pemerintahan, utamanya hal-hal yang menyangkut rakyat banyak. Dia juga dikenal sebagai (Kepala) Hukum.²⁾ *Lakina Surawolio* dan *Lakina Baadiya* yaitu Kepala dari kota Surawolio dan Baadiya yang merupakan kota satelit dari Keraton (ibukota kerajaan). Kedua jabatan ini diadakan kemudian dengan tujuan pengamanan kraton dari arah luar. Kedua *Kapitalau* mempunyai tugas untuk mengamankan kerajaan dari luar dan dari dalam. Kerajaan Buton adalah kerajaan kepulauan sehingga pengamanannya dilandaskan atas kekuatan di lautan. Kedua Kapitalau ini membagi tugas atas wilayah timur (*Matanayo*) dan wilayah barat (*Sukanayo*). *Bonto Ogena* (*Oge* dari *Maoge* = besar) yang terdiri dari dua orang, masing-masing untuk wilayah Matanayo (Timur) dan Sukanayo (Barat) mempunyai tugas-tugas utama untuk pengurusan penghasilan kerajaan (pajak) dan pembendaharaan kerajaan. Mereka yang bertugas untuk mengamati-amati terlaksananya keadilan dalam pemerintahan yang dilaksanakan *Sapati*.

Kedua *Bonto Ogena* berasal dari Walaka, sedang pejabat kerajaan lainnya dari Sultan sampai Kapitalau dari golongan Kaumu (bangsawan) *Bonto Ogena* merupakan jabatan tertinggi bagi Walaka, sehingga dianggap *Raja Walaka* dan karena tugasnya yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak (papara) maka secara adat dia juga sebagai sultannya Papara. Sio Limbona dengan pimpinan *Bonto Ogena* bersama "Kabinet" dengan pimpinan *Sapati* merupakan Dewan Tertinggi Kesultanan Buton (*Sarana Wolio*) yang sidang-sidangnya dipimpin oleh *Sapati*.

2 Wilayah dan Tata Keperintahan

Menurut Ligtoet wilayah Kesultanan Buton meliputi:

- a. Pulau Buton
- b. Pulau Muna
- c. Pulau Kabaena
- d. Pulau-pulau kecil sekitar Pulau Boton dan Pulau Muna.
- e. Pulau-pulau Tukang Besi
- f. Poleang dan Rumbia yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi (ujung barat daya)³⁾.

Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat Negeri

2) Ibid, halaman 42.

3) Ligtoet, ibid, halaman 2, 2.

Asal tersusun dalam tata pemerintahan di mana tiap-tiap wilayah besar dan kecil menempatkan dirinya masing-masing sesuai dengan sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah bawahan Kesultanan Buton dapat dibedakan atas:

- a. Wilayah Inti
- b. Moronene
- c. Barata.

a. *Wilayah Inti* terbagi lagi atas dua jenis, yaitu wilayah *Bonto* dan Wilayah *Bobato*. Wilayah *Bonto* yaitu wilayah-wilayah yang diperintah oleh kaum *Walaka* yang berjumlah tiga puluh Negeri yang disebut *Kadie*. Ketiga puluh *Kadie* ini berasal dari pengembangan wilayah *Bonto* yang empat (*Mia Patamia*) pada awal munculnya Kerajaan Buton. Wilayah *Bobato* yang berjumlah empat puluh *Kadie* adalah Pengembangan wilayah dari sembilan Negeri yang masing-masing mempunyai "rajanya" sendiri-sendiri yang disebut *Lakina*, yang mula-mula menggabung ke dalam Kerajaan Buton. Sembilan negeri ini secara kesatuan disebut *Sio Lipuna* (*Lipu* = wilayah). Wilayah *Bobato* yang terdiri dari empat puluh *Kadie* ini masing-masing dikepalai oleh seorang *Lakina*. Mereka ini adalah dari turunan *Kaumu* (bangsawan). Masing-masing *Kadie* di samping kepalanya (*Bonto* atau *Lakina*) mempunyai Dewan Pemerintahan sendiri yang disebut *Sara Kadie*. *Sara Kadie* ini tidak sama susunannya untuk semua *Kadie*, tetapi bervariasi menurut adat dan tradisinya masing-masing. Secara keseluruhan jenis jabatan *Sara Kadie* itu adalah:

- 1) *Bonto* (bukan kepala *Kadie Walaka*)
- 2) *Pangalasa*
- 3) *Kaosa*
- 4) *Tunggu*
- 5) *Parabela*
- 6) *Anakamia*
- 7) *Wati*

Wilayah *Kadie* juga tidak seragam, ada yang terdiri dari satu kampung dan ada pula yang meliputi beberapa kampung. Sebagai contoh:

- a) *Gundu-gundu*, Kepala Negeri adalah *Bonto*.

Sara Kadie: *Wati* (satu orang)

b) Mawasangka, Kepala Wilayah Lakina (Bobato)

Sara Kadie:

- 1) Mawasangka : a) *Bonto* (dua orang)
b) *Parabela* (empat orang)
c) *Wati* (delapan orang).
- 2) Longkamu : a) *Bonto* (satu orang)
b) *Parabela* (empat orang)
c) *Wati* (delapan orang)

Yang menjalankan pemerintahan Kadie sebenarnya adalah *Sara Kadi*, karena Kepala Kadie (*Bonto* atau *Lakina*) sebenarnya harus tinggal di Kraton (Ibukota). Para *Bonto* (tiga puluh orang) mempunyai tugas-tugas khusus di pusat kerajaan sedangkan para *Lakina* (*Bobato*) mempunyai tugas dalam pertahanan dan keamanan kerajaan, baik dari luar maupun dari dalam.

Daerah dari wilayah inti yang tujuh puluh *Kadi* ini meliputi Pulau Buton kecuali *Kulisusu* dan Pulau *Muna* bagian selatan.

b. *Daerah Moronene* yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Pulau *Kabaena*, *Poleang*, dan *Rumbia* merupakan daerah yang diperintah langsung secara adat (*de jure*) tetapi tidak langsung dalam pemerintahan. *Kabena* secara tradisional (adat) merupakan wilayah dari *Sapati*. Keadaan ini bersumber dari pengangkatan *Sapati* yang pertama (*Sapati Manjawari*) yang menurut tradisi berasal dari *Kabaena*. Namun demikian di *Kabaena* ada Kepala Pemerintahan sendiri yang bergelar *Mokole*. Pada tahun 1867 atau 1868 *Controleur Selayar* menerima sepucuk surat dari *Kabaena* (bukan dari *Bupati*) yang menginginkan penggabungan *Kabaena* ke *Selayar*.⁴⁾ Demikian pula *Poleang* dan *Rumbia* masing-masing punya Kepala Pemerintahan (*Mokole*), tetapi secara adat keduanya masuk dalam wilayah *Bonto* yaitu *Bontona Wandailolo* dan *Bontona Somba Marusu*.

c. *Barata* berarti cadik (perahu). Dengan demikian wilayah *Barata* adalah wilayah yang dianggap dan diharapkan untuk menjaga kestabilan kerajaan. Dalam hal ini termasuk pula pengertian menjaga keamanan dari luar. Dalam Kesultanan Buton ada empat wilayah yang berkedudukan sebagai *Barata* yaitu *Muna*, *Tiworo*, *Kalingsusu*, dan *Kaledupa*. *Muna* dan *Tiworo* merupakan kerajaan

4) Ligtoet, *ibid*, halaman 104.

an-kerajaan yang bersamaan munculnya dengan Kerajaan Buton. Muna mempunyai wilayah di Pulau Muna bagian tengah sedangkan wilayah Tiworo meliputi bagian utara Pulau Muna dan pulau-pulau di Selat Tiworo. Tidak lama setelah timbulnya kerajaan-kerajaan ini, ketiganya menjalin hubungan kekerabatan.

Barata Kesultanan Buton yang empat ini masing-masing mengatur dirinya dengan Dewan Legislatif dan Dewan Pemerintahannya sendiri-sendiri. Pada pertengahan abad XIX semua Barata kecuali Muna sudah merupakan wilayah yang menyatu dengan Buton. Muna dengan berpegang teguh pada tradisi hubungannya dengan Buton sebagai dua kerajaan bersaudara, selalu menolak kedudukan dianggap Barata dari Buton. Perjanjian bersaudara ini bermula pada jaman diangkatnya Murhum yang sementara menjabat Raja Muna sebagai Raja (kemudian Sultan) Buton. Di Muna dia digantikan adiknya La Posasu (lihat silsilah di atas). Dan sejak itu pula Muna Selatan digabungkan ke dalam Kerajaan Buton. Secara tradisional memang Buton tidak mencampuri pemerintahan Kerajaan Muda. Sepanjang sejarahnya, Muna sering bertentangan dengan Buton yang selalu menempatkan Muna di pihak yang merugi. Dalam setiap kekalahan Muna menghadapi Buton, Buton selalu menempatkan pejabatnya sebagai pejabat Raja Muna. Tetapi sesudah keadaan aman dan dapat dikuasai, Sara Muna kembali bebas memilih rajanya.

Ketetapan Barata yang empat menurut tradisi Buton bermula sejak Sultan Buton IV La Elangi (1597-1631). Perselisihan antara Buton dengan Muna bermula sejak 1664. Pada waktu itu yang menjadi raja Muna adalah Sangia Kaindea. Saat itu (1664) Sultan Ternate menyerahkan kembali Pansiano (Muna) kepada Sultan Buton dengan tidak setahu Raja Gowa, sedangkan sebenarnya pulau itu adalah masuk daerah kekuasaan Gowa.⁵⁾ Rupanya sejak serangan Sultan Hasanuddin ke Buton (1655) Muna dan Tiworo telah dapat dikuasai oleh Gowa dan Raja Muna Sangia Kaindea menjadikan kesempatan ini untuk bebas dari pengaruh Ternate. Penyerahan ini ditentang oleh Raja Muna dan tidak mau mengakui kekuasaan Buton. Atas bantuan VOC dan Ternate Sangia Kaindea dapat ditangkap dan dibawa ke Ternate. Selama di Ternate jabatan Raja Muna dipegang oleh istrinya Wa Ode Wakelu anak dari *La Manempa* Sapati Buton waktu itu. Sesudah peperangan Gowa

5) Abdul Razak Gd. Patunru, *Sejarah Gowa* (1967), halaman 70/71.

Sangia Kaindea kembali ke Muna sebagai Raja Muna tetapi pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh La Ode Idris seorang Kapitalau dari Buton. Pemerintahan La Ode Idris ini disebut Muna sebagai *Sarano Kraindeadea*. Cucu Sangia Kaindea Raja Muna *La Ode Husai Omputo Sangia* pada masa pemerintahannya selalu tidak mengakui kekuasaan Buton atas Muna. Malah Belanda menganggap Muna "*Vrij en on van Boeton*" pada 1756. ⁶⁾

Anak-anak La Ode Husain yang berturut-turut menggantikannya pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX menunjukkan perkembangan-perkembangan atas kuasa Buton. Malah sebelum 1799 terjadi perang yang hebat di mana dikabarkan gugurnya Raja Muna dan banyaknya rakyat Muna yang korban. ⁷⁾ Raja yang korban ini kemungkinan adalah La Ode Harisi yang di Muna digelar *Omputo nigege* (Raja yang dihukum mati dengan jeratan benang di leher).

Pada 1816 Muna bersama dengan Tiworo dengan bantuan *Syarif Ali* dari Sulawesi Selatan kembali menentang Buton. Perang ini berlangsung sampai akhir 1823 dengan kekalahan Muna dan Tiworo. Seorang Kapitalau dari Buton ditunjuk oleh Sultan Buton sebagai pejabat Raja Muna yaitu La Ode Ngkumabusi.

Pada 1838 Sultan Buton Muh. Idrus mengadakan Undang-Undang Barata yang baru yang turut pula ditandatangani Raja Muna *La Ode Sumaili*. Pengganti La Ode Sumaili adalah *La Ode Bulai* yang pada tahun 1861 berselisih dengan pembantunya *Kapitalao Lohia (Laode Ngkada)*. Dalam peristiwa ini Sultan Buton mengirim tentaranya. La Ode Bulai diasingkan di suatu tempat walaupun resminya masih Raja Muna dan La Ode Ngkada menyingkir ke Kendari. Sesudah La Ode Bulai meninggal La Ode Ngkada dipanggil kembali oleh Sultan Buton ke Muna. Seterusnya raja-raja Muna diangkat atas penunjukan atau persetujuan Sultan Buton.

Jelaslah bahwa sepanjang abad XIX Muna adalah wilayah (Barata) dari Buton, walaupun Muna berdaulat ke dalam. Orang Muna sampai jaman terakhir tidak mengakui negerinya sebagai bawahan Buton. Barata yang lain (Kalisusu, Tiworo, dan Kaledupa) dalam perkembangannya secara bertahap menjadi wilayah yang menyatu dengan Buton. Yang tinggal pada mereka hanya ke-

6) Ligtoet, *op. cit.* halaman 81.

7) *Ibid.* halaman 87

dudukan khusus sebagai Barata. Pejabat-pejabatnya selalu ditentukan dari Kraton Buton, di mana bekas mengangkat rajanya sendiri.

3. Hubungan dengan Belanda

Perjanjian-perjanjian Buton dengan Belanda sejak jaman VOC (1613) memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. bantuan pada Belanda jika diperlukan
- b. aturan pelayaran dan perdagangan
- c. persetujuan Belanda jika mengangkat raja baru
- d. kawan/lawan Belanda adalah kawan/lawan Buton
- e. larangan mengadakan hubungan dengan bangsa lain
- f. penebangan pala/cengkeh di wilayah Buton diganti ruginya.

Pada 7 Agustus 1824 Buton menandatangani Perjanjian Bungaya diperbaharui di mana diatur adanya persekutuan raja-raja Sulawesi (Selatan dan Tenggara). Perjanjian ini antara-lain berbunyi:⁸⁾

”Art. 1. Er zal een altijd durende vrede, vriend en bondgenootschap bestaan tusschen het Nederlansch Gouvernement en de na te noemen vorsten van Celebes.

”Art. 2. Het Gouvernement is het eerste hoofd van het bondgenootschappen schut-en schermheer van hetzelve.

”Art. 3. Er zal volstrekt geene Superieuriteit tuschen de overige bondgenooten bestaan, maar worden dezelve alle verklaard te zijn vrije en onafhankelijke heëren, onder welke geen onderscheid bestaat dan dat van ouderen en jongeren broeder.

Art. 4.

Art. 5. De vrienden van het Gouvernement zullen de vrienden van de bondgenooten zijn, de vijanden van het Gouvernement ook de vijanden van dezelve, welke zij gehouden met volk en wapenen des gerequireerd tegen te gaan.

Art. 6.

Art. 7. Alle geschillen tusschen de bondgenooten zullen moetem worden besloten in den raad der bondge-

8) Ligtfoot, *ibid*, halaman 90/91.

nooten, die te Oejoeng Pandang zal residieren.

Deze raad zal bestaan uit en gepresideerd worden door den Gouvernement, en uit de verschillende vorsten van bondgenootschap of zoodanige gecommitteerden, als ieder koning zal verkiezen tot de afdoening van het geschilte zonden.

Art. 8.
Kerajaan Sulawesi Tenggara yang hanya menandatangani perjanjian ini hanyalah Buton.

Dalam perjanjian ini masih tampak adanya kedaulatan dari tiap-tiap anggota Persekutuan. Dengan kata lain bahwa kerajaan-kerajaan Sulawesi adalah kerajaan-kerajaan merdeka hanyalah terikat dalam suatu persekutuan, dengan pimpinan Persekutuan adalah *Gouvernement* Belanda (gubernur Celebes).

Kedadaan ini berubah dengan kedatangan A. Ligtfoot (*Secretaris voor de Inlandsch zaken*) di Bau-Bau pada bulan Agustus 1873 dan membuat perjanjian baru dengan Boeton. Perjanjian ini selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ⁹⁾

"Art. 1. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verklaren voor zich en hunne nakomelingen, dat het rijk van Boeton een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch - Indie en gevolgelijk staat onder opperheerschappij van Nederland.

Art. 2. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich tot het voortdurend onderhouden van vrede en vriendschap met het Nederlandsch - Indie Gouvernement, te zijn de vijanden van de vijanden van Nederland en de vrienden van de vrienden van Nederland, mitsgaders om op aanzoek van het Nederlandsch - Indie Gouv. de hulp te verleen, welke in hun vermogen is, met menschen, wapenen en vaartuigen, tegen de vijanden van Nederland en aan de vrienden van Nederland.

Art. 3. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om geen brieven, geschenken, zendelingen of gezanten te bestemmen naar de gezaghebbenden van

9) Ligtfoot, *ibid*, halaman 105.

eenige andere natie als de Nederlanders, en evenzoo geene brieven geschenken aan te nemen, noch zendingen of gezanten te ontvangen van zoodanige gezaghebbenden zonder voorkennis en toestemming van het Gouv. van Ned. Indie

De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich tevens niet te gedoogen, dat die bestemming, aanneming of ontvangst van brieven, geschenken, zendingen of gezanten door of namens hunne kinderen of aanverwanten plaats viden.

Art. 4. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om naar hun vermogen mede te werken tot de daarstelling ten koste van het Ned. Ind. Gouv. van alle versterkingen, gebouwen en magazijnen, welke het Ned. Ind. Gouv, later noodig achten mocht binnen het land van Boeton op te richten.

Art. 5. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om alden grond binnen den omtrek van een paal rondom elke verstreking die het Ned. Ind. Gouv. binnen het land van Buton opricht, in vollen eigendom aan hetzelfde af te zullen staan.

Het Ned. Ind. Gouv. verbindt zich daarentegen om, indien tot dien afstand over bijzonder eigendom zoude moeten worden beschikt, deswege billijke vergoeding te verleen.

Art. 6. De Sultan en de rijks grooten van Buton verbinden zich geene versterking en op te werpen zonder voorkennis van het Ned. Ind. Gouv.; en om zelfs die versterkingen, welke met die voorkennis mochten opgeworpen zijn op de eerste aanzegging te slechten.

Art. 7. Wanneer het Ned. Ind. Gouv. mocht goedvinden tegen deszelfs vijanden strijdmiddelen, zoowel in manschappen als in oorlogsbehoeften en geschut het rijk van Boeten te doen doortrekken, of zendingen naar die vijanden af te vaardigen, verbinden zich de Sultan en de rijks grooten alle gevorderde hulp en bijstand te bieden, en door hunne onderdanen te doen bieden, zoowel ten aanzien van het leveren van volk en vaar-

tuigen altot het geven van levensonderhoud, alles ten koste van het Ned. Ind. Gouv.

- Art. 8. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich, het welzijn des volks te bevorderen, met rechtvaardigheid te regeren, den landbouw, de nijverheid, den handel, de scheepvaart en alle wettige en nuttige ondernemingen te beschermen, geene verordeningen te maken, door welke die zouden belemmerd worden en niet willekeurig te beschikken over de personen en goederen van hunne onderdanen.
- Art. 9. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om het volksonderwijs, zoo daartoe gelegenheid bestaat, krachtdadig en naar hun beste vermogen te ondersteunen en te bevorderen.
- Art. 10. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich de koepok-inenting in Boeton naar hun beste vermogen te bevorderen.
- Art. 11. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich den zeeroof met alle macht tegen te gaan.
- Art. 12. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich alle schepen en vaartuigen, welke op de kusten van hun rijk in nood mochten vervallen, te verleenen bijstand, de schipbreukelingen te verzorgen, en zich geene van hunne toe te eigenen, dat hunne ondergeschikten zich die toe eigenen.
- Art. 13. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich schepen of vaartuigen, welke uit zee aan de stranden van hun rijk mochten aandrijven of aangebracht worden en welker eigenaren zijn, te bergen of wel toen behoefte van de belanghebbenden in het openbaar te verkoopen, indien die niet kunnen bewaard worden.
- Art. 14. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich, van het stranden of aanbrengen uit zee van schepen, vaartuigen of goederen onverwijld kennis te geven aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
- Art. 15. De Sultan en de rijks grooten van Boeton kunnen

verderen hulp en bergloon; hetzelfde wordt naarmate van de moeite door den Sultan en de rijks grooten van Boeton bergroot; de Sultan geeft van deze begrooting kennis aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

De belanghebbenden, die zich met deze begrooting mochten bezwaard gevoelen, kunnen de beslissing inroepen van den gouverneur-generaal door tusschenkomst van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Art. 16. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich in hun rijk niet te dulden menschenroof en den handel in menschen, noch den in en uitvoer van slaven.

Art. 17. De Sultan en de rijks grooten van Buton verbinden zich de bevoegdheid, om onder den grond te graven en uit dat graven vruchten te trekken, niet te zulden afstaan aan personen, niet behorende tot hunne inheemsche onderdanen, dan na voorafgaand overleg en in overeenstemming dienaangaande met den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, opdat bedoelde ondernemingen van nijverheid geregeld worden in het meeste voordeel van het rijk van Boeton, zonder dat het Ned. Ind. Gouv. zich in dat voordeel eenig aandeel verstaat voor te behouden.

Art. 18. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich geene gronden te verhuren aan personen, niet behorende tot hunne inheemsche onderdanen, dan met voorweten van het Ned. Ind. Gouv., opdat die huur telkens, wanneer zulks het Gouv. van Ned. Ind. mocht noodig voorkomen, geregeld worden in overeenstemming met het Ned. Ind. Gouv., zonder eenig voorbehoud van wonst voor het Gouv., maar in het meeste belang van Boeton.

Art. 19. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om aan Europeanen andere Westersche of Oostersche vreemdelingen geene gronden af te staan, en hunne toelating of vestiging buiten de havens van het rijk niet to vergunnen, zonder voorkennis en vooraf

verkregen toestemming van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Handelaars echter kunnen in de havens van het rijk van Boeten worden toegelaten en aldaar verblijf houden zonder die voorkennis en toestemming, zoolang zij de orde en rust niet verstoren.

Van hun gedurende meer dan drie maanden voorgast verblijf in die havens wordt Sultan en de rijks-grooten van Boeten kennis gegeven aan de gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

- Art. 20. De Sultan en de rijks-grooten van Buton verbinden zich aan allen, die zich met vergunning van het Ned. Ind. Gouv. binnen hun rijk bevinden, te verleenen bescherming van personen en goederen.
- Art. 21. Handelaren en vaartuigen van het rijk van Boeten moeten voeren de Nederlandsche vlag, en genieten in den handel op Java en alle andere landen onder het bestuur van het Ned. Ind. Gouv. al de regten, die aan onderdanen van het Ned. Ind. Gouv. zijn toegekent, mits voorzien zijnde voor Europeesch getuigde vaartuigen van eenen zeebrief en voor inlandsch getuigde vaartuigen van eenen behoorlijken pas van het Ned. Ind. Gouv. of van den Sultan van Boeton.
- Art. 22. De Sultan en de rijks-grooten van Boeten verbinden zich de Ned. Ind. muntspecien, zooals die door het Ned. Ind. Gouv. worden vastgesteld, steeds in het land van Boeten als gangbaar en wettig betaalmiddel toe te laten.
- Art. 23. De Sultan en de rijks-grooten van Boeten verbinden zich de aankomst van schepen, die steenkolen voor het depot te Boeton aanbrengen en van stoomschepen, die kolen wenschen in te nemen, steeds op aanvraag van de gezaghebbers of commandanten dier schepen de tot het lossen en laden benoodigde koelies tegen billijke betaling te leveren.
- Art. 24. De Sultan en de rijks-grooten van Buton verbinden zich in het rijk niet toe te laten personen, die zich zonder verlof uit de land of zeemacht van Nederland

of deszelfs bezittingen daar buiten mochten verwijderd hebben, noch misdadigers of veroordeelden uit eenig personen worden bij ontdekking dan wel op aanvraag aan het Gouvernement uitgeleverd.

Art. 25. Om alle twisten over het straffen van misdadigers voor te komen, wordt uitdrukkelijk bepaald, dat elke misdadiger wordt gestraft volgens de wetten van het land op het land, waar hij zijne misdaad gepleegd heeft.

Europeanen en met hen gelijk gestelden, Oostersche vreemdelingen zoomede Inlanders, te huis behoorende in landen onder regtstreeksch gezag staande van het Gouv. van Ned. Indie, en voorts allen, die de Christelijke godsdienst belijden worden, wanneer zij binnen Boeton eenig misdrijf plegen, aan het Gouv. uitgeleverd om naar deszelfs wetten te worden terechtgesteld.

Art. 26. Bij overleiden of aftreden van den Sultan behooren de rijks grooten daarvan onverwijld kennis te geven aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

De rijks grooten geven als dan tevens kennis, wie volgens de instellingen des lande tot opvolger van den Sultan gekozen is.

De gekozen vorst wordt door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden onder nadere goedkeuring van het Ned. Ind. Gouv. erkend, en is gehouden zich schriftelijk te verbinden tot de nakoming van de onderwerpelijk overeenkomst alvorens door het Ned. Ind. Gouv. te worden bevestigd.

Art. 27. Het Ned. Ind. Gouv. verklaart zich met het invonding bestuur van het rijk van Boeten niet te zullen bemoeijen, zoolang deze overeenkomst door Boeton getrouw en stiptelijk wordt nagekomen.

Art. 28. Omtrent punten, bij dit kontrakt niet voorzien, en die nader blijken mochten in het belang van land en volk regeling te behouwen, wordt voorts overeengekomen, dat partijen zich deswege in de minne zullen

verstaan.

Art. 29. Dit kontrakt vervangt alle vroegere overeenkomsten tusschen de voormalige Vereenigde Oost Indische Compagnie of door het Ned. Ind. Gouv. met het rijk van Boeton gesloten, voor zoover dezelve strijdig zijn met het dit kontrakt overeengekomene.

Dit kontrakt werd door den Gouverneur Generaal bekrachtigd.”

Pada tahun 1667 Buton telah menandatangani perjanjian dengan VOC di mana Buton diharuskan menebang pohon cengkeh dan pala yang ada dalam kerajaannya dengan imbalan kerugian seratus ringgit setahun. Dalam perjanjian 1824 ganti rugi ini dinaikkan menjadi seratus dua puluh ringgit atau Fl. tiga ratus (rupiah). Juga ditetapkan bantuan Belanda kepada Buton berupa mesiu dan peluru. Bantuan kepada Buton dari Belanda ditingkatkan lagi pada 1865. Di samping mesiu dan peluru sejak itu tiap tahun Buton memperoleh bantuan Fl. seribu (rupiah). Bantuan mesiu dan peluru dihapus pada 1868 karena Belanda menganggap perairan Buton dan jalur Buton – Makasar telah aman dari gangguan bajak laut. Penebangan pala dan cengkeh dihentikan pada 1867 dan uang ganti rugi sebanyak Fl. tiga ratus dijadikan hadiah tahunan bagi Sultan Buton dan pembesar kerajaannya.

Untuk mengawasi pelaksanaan penebangan cengkeh dan pala (sejak 1667) di Buton ditempatkan satu detasemen kecil tentara yang terdiri dari empat orang yang disebut "*Kometer yang ka ampat*" yang terdiri dari satu sersan, satu kopral, dan dua prajurit. Kemudian detasemen ini berubah fungsi (dan tidak lagi disebut *Kometer yang keempat*) menjadi pengawas gudang arang dan pengisian arang pada kapal-kapal perang dan kapal-kapal Belanda lainnya.¹⁰⁾ Gudang arang dibangun di Bau-Bau pada 1858.

Jika terjadi penggantian Sultan, maka Sultan Buton yang baru diwajibkan menandatangani perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan-sultan sebelumnya. Penandatanganan ini sering dilakukan bukan oleh sultan sendiri tetapi oleh utusan-utusan-nya di Fort Rotterdam di Ujung Pandang.

Buton telah mengawali jalinan hubungan dengan Belanda sejak 1613 dan dalam Perjanjian 1873 ditegaskan bahwa Buton

10) Ligtvoet, *ibid*, halaman 23.

"een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch — Indie en gevolgelijk staat onder de opperheerschappij van Nederland." Namun demikian tidaklah berarti bahwa Kerajaan Buton dalam kenyataannya merupakan "jajahan" Belanda sampai ditandatangani Perjanjian 1906. Hubungan Buton dengan Belanda sebelum 1906 adalah hubungan dalam *bondgenootschap* bukan merupakan tanah jajahan dari *Nederlandsch — Indie*. 11)

II. KERAJAAN KONAWE — LAIWUI

1. Bentuk Pemerintahan

Kerajaan Konawe diawali dengan munculnya tokoh *Sangia Ndudu* (*sangia* = Dewa = Sang Hiang, *Ndudu* = turun) yang bersama *To Lahiang*.¹²⁾ Entah berapa lama kemudian kerajaan ini terbagi atas tiga kerajaan yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang *Mokole* (Raja). Kerajaan-kerajaan itu adalah: Padangguni, Wawolesea, dan Besilutu.

Mokole Padangguni yang bernama *To Tonggano Wonua* (Lett. *To* = orang *Tonggano* = Tengahnya, *Wenoa* = Negeri atau Kerajaan) berusaha mempersatukan ketiga kerajaan ini dengan ibukotanya *Unaaha* (*Una* = padang, *aha* = luas). Pada saat itulah muncul *Sangia Ndudu* kedua yang dimasyhurkan dengan nama *Wekoila*. *Wekoila* kawin dengan putra *To Tonggano Wonua* yang bernama *Ramandalangi*. *Wekoila* diangkat menjadi *Mokole More i Konawe* yang berarti *Mokole Putri* yang agung di Konawe dengan pengertian bahwa ketiga kerajaan itu bersatu menjadi Kerajaan Konawe. Kenaikan takhta *Wekoila* merupakan awal dari sejarah Kerajaan Konawe. Menurut B. Bhurhanuddin, *Wekoila* ini turun ke Konawe pada kira-kira 1150 M. dan diduga berasal dari Kediri.¹³⁾ Tradisi setempat menyatakan sebagai kerabat *Sawerigading* dari Kerajaan Luwu.

Bentuk pemerintahan dari Kerajaan *Wekoila* ini tidak diketahui, kecuali berita tradisi tentang adanya *Wati* sebagai pembantu *Mokole*. Beberapa generasi kemudian muncul pula *Sangia Ndudu* ketiga yang digelar *Anawai Ngguluri* (*Anawai* = putri, *Kuluri* = burung nuri).

11) Ligvoet, *ibid*, halaman 22.

12) Abdul Hamid Hasan.

13) B. Bhurhanuddin, *Jejak Sejarah Tomanurung*, 1977, halaman 140.

Setelah itu datang lagi orang luar biasa (bukan sangia) yang bernama *Onggabo* yang kawin dengan *Elu* (si Yatimpiatu) putri Wokole Konawe (Lakidende) yang saat itu telah meninggal. Saat itu Konawe baru saja mengalami serangan wabah yang hebat yang hampir-hampir memusnahkan penduduk. Kerajaan Konawe praktis tidak punya pemerintahan lagi. *Onggabo* mengatur kembali rakyat Konawe yang selamat dan memulihkan pemerintahan yang langsung dipimpinya sebagai Mokole. Kerajaan Konawe dibagi atas beberapa *Tobu* yang dikepalai *Puu Tobu* (*Mbutobu*) dan di bawahnya memerintah para *Toono Motuo*. Seorang *Toono Motuo* dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh *Pabitara* (Pemegang adat), *Tadu* (urusan perang), *Tamalaki* (panglima perang), *Posudo* (bendahara), *Tolea* (duta adat khususnya urusan perkawinan), *Mbuowai* (urusan kesehatan = dukun), *Mbuokoi* (urusan kepercayaan), dan *Mbusehe* (urusan perdamaian). Tiga jabatan terakhir baru diadakannya sedangkan yang lain telah ada sebelumnya. Tidak diperoleh informasi tentang jabatan-jabatan yang ada sebagai pembantu Mokole dan *Puu Tobu*.

Menjelang pertengahan abad XVI Kerajaan Konawe diperintah oleh Mokole *Melamba*. Menurut tradisi, *Melamba* bersaudara dengan *Hahu Oleo* yang kemudian menjadi Sultan Buton I dengan gelar *Murhum*. Pada jaman *Melamba* Kerajaan Konawe mencapai wilayahnya yang terluas yaitu seluruh jazirah tenggara Sulawesi minus Mekongga di dekat Kolaka sekarang.

Pada kira-kira pertengahan abad XVII di jaman pemerintahan *Tebawo* (gelar sesudah wafatnya *Sangia Inato*) terjadi perubahan struktur pemerintahan. Mulai saat itu dikenallah dalam kehidupan Kerajaan Konawe adanya: *Siwole Mbatohuu* dan *Pitu Dula Batu*. *Siwole Mbatohuu* adalah empat wilayah Konawe yaitu:

- a. *Tambo i losoano oleo*, (gerbang timur) yaitu *Ranomeeto* dengan pimpinannya bergelar *Sapati*.
- b. *Tambo i tepuliano oleo*, (gerbang barat) yaitu *Latoma* dengan pimpinannya *Sabandara*.
- c. *Barata i hana* (sayap kanan) yaitu *Tongauna* yang dipimpin oleh *Penggawa*.
- d. *Barata i moeri* (sayap kiri) yaitu *Asaki* dengan kepalanya *Inowa*.

Pengibaratan Kerajaan Konawe sebagai suatu *Siwole* yang

bersudut empat dapat dilihat adanya pembagian kerajaan ke dalam empat wilayah pemerintahan atau pemberian semacam otonomi kepada wilayah-wilayah tersebut. Ditinjau dari segi nama kesatuan wilayah *Tambo* dan *Barata* yang berarti *gerbang* dan *sayap*, di dalamnya terkandung pengertian otonomitas dan unsur pertahanan dan kepentingan perekonomian. Dalam kenyataan selanjutnya sesudah itu wilayah ini menampakkan otonomitas dalam mengatur diri malah mempunyai elite tersendiri dan pengangkatan kepala pemerintahan diatur sendiri pula. Jika dilihat dari sudut gelar pimpinannya maka dapat dipastikan bahwa jabatan ini sebelum penetapan *Siwole Mbatohuu* adalah merupakan jabatan "Kabinet" Kerajaan Konawe.

Jika *Siwole Mbatohuu* berdasarkan atas "wilayah" maka *Pitu Dulabatu* (tujuh piring batu) diberikan pada tujuh pejabat kerajaan jadi berdasarkan atas "fungsi". Dengan demikian *Pitu Dulabatu* merupakan "Kabinet" Kerajaan. *Pitu Dula batu* adalah:

- a. *Sulemandara*, Perdana Menteri dan Urusan Luar Negeri.
- b. *Ketubitaru*, Urusan Hukum/Peradilan
- c. *Anakia Mombohanuako*, Urusan Rumah-Tangga istana.
- d. *Tusawuta*, Urusan Pertanian.
- e. *Tutuwi, Motaha*, Panglima/Keamanan istana.
- f. *Kapita Anamolepo*, Pimpinan Pemuda/Keamanan di darat.
- g. *Kapitalau*, Urusan Keamanan di laut.

Ketujuh pejabat ini ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu kerajaan dengan maksud utama untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya masing-masing¹⁴⁾ dan dilihat pula dari urgensi tugasnya, umpamanya Kapitalau ditempatkan di Sampara di muara Sungai Konawe. Kerajaan Konawe tidak mengenal pajak-pajak khusus yang terpusat untuk membelanjai aparat kerajaannya. Kemudian kelihatan bahwa *Tujuh Dula Batu* ini menjadi penguasa di daerahnya masing-masing dan mempunyai otonomitas tersendiri. Namun demikian wilayah dari *Empat Siwole Mbatohuu* merupakan wilayah terbesar dari Kerajaan Konawe.

Di samping penetapan *Siwole Mbatohuu* dan *Pitu Dula Batu Tebawo* menetapkan pula adanya *Inea Sinumo Wuta Mbinotiso* yang merupakan tempat calon pertama pengganti Mokole. Wilayah *Inea Sinumo* ini merupakan wilayah khusus pula dan mengatur

14) Keterangan Sdr. A. Hamid Hasan

dirinya sendiri. Tetapi dalam kenyataan kemudian tidak ada Mokole Konawe yang diambil dari sini, walaupun telah diminta oleh Dewan Kerajaan. Di luar daerah-daerah ini ditetapkan pula seorang Mokole di Andoolo (Konawe Selatan). Dewan Kerajaan Konawe terdiri dari: empat Siwole Mbatohuu; tujuh Pitu Dula Batu; tiga puluh Puu Tobu; dan tiga ratus Toono Motuo.¹⁵⁾ Dewan ini jika bersidang (memilih Mokole dan lain-lain) dipimpin oleh Solemandara.

Pembagian wilayah Konawe ke dalam Siwole Mbatohuu dan ditempatkannya para Kabinet Kerajaan di luar ibukota dengan wilayahnya masing-masing mengancam keutuhan Kerajaan Konawe. Tiap-tiap wilayah memupuk dirinya masing-masing dan melonggarkan hubungan dengan Mokole di Unaaha. Setelah meninggalnya Lakidende pada akhir abad XVIII Dewan Kerajaan tidak dapat lagi memilih seorang Mokole Konawe. Sejak itu Kerajaan Konawe dipimpin oleh Sulemandara yang tentunya tidak punya cukup wibawa adat untuk menegakkan Kerajaan Konawe.

Ranomeeto kelihatan menonjol ke depan apa lagi wilayahnya merupakan wilayah yang ramai dikunjungi dari pedagang dari luar. Pada abad XIX Sambara yang merupakan wilayah Kapitalau telah dapat disatukan ke dalam wilayah keperintahannya. Kemajuan Ronomeete dipercepat pula dengan munculnya Arung Bakung seorang bangsawan Bugis pada awal abad XIX dan tinggal di tepi Kali Sampara (Konaweha). Beberapa tahun kemudian dia berangkat ke Tiworo dan berhasil menguasai kerajaan ini melalui perkawinan. Dari perkawinan ini lahir tiga orang anaknya yaitu: a. La Sambawa, b. Pasiya Daeng Matene, dan Putiri Daeng Lolo.

La Sambawa kawin dengan Maho yang disebut oleh Ligtoet sebagai *vorstin van Laiwui*¹⁶⁾ (Raja Putri Laiwui). Rupanya Maho adalah Sapati Ranomeete yang oleh Belanda (dan orang luar) dianggap sebagai Raja (Ratu) Laiwui. Di bilangan Tiworo dan Muna orang Konawe (Tolaki) dikenal sebagai orang *Laiwui*. Putra *La Sambawa* dan *Maho*, *La Mangu* menggantikan ibunya sebagai Raja Laiwui (*verst van Laiwui*). *La Mangu* sudah pasti melepaskan dirinya dari ikatan Konawe yang sebenarnya telah runtuh walaupun *Saranani* masih menjabat sebagai *Sulemandara Konawe* di Pondidaha. Sebagai Raja Laiwui *La Mangu* membentuk Kabinetnya dengan jabatan-jabatan:

16) Ligtoet, halaman 22.

- a. *Sapati*
- b. *Kapita*
- c. *Penggawa*

Untuk mengimbangi La Mangu di Lepo-lepo (Ranomeete) Sulemandara memberi kuasa pada Mokole Andoolo (Konawe Selatan) yang wilayahnya berbatasan dengan Ranomeete, untuk menerima upeti-upeti di wilayah bagian selatan. La Mangu meninggal pada 1871 dan digantikan oleh anaknya *Sao-Sao*.

2. Wilayah dan tata Keperintahan

Pada sekitar pertengahan abad XVI wilayah Konawe meliputi seluruh jazirah tenggara Sulawesi minus wilayah Mekongga di sekitar Kolaka sekarang. Kemudian Moronene (Poleang dan Rumbia) menjadi wilayah Kerajaan Buton. Menjelang akhir abad XVII yaitu sesudah pembentukan *Siwole Mbatohu* daerah sebelah barat Sungai Konawe yang termasuk wilayah Sabandara di Latoma diserahkan pada Mekongga karena terjadinya hubungan keluarga (perkawinan) antara Putri Sabandara dengan *Mokole Mekongga*. Sejak itu wilayah Konawe meliputi daerah yang hampir sama dengan Kabupaten Kendari sekarang. Walaupun sejak akhir abad XVIII Mokole Konawe sudah tidak ada tetapi kesatuan adat Kerajaan Konawe masih berdiri dalam diri tokoh seorang Sulemandara sampai meninggalnya *Sulemandara* terakhir pada 1904. Menjelang pertengahan abad XIX Ranomeete telah menyatakan diri sebagai suatu kerajaan tersendiri dengan nama *Laiwui*. Wilayahnya meliputi wilayah yang sekarang meliputi kecamatan-kecamatan:

- | | |
|--------------|-------------|
| a. Ranomeete | e. Mandonga |
| b. Lainea | f. Kendari |
| c. Meramo | g. Soropia |
| d. Poasia | h. Wawonii |
| | i. Sampara |

(sekarang Kabupaten Kendari terdiri dari lima belas Kecamatan).

Wilayah Kerajaan Konawe pada pertengahan abad XVII (Sangia Inate) terbagi atas:

- a. empat wilayah *Siwole Mbatohuu*
- b. tujuh wilayah *Pitu Dula Batu*
- c. satu wilayah *Inea Sinumo*

d. satu wilayah *Andoolo* (Konawe selatan).

Tiap-tiap wilayah terbagi atas *Tobu* yang dikepalai oleh *Puu Tobu*. Jumlah *Tobu* seluruhnya adalah tiga puluh yang masing-masing lagi terbagi atas wilayah yang dipimpin oleh *Tono Motuo* (lett. Orang tua). Jumlah *Toono Motuo* adalah tiga ratus orang.¹⁷⁾ Dari tiga ratus *Toono Motuo*, tiga orang di antaranya mempunyai kedudukan khusus karena tugasnya yang langsung berhubungan dengan pusat kerajaan. Mereka itu adalah:

- a. *Toono Motuo i Pehanggo*, pemegang arsip Kerajaan
- b. *Toono Motuo i Sangguna*, persenjataan.
- c. *Toono Motuo i Tawanga*, perlengkapan¹⁸⁾.

Kemungkinan sekali bahwa *Pehanggo*, *Sangguna* dan *Tawanga* adalah wilayah awal dari Kerajaan Konawe dengan mengingat bahwa jabatan *Toono Motuo* adalah jabatan yang tertua dalam sistem pemerintahan Konawe, malah sebelum adanya sistem kerajaan (*Mokole*).

Sesudah Kerajaan Konawe runtuh dan tiap-tiap wilayah mengatur dirinya masing-masing maka ada beberapa wilayah yang tergabung ke dalam wilayah lain dan ada pula yang menonjol. *Ranomeete* menonjol malah mendirikan kerajaan sendiri dengan cita-cita mempersatukan kembali bekas Kerajaan Konawe ke dalam Kerajaan *Laiwui*. Wilayah *Kapitalu* berhasil dikuasainya pada awal abad XIX. *Mokole Konawe* sudah tidak ada sejak akhir abad XVIII tetapi *Mokole Andoolo* tetap bertahan dan pada akhir abad XIX diserahkan kekuasaan oleh *Sulemandara Saranani* untuk menerima upeti di wilayah selatan atas nama Konawe. Tindakan ini tidak lain daripada untuk mengimbangi Kerajaan *Laiwui* (*Ranomeete*) tetangga *Andoolo*. Yang berubah sepanjang abad XIX adalah *Siwole Mbatohu*, *Pitu Dula Batu* dan *Tobu*, sedangkan *Toono Motuo* tetap seperti semula.

Rintangannya besar yang dihadapi *Laiwui* untuk mempersatukan bekas Konawe adalah anggapan bangsawan Konawe bahwa *Laiwui* adalah Kerajaan yang cacak-bakalnya "orang asing" (*Bugis*).

17) Keterangan Sdr. A. Hamid Hasan.

18) Keterangan Sdr. Husen A. Chalik.

3. Hubungan dengan Belanda

Tidak ada berita baik dari sumber tradisi maupun dari sumber lain yang dapat mengungkapkan hubungan VOC dengan Kerajaan Konawe. Bagi VOC rupanya Konawe dianggap tidak penting karena pusat kerajaannya terletak di pedalaman. Tetapi ada berita tradisi yang menyatakan bahwa Konawe memberikan bantuan pada Aru Palaka dalam Perang Gowa (1667) dengan mengirimkan pasukan-pasukan di bawah komando Kapitalau Sambara yang bernama *Haribau*. Dari tradisi tidak diungkapkan pula latarbelakang pengiriman bantuan tersebut. Apakah Aru Palaka mengunjungi Sambara (Konawe) sesudah kemenangan atas pasukan Gowa di Buton (Januari 1667)? Ataukah sesudah pengamanan Tiworo (Maret 1667)? Yang jelas tradisi ini mengatakan bahwa di Ujung Pandang Haribau memberi kuasa atas *Bontoala* sehingga sekembalinya di Konawe dia digelar pula sebagai *Kapita Bontoala* (Bontoala)¹⁹⁾

Pada awal abad XIX (sebelum 1836) Asisten Residen Vosmaer berpangkalan di Teluk Kendari dalam rangka pengamanan atas gangguan-gangguan bajak-laut *Tobelo*. Pada waktu itu Konawe telah terpecah-belah dan Liwui sedang dalam pertumbuhan untuk menggantikannya. Pada saat itu Laiwui (Ranomeete) diperintah oleh Raja Putri (*Vorstin*) Maho yang kawin dengan La Sambawa (Raja) *Lapadaku* (*gebied van Tiworo*) anak Aru Bakung. Anak Maho, La Mangu naik takhta pada 1858. Pada tahun itu juga dia menandatangani Perjanjian Panjang dengan Belanda (13 April)²⁰⁾ Di samping La Mango bertandatangan pula:

- a. *Batuangan* sebagai *Sapati*
- b. Malaka, Ajun *Kapita*
- c. La Palewo sebagai *Ponggawa*.

Dari jenis jabatan pembesar-pembesar ini kelihatan bahwa La Mangu merupakan raja Kendari (Laiwui) yang telah lepas dari kesatuan Konawe yang saat itu masih mempunyai Sulemandara (Perdana Menteri) di daerah pedalaman (Pondidaha).

Perjanjian Panjang yang ditandatangani La Mangu pada 13 April 1858 merupakan Perjanjian Panjang (*Lang Contract*) yang

19) Abdul Hamid Hasan.

20) Dept van Binnenlandsch Bestuur, *Mededeelingen van Bestuur zaken/Serie A* Nomor 3, 1929, halaman: 646 (seterusnya disebut *Mededeelingen Serie A nomor 3*). *der Buiten gewesten*.

pertama ditandatangani oleh raja Sulawesi Selatan dan Tenggara. Bone menandatangani Lang Contract 13 April 1860 sedangkan Luwu pada 16 September 1861.

Pada tahun 1871 La Mangu meninggal dan digantikan oleh anaknya, Sao-Sao yang pada 15 Mei 1880 juga menandatangani perjanjian (*Verbond van Bevestiging*) dengan Belanda. Sao-Sao kemudian menandatangani Perjanjian Panjang 21 Desember 1885. Perjanjian ini pastilah seirama dengan perjanjian 1873 yang ditandatangani Sultan Shailihi dari Buton di mana isi pokoknya adalah pengakuan kerajaan sebagai wilayah Hindia-Belanda.

Perjanjian-perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh La Mangu dan Sao-Sao dengan Belanda hanya mengikat Laiwui (Ranomeeto-Kendari), karena wilayah lain dari bekas Konawe tidak mengakui mereka itu sebagai raja.

Sao-Sao pada awal abad XX berusaha menghubungi pemimpin-pemimpin bekas wilayah Konawe lainnya terutama *Sulemandara Saranani* di *Pondidaha* tetapi sampai sebegitu jauh ia tidak berhasil mempersatukan bekas wilayah Konawe menjadi Laiwui. Usaha Sao-Sao ini yang didukung Belanda, banyak mendapat bantuan dari *La Saamana H. Abdul Gani (Haji Taata)* dengan menjelajahi seluruh wilayah bekas Konawe.

Haji Taata dalam usahanya membantu Sao-Sao mengadakan persetujuan dengan Sulemandara dan Kepala-Kepala Wilayah bekas Kerajaan Konawe.²¹⁾ Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mempersatukan wilayah bekas Konawe di bawah Sao-Sao.

III. KERAJAAN MEKONGGA

1. Bentuk Pemerintahan

Raja Mekongga yang pertama adalah La Rupalangi, seorang manusia istimewa yang datang di Mekongga dengan cara istimewa pula. Tradisi menyebutnya sebagai *Tomamurung* atau *Sangia Ndudu*. Karena keluarbiasaannya dan jasanya dalam menyelamatkan rakyat dari gangguan *Konggaaha* (burung elang raksasa) yang makan manusia, maka ia dirajakan oleh tujuh orang Toono Motuo yaitu tujuh Kepala dari tujuh kampung yang merupakan wilayah awal Kerajaan Mekongga. Selanjutnya para Toono Motuo ini ber-

21) Abdul Hamid Hasan.

tindak sebagai Dewan Kerajaan. Jabatan raja yang turun-temurun dari ayah ke anak merupakan simbol persatuan dari tujuh wilayah Toono Motuo tersebut. Tiap-tiap Toono Motuo mengatur wilayahnya sendiri-sendiri menurut sejarah dan tradisinya masing-masing. Mereka mempunyai dewan-dewan tersendiri yang mengatur pemerintahan wilayahnya masing-masing. Personalia dari Dewan atau *Sara* Toono Motuo ini terdiri atas:

- a. *Toono Motuo* sebagai Kepala Wilayah
- b. *Pabitara*, yang merupakan *Puuno Sara* (*Pokok Sara* = adat) yang menangani soal adat-istiadat (pemerintahan dalam segala aspeknya).
- c. *Posudo*, menangani hal-hal yang menyangkut perlengkapan dan kebendaharaan.
- d. *Tamaasi/Tamalaki*, bertanggungjawab atas keamanan dan pertahanan.
- e. *O Tadu*, ahli ramal hari-hari baik/buruk bertalian dengan masalah keamanan dan peperangan.
- f. *Mbuokoi*, dukun
- g. *Mbuwai*, menangani upacara-upacara adat.
- h. *Mbu Sehe*, menyelesaikan semua sengketa (upacara perdamaian).
- i. *Tusa wuta*, mengurus dan mengatur hal-hal yang menyangkut pertanian.
- j. *Tolea*, menangani urusan-urusan perkawinan.

Keadaan ini berlangsung sampai sekitar pertengahan abad XVII.

Dalam hal perkembangan wilayah Kerajaan Mekongga maka struktur pemerintahan mengalami perkembangan pula. Maka diadakanlah jabatan-jabatan *Sara Wonua* yaitu Dewan Kabinet Kerajaan yang terdiri dari:

- a. *Kapita*, berfungsi sebagai Menteri Keamanan dan sekaligus merupakan wakil raja.
- b. *Sapati*, yang menangani pemerintahan (dalam dan luar negeri) dan kesejahteraan.
- c. *Pabitara*, mengurus masalah adat-istiadat (hukum).

Sara Owoseno Mekongga atau Dewan Agung Mekongga yang merupakan lembaga legislatif adalah gabungan dari *Sara Wonua* (Kabinet) dengan semua Kepala Wilayah bawahan. Raja Mekongga

tidak lagi bergelar *Mokole* karena beberapa wilayah bawahan di luar wilayah awal tersebut di atas bergelar *Mokole*. Raja Mekongga sejak pertengahan abad XVII bergelar *Bokeo* yang berarti buaya.

Tiap-tiap wilayah bawahan tetap mempunyai *Sara* (Dewan) nya masing-masing.

2. Wilayah dan tata Pemerintahan

Pada awal sejarahnya Kerajaan Mekongga hanya meliputi tujuh kampung di sekitar Kolaka sekarang yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang *Toono Motuo*. Perkembangan wilayah Mekongga tidak berlangsung melalui peperangan atau diplomasi politik tetapi melalui perkawinan. Dalam perkawinan orang Tolaki dikenal adanya *tiari* yaitu pemberian (hadiah) kepada pengantin dari pihak orang tua, sebagai saluran pembagian warisan.

Mokole Mekongga V Lamba-lambasa kawin dengan putri *Mokole Toburi (Moronene)* dan memperoleh *tiari* berupa wilayah di bagian selatan Mekongga. Anak *Lamba-lambasa* yaitu *Lombolombo (Makole VI)* mengambil permaisuri dari *Konawe* yaitu putri *Sabandara Latoma*. Akibat perkawinan ini adalah sebagian besar wilayah *Latoma (Tambo i tepuliano oleo)* dari *Konawe* diserahkan kepada Mekongga sebagai *tiari*. Wilayah ini adalah wilayah yang sekarang meliputi Kolaka Utara sampai batas Sungai *Konaweha* dan dua wilayah sebelah timur Kolaka yaitu *Mowewe* dan *Rate-Rate*. Pada saat itulah terbentuknya wilayah Mekongga yang sekarang terwujud sebagai wilayah Kabupaten Kolaka. Anak *Lombolombo* kemudian kawin pula di *Benua (Konawe)* dan kembali memperoleh *tiari*. *Lombolombo* yang mula-mula bergelar *Bokeo Mekongga* dan mengadakan *Sara Wonua* (Kabinet Kerajaan). Wilayah Mekongga dibagi atas tujuh wilayah bawahan:

- a. Wilayah Inti (tujuh *Toono Motuo*) yang diperintah langsung.
- b. Enam wilayah yang masing-masingnya diperintah oleh seorang *Mokole*, sebagai *Puu Tobu (Mbu Tobu)*.

Lombolombo sebagai *Bokeo I* digantikan oleh anaknya, *Teporambe* sebagai *Bokeo II* yang seterusnya disusul oleh anaknya pula *La Duma* dengan gelar *Sangia ni bandera* sebagai *Bokeo III*. Pada jaman pemerintahan *La Duma*, Kerajaan Mekongga mengalami jaman keemasannya.

Sesudah *La Duma* rupanya pengaruh Kerajaan *Luwu* makin

orang Luwu banyak datang menetap. Secara bertahap kekuasaan Luwu atas Mekongga terwujud. Dengan kata lain bahwa Mekongga mengakui kuasa politik Datu Luwu. Tidak dapat ditelusuri bagaimana awal dari pengaruh Luwu atas Mekongga. Tradisi setempat mengungkapkan bahwa:

- a. Raja Mekongga I La Rumpalangi adalah kerabat Raja Luwu
- b. La Duma diislamkan oleh utusan Raja Luwu.
- c. La Duma memberikan bantuan dalam perang Luwu menghadapi Soppeng dan berhasil merampas sebuah bendera yang berwarna merah putih.

Dari tradisi Moronene ¹⁹⁾ diungkapkan adanya orang Luwu membunuh Mokole Poleang (Raja Moronene) di Pomalaa pada sekitar awal abad 16. Oleh Ligtvoet dikatakan bahwa batas barat dari Poleang dan Rumbia (Moronene) adalah *gebied van Loewoe* (1823). ²⁰⁾ Di barat Poleang dan Rumbia adalah Mekongga. Dengan kata lain Mekongga adalah *gebied van Loewoe*

Dalam kerajaan Luwu dikenal adanya jabatan *Mincara Ngapa* yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah timur (teluk Bone) yang disebut *Panni Alau* (sayap timur) sebagai imbalan dari *Sanggaria Bajo* di sebelah barat (teluk Bone) sebagai *Panni Orai* (sayap barat). Menurut Ch. Pingak, *Mincara Ngapa* sebagai aparat Luwu di Mekongga diadakan sejak pemerintahan Mokole *Lamba-Lambasa* bapak dari Lombo-lombo pada kira-kira akhir abad XVI. *Mincara Ngapa* kemudian diubah dan diganti menjadi *Sulewatang* pada masa La Duma (cucu Lombo-lombo) pada kira-kira pertengahan abad XVII. ²¹⁾

Datu Luwu Andi Kambo (wanita) yang diangkat jadi raja Luwu pada akhir abad ke 19 menjabat sebagai *Mincara Ngapa*, ²²⁾ yang membawahi wilayah Tana lau (Mekongga). Mungkin jabatan ini bagi beliau merupakan gelar kehormatan sebagai putri mahkota. Yang jelas bahwa menjelang akhir abad ke 19 Mekongga termasuk dalam wilayah kerajaan Luwu dengan kekuasaan Bokeo-

19) Sdr. Rambe.

20) Ligtvoet, hal. 2.

21) Ch. Pingak, Mekongga (stensilan) hal 40, 42.

22) Keterangan Opu To Sinilele alm. pada penulis (1963) di Palopo.

Mekongga secara riil terbatas pada wilayah inti (wilayah awal).

3. Hubungan dengan Belanda

Sampai pada 1906 tidak ada berita tentang hubungan langsung antara Belanda dengan Mekongga. Hubungan Mekongga dengan Belanda, oleh Belanda dianggap tercakup dalam hubungannya dengan Luwu. Pada abad ke 19 Luwu dua kali menandatangani Perjanjian Panjang dengan Belanda:

- a. 16 September 1861 oleh Raja Luwu Abd. Karier To-barua
- b. 15 September 1887 oleh Datu Luwu Iskandar Opu Larompaong.²³⁾

Perjanjian-perjanjian ini seirama dengan perjanjian Buton-Belanda 1873, tetapi secara riil Belanda belum mencampuri pemerintahan dalam kerajaan Luwu. Dapat dipastikan bahwa kekuasaan Belanda tidak mencapai Mekongga sebelum 1906 karena Perjanjian Pendek ditandatangani oleh Datu Luwu We Kambo Daeng Risompa pada 19 September 1905.

B. SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Sampai pada akhir abad ke 19 kerajaan-kerajaan Sulawesi Tenggara merupakan kerajaan-kerajaan yang berdaulat penuh ke dalam. Perbatasan dari pihak Belanda hanya terbatas pada keharusan adanya persetujuan Belanda dalam pengangkatan raja baru jika terjadi penggantian raja. Dengan demikian sampai pada awal abad ke 20 di Sulawesi Tenggara belum ada suatu sekolah formal yang didirikan oleh Pemerintah, baik oleh Belanda maupun oleh Kerajaan. Pendidikan masih berlangsung secara tradisional dengan pengembangan yang timbul di pusat-pusat kerajaan dengan meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Di Buton sejak awal abad ke 18 telah ada semacam perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan khususnya pendidikan agama. Di sana diajarkan ilmu-ilmu agama. Membaca dan menulis huruf Arab, baik Arab Al Qur'an maupun Arab

23) Mededeelingen, Serie A No. 3 hal. 647

Melayu. Tulisan Melayu Arab dipakai untuk menulis bahasa Melayu dan bahasa Wolio (Buton). Pada jaman Sultan Muh. Idrus (1824 – 1851) bahasa Arab merupakan bahasa pengantar atau bahasa resmi khusus dalam lingkungan keraton Buton. Puncak dari hasil pendidikan ini kelihatan dalam diri Sultan Muh. Idrus sendiri dengan seorang pembantunya Kenepulu Bula yang dapat mengarang beberapa buku dalam bentuk puisi (*kabanti* = sejenis pantun) yang bernapaskan keagamaan, kepatriotikan, politik dan filsafat. Malah Sultan Muh. Idrus dapat mengarang dalam bahasa Arab di samping bahasa Buton dan Melayu. Kemampuan ini diperolehnya melalui pendidikan dalam keraton Buton. Pada saat itu dikenal seorang wanita yang bernama Wa Ode Samarati (Baluna Wasilomata) yang dapat disebut sebagai sasterawati karena kemampuannya menyusun karangan dengan judul *Kanturuna Molingkana* (Pelita = suluh bagi yang pergi) dalam bentuk puisi (*kabanti*) yang bernapaskan keagamaan. ²⁴⁾

Berita tradisi Konawe mengungkapkan bahwa Lakidente Mokole Konawe terakhir yang memerintah akhir abad ke 18 sebelum diangkat jadi Mokole (Raja) Konawe dia belajar agama Islam di Wawonii kemudian Tinanggea (Kendari Selatan). Ini menandakan bahwa kedua tempat dalam wilayah Konawe itu pada masa akhir abad ke 18 merupakan pusat-pusat pendidikan (pengajian) khususnya dalam bidang agama.

Patut untuk diingat bahwa pendidikan pada masa-masa sebelum abad ke 20 ini menyangkut kebutuhan berbagai ilmu. Termasuk di dalamnya ilmu kemasyarakatan, filsafat, politik, hukum, ekonomi, bahasa dan lain-lain. Jadi bukan sekedar membaca Al Qur'an (mengaji) dan sembahyang.

2. Seni-Budaya

Kehidupan seni budaya sampai pada akhir abad ke 19 dapat dikatakan merupakan lanjutan dari kehidupan seni budaya pada masa-masa sebelumnya. Tarian-tarian rakyat yang diadakan pada berbagai peristiwa yang diadakan menurut tradisi masing-masing tetap berlangsung seperti masa sebelumnya. Jika ada perkembangan terjadi bukanlah suatu kreasi tetapi adalah akibat dari perubahan situasi dan dari selera kelompok masyarakatnya. Penyebab utama dari perubahan situasi dan selera ini adalah

24) A.M. Zahari

telah meratanya dan demikian mendalamnya pengetahuan akan agama Islam.

Kesenian pada masa-masa itu bukan semata-mata sebagai hiburan tetapi yang pokok merupakan sarana ekspresi kelompok masyarakat dalam menghayati peristiwa tertentu yang diharuskan oleh tradisinya masing-masing. Penghayatan akan agama Islam yang membawa pengaruh besar akan kehidupan sosial tentunya membentuk pula akan situasi dan selera dalam menghayati seni budaya yang diwarisi secara tradisional.

Namun demikian di Buton timbul suatu pengembangan pesat dalam bidang seni sastra, yaitu munculnya sastra tulis. Seni sastra Kabanti (semacam pantun) yang sebelumnya digubah secara lisan menjelang pertengahan abad ke 19 telah digubah secara tertulis. Sastra Buton yang terbesar adalah Sultan Muh. Idrus (1824—1851) yang dapat menulis dalam tiga bahasa yaitu Wolio (Buton), Arab dan Melayu. Gubahan-gubahannya menjadi bahan bacaan dan pelajaran yang didengarkan di mana-mana dalam kerajaan Buton. Mungkin sejak jaman inilah dikenal alat musik baru di Buton (dan Muna) yaitu gambus. Kabanti dengan iringan gambus tinggal merupakan alat hiburan sekaligus pendidikan.

Untuk memperoleh sedikit gambaran tentang Kabanti gubahan Muh. Idrus, di bawah ini diturunkan beberapa bait yang dikutip dari buku kepunyaan Sdr. A.M. Zahari:

- 1) *Tazjikiri momanpodona* oleh Sultan Muh. Idrus.

”

*dunia sii mboresa sabantara
lanciringana si – mbau peniuntoa
dinua si – mboresa mofana
inda lagi iapaika antona
arata – atawa oma – masia
tea malingu nikmati inunca*

.....

Artinya:

dunia ini tempat tinggal sementara
misalnya tempat perhentian sejenak
dunia ini tempat tinggal tak kekal
tidak kekal segala isinya
harta benda maupun manusia

dan segala nikmat di dalamnya.

2)

*O rukununa lipu si – tu pata – ngu
saro ingkita i lipu Wolio si –
ise ba – na ogau kao bitara
maka si – mpo osaro tee tutura.*

Artinya:

rukun negeri itu ada empat
bagi kita di negeri Wolio (Buton) ini
mula adalah politik (pemerintahan) lalu peradilan
kemudian undang – undang dan peraturan.

3.

Dari *Ajonga inda malusa* (Pakaian yang tak pernah
luntur)
oleh Kenepulu Bula H. Abd. Rahman.

*maka o mia momatauna karona
tee matau asala kamiana
asada – da akakaro sara
ahengga kea kapolina karona
tuamosi – budina sabara mia
malinguaka mancuana morikana*

Artinya:

(Tetapi) orang yang mengenal dirinya
dan tahu asal – usulnya
tetap berdiri dengan sara
sesuai dengan kemampuan dirinya
demikian itu budi mereka
orang – orang tua yang terdahulu

3. Alam pikiran dan kepercayaan

Agama Islam masuk ke Sulawesi Tenggara (mula-mula di Buton) sebelum 1550 dan sejak awal abad ke 17 Islam merupakan sendi kerajaan Buton. Sejak itu kehidupan sosial, politik dan budaya tersusun berlandaskan ajaran Islam. Ibukota-ibukota

merupakan sentral pelajaran dan penyebaran Islam. Pada akhir abad ke 18 pulau Wawonii dan Tinanggea (Kendari Selatan) dan Patampanua (Kolaka Utara) merupakan pusat-pusat pengajaran (pendidikan) agama Islam.

Pemantapan Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan serta penyebarannya diawali dari istana, sebagaimana masuknya agama Islam juga diawali dari istana. Beberapa raja dikenal sebagai penyebar dakwah Islamiyah dan membangun mesjid-mesjid dalam kerajaannya. Beberapa Sutan Buton setelah lepas dari jabatannya malah diangkat sebagai Lakina Agama (Lakina = raja). Kealiman dalam soal ilmu agama menjadi syarat utama dalam pengangkatan raja dan pejabat-pejabat kerajaan. Sultan Muh. Idrus (1824 – 1851) malah menyusun banyak buku dalam bentuk puisi (Kabanti) yang berisikan ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Raja Muna *La Ode Saeto* yang memerintah pada awal abad ke 19 digelar *Soramasigi* karena jasanya dalam memperbaiki dan memperluas mesjid Kota Muna. Lakidente Mokole Konawe yang terakhir sebelum jadi raja memperdalam ilmu ke-Islamannya pada guru-guru agama di Wawonii dan Tinanggea. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan sampai akhir abad ke 19 merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang utama. Kealiman dalam ilmu keagamaan dalam segala aspek dan prospeknya menjadi idaman dari setiap keluarga. Dengan kata lain bahwa pengetahuan dalam ilmu agama Islam menentukan status sosial (dan politik) dari setiap orang.

Menjelang akhir abad ke 19 agama Islam dengan pusat pancaran dari istana telah dapat menjangkau sampai pelosok-pelosok Sulawesi Tenggara dengan pengertian bahwa makin jauh dari pusat makin lemah pula daya pancarnya.

Di samping istana telah muncul pula tempat-tempat lain yang merupakan pusat-pusat baru dalam proses Islamisasi. Perkembangan pusat baru karena usaha dari pendatang-pendatang dari luar khususnya dari Sulawesi Selatan yang beberapa diantaranya merupakan penganjur-pengajur Islam yang tangguh.

Pulau Wawonii dan Tinanggea di selat Tiworo banyak bersinggungan dengan pendatang-pendatang dari luar karena letaknya di jalur pelayaran Sulawesi Selatan – Maluku (Ternate). Patampanua di Kolaka Utara banyak didatangi oleh penempat-tenetap dari Sulawesi Selatan utamanya dari kerajaan Luwu.

Di tiga tempat inilah pemuda-pemuda pedalaman Sulawesi Tenggara daratan berdatangan untuk belajar.

Walaupun proses Islamisasi telah dapat menjangkau jauh ke pedalaman tetapi kehidupan tradisional di daerah tertentu masih tetap berlangsung sampai akhir abad ke 19. Keadaan ini terutama kelihatan pada daerah-daerah bawahan yang otonom di mana keluarga elitnya yaitu raja-raja setempat belum menjalkan syariat agama Islam. Dapat dikemukakan sebagai contoh adalah daerah Moronene (Poleang dan Rumbia). Kedua wilayah ini adalah wilayah Buton, tetapi masing-masingnya tetap mempunyai raja (Makole) yang berdaulat ke dalam 100% dengan kewajiban upeti tahunan pada Sultan Buton. Karena belum memeluk Islam maka seluruh rakyatnya tetap menganut kepercayaan nenek moyang mereka sebelumnya.

Di pedalaman Konawe dan Mekongga banyak rakyat yang telah mengaku Islam tetapi tata cara kehidupannya masih belum berubah. Upacara-upacara tradisional masih berlangsung sebagaimana biasa. Keadaan ini terjadi pula di pedalaman Muna, di mana kehidupan tradisional menurut kepercayaan nenek moyang mereka masih sebagaimana biasa. Di daerah-daerah demikian ini tanda ke-Islaman hanya berupa pengakuan saja dengan memantangkan babi dan perubahan-perubahan mantera-mantera animis menjadi mantera-mantera yang di dalamnya kelihatan adanya pengaruh Islam.

Namun demikian semua kerajaan-kerajaan Sulawesi Tenggara adalah kerajaan yang diperintah dengan landasan Islam sekurang-kurangnya Islam merupakan agama kerajaan dengan perwujudan maximal pada Buton yang dinyatakan sebagai suatu Sultanat atau Kesultanan. Dari kerajaan-kerajaan Sulawesi Tenggara hanya Buton yang rajanya bergelar Sultan di mana Muna, Konawe dan Mekongga tetap memakai gelar-gelar tradisionalnya.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Secara geografis Sulawesi Tenggara dapat dibagi atas dua wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Keadaan geografis ini tentunya mewarnai pula hidup penduduk, sehingga dalam garis besarnya dapat pula dibedakan dua pola hidup rakyat Sulawesi Tenggara pada masa itu. Daerah Sulawesi Tenggara

dihuni oleh orang Tolaki dan orang Moronene di ujung bagian barat daya (Poleang dan Rumbia), sedangkan kepulauan dihuni oleh beberapa suku. Yang terbesar adalah suku Muna dan sebagian pulau Buton, kemudian suku Buton yang sebenarnya terdiri dari beberapa suku-suku termasuk penduduk Wakatobi (p.p. Tukang Besi), sedangkan penduduk pulau Kabaena termasuk suku Moronene.

Penduduk bagian daratan Sulawesi Tenggara penduduknya hidup dari pertanian, sedangkan daerah kepulauan penduduknya hidup dari bertani, nelayan dan berdagang. Makanan pokok orang Tolaki adalah beras dan sagu. Padi yang ditanam adalah padi ladang. Bersawah belum dikenal. Sejak awal tumbuhnya kerajaan Mekongga (sekitar akhir abad ke 15) menurut tradisi telah dikenal oleh orang Tolaki jenis padi yang disebut *Pae Merare* (padi cepat) yang dipanen setelah berumur 100 hari. Orang Moronene termasuk penduduk pulau Kabaena hidup dengan makanan pokok beras. Cara menanam padi dari orang Tolaki dan Moronene adalah perladangan berpindah-pindah. Luas dan subur nya tanah dengan penduduk yang jarang memungkinkan sistem pertanian yang demikian gampang ini dengan hasil tetap tanpa mengurangi kandungan tanah secara drastis. Bekas ladang dapat diperladangi kembali sesudah 5 sampai 8 tahun. Perladangan dengan sistem demikian ini secara turun-temurun menimbulkan gerakan perpindahan penduduk. Pada saat-saat terakhir di mana sistem berpindah-pindah seakan-akan tidak mungkin lagi bertambahnya penduduk berakibat timbulnya daerah-daerah minus di pusat wilayah kediaman penduduk, yang sekarang ditandai dengan luasnya padang alang-alang, karena terlalu seringnya perladangan. Keuntungan bagi orang Tolaki kemudian karena adanya tumbuhan sagu yang juga merupakan makanan pokok di samping beras. Sampai sekarang ini beras ladang masih dihasilkan oleh orang Tolaki dan disebut beras daerah yang nasinya lembut dan berwarna merah.

Orang Muna dan Buton makanan pokoknya adalah ubi-ubian dan jagung. Jenis ubi yang paling banyak ditanam adalah *lame* Butung²⁵⁾, yang ubinya tunggal dan besar yang oleh orang Buton disebut *Uwi* dan oleh orang Muna *Mafu*. (Makanan dalam bahasa Muna adalah Fuma) Jenis ubi-ubian yang lain adalah

25) Ligtoet, hal. 4.

Ghoha (Muna) atau *Opa* (Buton). Tradisi Muna mengungkapkan bahwa jagung dikenal di sana sejak abad ke 16 melalui Ternate. Sejak itu jagung merupakan makanan pokok di samping ubi-ubian yang menggantikan kedudukan *Wute sau* yang sebelumnya dikenal pula sebagai makanan pokok. Ubi kayu jenis beracun juga merupakan makanan pokok di Buton dan Muna. Ubi kayu (*uwi kau* bhs. Buton) yang beracun ini diolah sedemikian rupa (direndam/dicuci) sehingga dapat langsung dimasak (dikukus ump) atautkah dijemur untuk pengawetan menjadi ubi kayu kering yang disebut *Kabu to*. Jenis ubi kayu yang tidak beracun dikenal di Buton/Muna sesudah abad ke 20 (jaman Belanda) dan disebut *uwi kau Ambo* (ubi kayu Ambon) atau (ubi kayu) *landibau*. *Landibau* berasal dari bahasa Belanda *Landbouw*. Makanan-makanan pokok beras, jagung, *uwi (mafu)* dan ubi kayu bervariasi tiap wilayah, jadi tidak meliputi seluruh kerajaan. Yang hampir merata dimakan oleh penduduk adalah jagung dan ubi kayu. Penghasilan wilayah mencerminkan pula jenis pajak (*weti*) yang dipikulkan kepada wilayah tersebut. Ada pajak (*weti*) yang berupa jagung, *kabuto* (ubi kayu), lano, padi/beras, hasil laut dan lain-lain. Penghasilan spesifik wilayah, di samping ada pula yang berupa uang dalam kesatuan *Boka*. 1 Boka Buton = Fl. 1,20, sedangkan 1 Boka Muna = Fl. 1,40.

Di sementara tempat di Buton dan Muna pada abad ke 19 juga ditanam padi. Kebutuhan beras untuk kepulauan (Buton dan Muna) rupanya untuk golongan elite dan para pendatang yang menetap di sana didatangkan dari Makassar (beras putih)²⁶⁾ dan dari Kendari dari Moramo didatangkan beras merah (dalam bentuk gabah²⁷⁾. Beras dari Moronene (Poleang, Rumbia, Kabarena) dan Lasalimu tidak mencukupi kebutuhan. Sampai pada akhir abad ke 19 cara pertanian (dan alat-alat yang dipergunakan) masih berlangsung secara tradisional dengan alat-alat yang sederhana. Peralatan besi telah dikenal penduduk sejak sebelum tumbuhnya kerajaan-kerajaan setempat. Semua kelompok suku mengenal pandai besi. Pandai besi ini membuat senjata-senjata dan alat-alat pertanian. Pengolahan hasil pertanian juga masih tradisional untuk konsumsi sendiri, walaupun sistem gabah untuk tujuan ekspor telah dikenal di Konawe (Laiwui). Pengerjaan ga-

26) *Ibid*, hal 9.

27) *Ibid*, hal 4.

bah yaitu merontokkan padi dari bulirnya dikerjakan dengan cara *mohuloi* yaitu menginjak-nginjak sambil dilumat dengan kedua telapak kaki. Cara ini sebelumnya hanya untuk keperluan penyediaan bibit.

Tanaman pangan yang lain adalah pisang, kelapa dan khusus di Buton (p. Siompu, p. Kadatua) juga ditanam jeruk (*lemo*) cina yang disebut *makolona Patani* (makolo = asam (ras), Patani yaitu Patani di Malaysia)²⁸⁾. Di Muna banyak ditanam kopi yang hasilnya dapat diperdagangkan ke luar. Walaupun kelapa banyak ditanam oleh penduduk tetapi kopra tidak dihasilkan oleh Sulawesi Tenggara pada abad ke 19. Penanaman kelapa merupakan tanaman penduduk di kampung-kampung dan kebun-kebun sebagai tanaman sambilan jadi tidak merupakan perkebunan-perkebunan khusus. Rupanya kopi demikian pula, tetapi cukup massal sehingga hasilnya dapat diperdagangkan ke luar.

Penduduk pantai utamanya di pulau-pulau hidup pula sebagai nelayan. Kehidupan nelayan ini dikerjakan di samping mengolah tanah untuk kebutuhan primernya. Nelayan di sini tidak saja menangkap ikan tetapi usahanya meliputi pengumpulan teripang, penangkapan penyu dan pencarian rumput laut (agar-agar) malah penyelaman mutfara dan hasil-hasil laut lainnya. Sebagian penduduk kepulauan juga melakukan perdagangan. Pejabat-pejabat kerajaan Buton banyak yang mempunyai perahu-perahu dagang yang dioperasikan untuk mengambil/membawa muatan dari dan ke Maluku. Pelayar-pelayar Buton ada yang berlayar sampai ke Singapura. Yang menonjol dalam pelayaran adalah orang Buton dari pulau-pulau Tukang Besi (Wakatobi). Perahu yang dipergunakan dalam pelayaran antar pulau adalah perahu jenis *sope* / lambo dengan tonage antara 3 sampai 5 ton. Dorongan utama dari penduduk pulau-pulau Wakatobi dalam pelayaran antar pulau ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok (makanan pokok) yang tidak dapat dihasilkan dari pulau-pulau mereka yang kecil dan berkarang itu. Perahu-perahu mereka amat memegang peranan atas pengangkutan muatan antar pulau di Maluku dan banyak pula yang berlayar ke Jawa, sampai-sampai ke Singapura. Kebutuhan pokok mereka terutama diambil dari Buton/Muna dan pantai selatan Konawe (Liwui) di selat Tiworo.

28) *Ibid*, hal.

Sampai pada akhir abad ke 19 Sulawesi Tenggara mengeluarkan hasil-hasil: teripang, penyu, agar-agar, kopi, lilin (lebah), mutiara, kulit dan tanduk kerbau, ekor ikan (yu), kapas/kapok, *karoro*, bahan-bahan pewarna dari akar *bingkuru* atau bangkudu (merah) dan kulit pohon *soga* (hitam), dan *balasari* (bahan kemenyan).²⁹⁾ Barang-barang yang didatangkan adalah: beras (khusus di Buton), candu, besi, barang pecah belah, dan kain-kain dan benang.

Jabatan *Syahbandar* (*Sabandara*) yang mengurus bea masuk pelabuhan dan sebagai penghubung dari para pedagang dari luar, dikenal dalam Kesultanan Buton sejak jaman VOC. Jabatan ini dikenal pula pada kerajaan Konawe walaupun fungsinya sejak pertengahan abad ke 17 berubah menjadi Kepala Wilayah. Di Muna fungsi Syahbandar dilakukan oleh Kepala Baratanya (Lohia dan Wasolangka). Salah satu sebab dari perselisihan Raja Muna dengan Lde Ngkada (Kapitalau Lohia) pada 1861 adalah masalah pembagian hasil bea pelabuhan Lohia. Pada abad ke 19 pelabuhan-pelabuhan Sulawesi Tenggara adalah Bau-Bau, Lohia, Wasolangka, Tiworo, Tinanggea, Moramo dan Kendari.

Dalam perdagangan uang Belanda menjadi alat tukar utama. Buton mempunyai alat tukar khusus yang terbuat dari seppenggal tenunan dan disebut *kampua* atau *bida*. *Kampua* ini diperbaharui tiap tahun yang hanya berlaku dalam kerajaan Buton dan rupanya menjadi alat tukar hanya bagi orang Buton tidak pada pedagang-pedagang dari luar. Empat puluh *kampua* bernilai 10 sen (*een nieuwe dubbeltjes*). Karena uang Belanda tidak merata dipunyai oleh penduduk maka alat tukar yang banyak dipakai di samping uang adalah garam dan gambir. Sepuluh cupak (tempurung) garam atau 20 potong gambir bernilai sama dengan 10 sen (*een nieuwe dubbeltjes*).³⁰⁾

Di samping pembuatan alat-alat besi juga dibuat perahu-perahu sendiri. Pulau Muna banyak menghasilkan kayu termasuk kayu jati yang rupanya pada waktu sampai akhir abad ke 19 diperdagangkan ke luar tetapi dipergunakan sendiri untuk kebutuhan pembuatan perahu dan rumah.

Kerajinan rumah adalah menenun kain sarung. Tenunan ini banyak dari kapas yang ditanam sendiri tetapi ada pula yang

29) *Ibid*, hal. 5 dan 6.

30) *Ibid*, hal. 10.

ditenun dari benang dari luar. Sarung Buton dan Muna mempunyai ciri tersendiri. Tenunan Buton pada abad ke 19 (mungkin sebelumnya) selalu menjadi pelengkap sebagai pengiring dari semua surat-surat Sultan Buton kepada pembesar Belanda di Makassar atau pada kerajaan-kerajaan sahabat. Bertenun pada orang Tolaki tidak sepesat di Buton. Orang Tolaki pada abad ke 19 masih mengolah kulit kayu sebagai pengganti kain. Kulit kayu ini diproses sedemikian rupa sehingga dikenal adanya *Kinawo* halus dan kasar. Proses ini termasuk pewarnaan.

Perairan Sulawesi Tenggara sejak dikenalnya perdagangan rempah-rempah (sebelum VOC) merupakan jalur pelayaran yang ramai. Ada tiga jalur yang lazim dilalui yaitu:

1. Jalur Makassar – (Selat) Tiworo – Wawonii – Bungku (Tombuku) – Banggai – Ternate, dengan kemungkinan singgah Selayar, Sinjai, Kabaena, Poleang/Rumbia, Tinanggea, Moramo Kendari.
2. Jalur Makassar – Bau-Bau – Lohia, (Muna) – Wanoii seterusnya Bungku, Banggai, Ternate.
3. Jalur Makassar – Bau-Bau – Wakatobi (p.p. Tukang Besi) – Buru – Ambon – Banda.

Jalur lain yang penting untuk sampai ke Bau-Bau dan seterusnya adalah Jawa – Flores – Bau-Bau dengan kemungkinan singgah di tempat-tempat sekitarnya. Pada jaman VOC kemudian Hindia Belanda jalur 2 dan 3 lebih banyak dipergunakan sedangkan pelayar-pelayar Bugis/Makassar lebih banyak menggunakan jalur 1 kadang-kadang jalur 3.

Sesudah kapal api dikenal dalam pelayaran di Indonesia, maka pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk membangun gudang arang batu di Sulawesi Tenggara untuk keperluan kapal-kapalnya. Ada dua tempat yang menjadi pertimbangan yaitu Kendari (Vosmaersbaai) dan Buton (Bau-Bau).³¹⁾ Akhirnya pilihan jatuh pada Bau-Bau. Pembangunan gudang arang di Bau-Bau selesai pada 1858, yang khusus untuk kapal-kapal Pemerintah dan angkatan perang Hindia Belanda. Kemudian yaitu sejak bulan Pebruari 1877 kapal-kapal dari *Nederlandsch Indische Stoomvaartmaatschappij* secara tetap sebulan sekali

31) *Ibid*, hal. 100.

menghubungkan Makassar dan Buton yang dengan sendirinya menjadikan Bau-Bau sebagai pintu utama Sulawesi Tenggara. Namun demikian pelayaran pantai dan antar pulau tetap ditangani pelayar-pelayar Buton dan juga Bugis. Pada saat itu orang-orang Bugis banyak menjadi penatap-penatap di Tiworo, Tinanggea, Kendari dan Patampanua (Kolaka Utara). Pendetang penatap ini rupanya tidak menjadi Kawula langsung dari pemerintah pemerintah tradisional setempat. Di Kendari (Vosmaersbaai) mereka mengangkat seorang pimpinan tersendiri yang menjelang akhir abad ke 19 dipegang oleh *Daeng Pawata* yaitu anak *Daeng Sirua* dengan *Putiri Daeng Lolo* putri dari *Arung Bakung*.³²⁾

Di Patampanua (Kolaka Utara) pendatang penatap Bugis Luwu malah dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Wilayah tradisional setempat. Kelompok pendatang – penatap ini memegang peranan penting dalam perdagangan pantai dan antar pulau, di samping penduduk setempat yang sejak mula memegang peranan dalam kegiatan pelayaran.

32) *Ibid*, hal. 22 (Silsilah Arung Bakung).

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SULAWESI TENGGARA DARI TAHUN ± 1900 – 1928

A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI DI SULAWESI TENGGARA

1. Masuknya Belanda

Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda tidak langsung memasuki wilayah Sulawesi Tenggara sebelum tahun 1906. Perjanjian-perjanjian panjang (Long Contract) sesudah pertengahan abad ke 19 yang ditandatangani oleh Sultan Buton (meliputi Muna) pada 1873, Raja Laiwui (wilayahnya sebagian dari bekas Konawe) pada tahun 1858 dan 1885 dan Datu Luwu (yang dianggap membawahi Mekongga) pada tahun 1861 dan 1887, walaupun berisi pengakuan bahwa wilayah-wilayahnya merupakan wilayah Hindia Belanda, tetapi nyatanya kerajaan-kerajaan itu masih berdaulat dalam mengurus pemerintahannya tanpa campur tangan dari Pemerintah Belanda. Perjanjian-perjanjian itu berfungsi sebagai ikatan *bondgenootshap* dengan Belanda sebagai saudara tua.

Sultan Muh. Shailihi yang menandatangani Perjanjian Buton – Belanda pada tahun 1873 digantikan oleh Muh. Umar yang memerintah pada 1885 – 1904. Pada saat itu Belanda hendak memaksakan penempatan aparat Pemerintahannya di Buton tetapi ditolak dengan tegas oleh Sultan Muh. Umar. Malah beliau mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dengan mendirikan pusat-pusat pertahanan (benteng) di beberapa tempat dalam kerajaannya.

Sultan Muh. Umar meninggal pada 1904. Sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya bahwa pengangkatan raja baru harus mendapat persetujuan dari Belanda, maka penggantikan Sultan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Belanda. Calon utama pengganti Umar adalah *La Ode Akhmat Maktubu* anak Sultan Shailihi dari putri raja Muna Oa Ode Bulai (golongan Kumbewaha), namun yang terpilih adalah *Muh. Asyikin* dengan gelar Sultan *Aidhil Rahim* (golongan Tapi-tapi). Penetapan raja baru ini harus mendapat persetujuan dari Belanda. Dalam keadaan inilah maka pada 2 April 1906 Residen Brug-

man datang di Buton dengan kapal *de Ruyter*. Setelah melalui proses perundingan antar pembesar-pembesar kerajaan Buton, La Ode Akhmad Maktubu dan *La Ode Ijo* Kapitalao Lohia di Muna yang waktu itu merupakan orang kuat di Muna secara terpisah, maka Sultan Buton yang baru Muh. Asyikin (1906 - 1911) menandatangani Perjanjian Panjang dengan Brugman dan menyetujui penempatan aparat pemerintahan Belanda di Buton pada 8 April 1906. Akhmad Maktubu kemudian diangkat sebagai Raja Muna. Penandatanganan perjanjian 1906 itu sebetulnya mendapat tantangan dari beberapa pejabat kerajaan Buton. Muh. Asyikin sendiri segan mengakuinya tetapi atas dorongan beberapa pembesarnya perjanjian itu jadi ditandatangani. Beberapa saat kemudian Sultan baru ini mengingkari perjanjian tersebut sehingga pada 26 April kembali Brugman berada di Bau-Bau dengan kekuatan tentara. Sultan terpaksa tunduk. Dengan demikian maka sejak 1906 di Buton ditempatkan tentara dan aparat-aparat pemerintahan Belanda yang mula-mula dipimpin oleh Kapten *J. van Hecht* dan *Munting Hapjuis*. Van Hecht diganti oleh Kapten *Walraven* pada 1907.

Beberapa pembesar kerajaan yang tidak hadir dan tidak mau menandatangani perjanjian 1906 kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Mereka itu adalah:

- a. Ani Abdullatif (Kenepulu) dengan putra-putranya: Muh. Hamidi (kemudian jadi Sultan) dan Muh. Falihi (kemudian jadi Sultan terakhir).
- b. Muh. Zuhri (Lakina Surawolio), adik Ani Abdullatif
- c. Abd. Hasan (Bonto Ogena Matanayeo) dengan putra-putranya: La Moke (kemudian Kepala Distrik), dan La Aidi (kemudian Bonto Ogena Sukanayeo).
- d. La Sahidu (Bonto Ogena Sukanayeo) dengan putranya: La Talombo (Bonto Baluwu).

Beberapa bulan kemudian mereka dikembalikan ke Buton (24 Desember 1907).

Untuk jelasnya di bawah ini dicantumkan Perjanjian 8 April 1906 yang dikutip dari naskah A.M. Zahari yang diterjemahkannya dari teks Bahasa wolio (Buton) ¹

1) A.M. Zahari, *Kumpulan Perjanjian Kerajaan Buton*. (Naskah)

- Pasal 1.** Sultan Buton dan orang-orang besarnya serta semua Menteri-menterinya berjanji akan patuh dan taat serta setia kepada Raja Belanda atau wakilnya;
- Pasal 2.** Kerajaan Buton beserta semua pulau-pulaunya dan lautnya masuk di dalam wilayah kekuasaan Gubernur-nemen Belanda;
- Pasal 3.** Segala sesuatunya sudah diputuskan dan diserahkan oleh Sultan Muh. Aidhil Rakhiyn bersama orang-orang besarnya serta Menteri-menterinya kepada Gubernur-nemen Belanda di mana Belanda telah menerima penyerahan Kerajaan Buton kepada Gubernur-nemen Belanda.
- Pasal 4.** a) tidak dibenarkan Kerajaan Buton diberikan kepada bangsa lain kecuali Belanda, baik dilakukan oleh Sultan atau oleh orang seorang lainnya;
b) tidak dibenarkan Sultan Buton atau orang-orang besarnya mengirim surat kepada bangsa lain;
- Pasal 5.** a) mengangkat dan melepaskan pegawai dari jabatan Sultan maupun jabatan bawahan harus disampaikan kepada Gubernur-nemen Belanda;
b) tempat penyimpanan alat kebesaran kesultanan (parintana Baluwu Peropa) ditentukan pada pejabat Sapati;
- Pasal 6.** Sultan dan orang-orang besarnya serta menteri-menterinya wajib mentaati perintah Gubernur-nemen Belanda atau wakilnya;
- Pasal 7.** Pembesar Belanda di Makassar atau orang-orang besarnya dapat membuat sesuatu ketentuan yang akan diperlakukan di dalam Kerajaan Buton;
- Pasal 8.** Sultan Buton dan orang-orang besarnya berjanji:
a) tidak akan mengadakan musyawarah dengan kerajaan lain yang berada di bawah kekuasaan Gubernur-nemen Belanda;
b) Gubernur-nemen Belanda ada sesuatu pekerjaan di dalam Kerajaan Buton seperti membuat benteng pertahanan dan lain-lain tidak dapat dirombak

kecuali Governemen Belanda sendiri yang melakukannya atau atas perintah Governemen Belanda;

Pasal 9. Sultan Buton dan orang-orang besarnya akan menyiarkan kepada rakyat supaya memakai bendera Belanda di laut maupun di darat tidak boleh sekali-kali memakai bendera yang lain kecuali Sultan Buton dapat memakai bendera kerajaannya tetapi harus bersama dengan bendera Belanda;

Pasal 10. Governemen Belanda atau wakilnya dapat menjual atau membeli sesuatu yang menguntungkan apabila meminta bantuan karena menemui kesukaran di dalam pekerjaannya itu wajib diberikan dan dipenuhi;

Pasal 11. a) apabila Governemen Belanda membuat benteng di dalam Kerajaan Buton, dapat pula menempatkan pada benteng itu orang-orang Belanda sebagai penjaganya dan atau di mana saja tempat dibangunnya benteng;

b) apabila di dalam benteng itu dibangun dengan rumahnya maka wajib diberi bantuan tenaga kerja yang mereka itu diberi upah oleh Governemen Belanda;

c) apabila sebab akibat daripada pembuatan benteng itu tidak mendatangkan keuntungan bagi Governemen Belanda maka segala kerugian menjadi tanggung jawab Governemen Belanda sendiri;

Pasal 12. Sultan Buton dan orang-orang besarnya berjanji:

a) bila Governemen Belanda mendapat suatu keuntungan atas usaha pekerjaannya di dalam kerajaan Buton maka Sultan dan anggota-anggotanya akan mendapat pembagian berupa pemberian dari Governemen Belanda;

b) Sultan Buton dan orang-orang besarnya tidak dibenarkan untuk membuat sesuatu di dalam kerajaannya kecuali ada izin dan setahu Governemen Belanda di Makassar atau wakilnya;

- c) Sultan Buton dan orang-orang besarnya wajib memberikan pas perahu atau pas jalan kepada setiap nakhoda yang berlayar;
- d) demikian pula terhadap kapal apabila meminta surat pas wajib diberikan;
- Pasal 13. a) Sultan Buton dan orang-orang besarnya tidak dibenarkan untuk memberikan keleluasaan kepada bangsa lain untuk berdiam di dalam kerajaannya, kecuali dengan izin Guvernemen Belanda;
- b) bangsa lain apabila datang berdagang di Buton diperkenankan tetapi kalau sudah sampai tiga bulan lamanya tinggal di pelabuhan Buton maka wajib diberitahukan hal itu kepada Guvernemen Belanda;
- Pasal 14. Guvernemen Belanda memberikan kekuasaan kepada mereka yang mencari benda peninggalan benda purbakala di dalam tanah (= kalamuia, bahasa Wolio) di dalam kerajaan Buton dan bila Guvernemen mendapat benda yang demikian maka Guvernemen Belanda akan mengadakan permufakatan dengan Sultan dan orang-orang besar kerajaan untuk mendapatkan permufakatan dan persesuaian tentang pembagian keuntungan menurut nilai dari benda yang didapat;
- Pasal 15. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya akan menetapkan bea serta bagian dari tanah yang mengandung sesuatu yang menguntungkan permufakatan atau persesuaian yang tidak mendatangkan kerugian bagi orang banyak;
- Pasal 16. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya tidak dibenarkan untuk menghitung-hitung bea seperti yang sudah-sudah dan mencari tahu dan menyelidiki pekerjaan yang dilakukan oleh Guvernemen Belanda di dalam kerajaan Buton;
- Pasal 17. Guvernemen Belanda berkuasa untuk menetapkan bea barang masuk ke luar dan apa yang ditetapkan wajib dipatuhi dan dilaksanakan:

- Pasal 18.** Governemen Belanda menghitung segala orang yang masuk pekerjaan masing-masing bangsa seperti yang ternyata pada pasal 19 yang berikut ini;
- Pasal 19.** Yang dimaksud rakyat Governemen Belanda yang akan melakukan pekerjaan di Buton yang disebutkan bangsa Eropa atau yang sesamanya bukan orang di tanah Makassar, harus memenuhi segala ketentuan dan segala perintah Governemen Belanda dan mereka itu masuk dan tunduk di bawah hukum kekuasaan Governemen Belanda;
- Pasal 20.** Semua orang penduduk asli yang bekerja bila ada pekerjaan karena membuat kesalahan dijatuhi hukuman oleh Governemen Belanda sendiri dengan tidak memandang tinggi rendahnya kedudukan orang itu;
- Pasal 21.** Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya bila ada rakyatnya yang mendapat kesalahan wajib memeriksa perkaranya untuk kemudian diadili menurut berat ringan perkara itu;
- Pasal 22.** a) Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya mematuhi dan mentaati ketentuan di dalam kontrak perjanjian ini karena kerajaannya telah diserahkan dan diperintah oleh Governemen Belanda;
- b) kepada orang-orang Cina yang tinggal di Buton telah menjadi besar karena Governemen Belanda yang karena itu pula apabila mereka meminta bantuan perlu diberikan seperti juga membantu Governemen Belanda;
- Pasal 23.** Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya wajib menghukum orang yang bekerja malas atau bekerja sedikit, tetapi orang Governemen Belanda tidak boleh;
- Pasal 24.** Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya wajib memelihara kebaikan jalan-jalan yang dibuat oleh Governemen Belanda baik jalan besar atau kecil bila ada terdapat orang yang merusakkannya, maka rakyat Buton dinyatakan bersalah di muka Governemen

Belanda;

- Pasal 25. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya tidak dibenarkan untuk menjual atau membeli budak atau menangkap dan menjualnya kepada orang lain dan supaya ketentuan ini disebar luaskan kepada rakyat;
- Pasal 26. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya menetapkan baik di laut maupun di darat atau di kali untuk menumpaskan perampok-perampok di mana saja diketahui adanya di dalam Kerajaan Buton wajib dicari dan ditangkapnya;
- Pasal 27. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya wajib memberikan bantuan kepada kapal dan perahu yang mendapat kecelakaan di dalam wilayah perairan kerajaannya terhadap orang-orang dan barang-barang dari yang bersangkutan dan wajib dijamin keselamatannya;
- Pasal 28. Segala sesuatu seperti pembelian atau penjualan senjata tidak diperkenankan lagi oleh Governemen Belanda baik di darat maupun di laut;
- Pasal 29. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya sudah mengakui dan telah disampaikan oleh Governemen Belanda bahwa segala perjanjian yang lama yang sudah sudah yang dibicarakan dahulu bila tidak sama dengan perjanjian ini dinyatakan batal dan perjanjian ini sudah dimufakati dan masing-masing mengangkat sumpah di muka Residen Brugman.

La Ode Asyikin digantikan oleh Muh. Husain sebagai Sultan Buton dan dia ini menandatangani *Korte verklaring* pada 30 Agustus 1912. *Korte verklaring* berisikan pengakuan seorang raja bahwa negerinya adalah bagian dari Hindia Belanda dan sebagai jajahan Raja Belanda dan Gubernur Hindia Belanda.

.... , "uit wiens handen ik het bestuur over het
.... *landschap aanvaard*" ²⁾

La Ode Akhmad Maktubu yang sebenarnya calon kuat

2) Mededeelingen, Serie A No. 3, hal. 531.

untuk jabatan Sultan Buton diangkat sebagai raja Muna setelah orang kuat Muna La Ode Ijo menyetujui dalam pertemuan dengan Residen Brugman di Bau-Bau.

Sebenarnya pada saat itu para bangsawan Muna tidak menyetujui kedatangan Belanda di sana. Pengambilan La Ode Ijo (cucu La Ode Ngkada, Kantolalo) dari Lohia ke Bau-Bau berhasil dengan tipu muslihat Belanda.

Memang saat itu kedudukan Raja Muna sedang lowong sejak wafatnya Raja Muna La Ode Kaili (1872 – 1899).

Dewan Kerajaan tidak berhasil memilih seorang raja baru karena para bangsawan yang masing-masingnya mempunyai pengikut dan senjata termasuk meriam-meriam saling bersaing, sampai kadang-kadang hampir meletuskan pertempuran terbuka. Keadaan ini dipergunakan baik-baik oleh Belanda.

Di sini kelihatan taktik licik dari Belanda. La Ode Akhmad Maktubu yang merupakan calon kuat untuk jabatan Sultan Buton ditempatkan di Muna di mana dia secara pribadi tidak punya pengaruh kuat, sedangkan jika jadi Sultan Buton malah dapat merepotkan Belanda. Sistem elite Buton juga diperalat Belanda yaitu sistem tiga aliran bangsawan (*Kamboru-mboru ta lu palena*) di mana La Ode Akhmad Maktubu dari aliran *Kumbewaha* sedang La Ode Asyikin dari Tapi-tapi. Kedudukan Asyikin terancam jika tidak menandatangani perjanjian dengan Belanda dan pasti golongan lain akan muncul sebagai Sultan. La Ode Akhmad datang di Muna bersama kesatuan tentara Belanda yang dipimpin oleh Let. Inf. Paliack – 1907.

Beberapa bangsawan Muna merencanakan untuk mengadakan perlawanan, malah juga La Ode Ijo (Kapitalao Lohia). Kawan-kawan La Ode Ijo dalam merencanakan perlawanan itu adalah:

- a. Laode Dundu (Aro Kasaka)
- b. Laode Abd. Rasul (Aro Mantobua)
- c. Laode Agu (Kino Tobe)
- d. Laode Tumada (Aro Labora)
- e. Laode Muhama (Kapitalao Marobe)
- f. Kapitalao Laimpi. ³⁾

Atas nasehat *Bonto Bolano* (Perdana Menteri) La Nii tentang

3) Muna.

sia-sianya perlawanan yang direncanakan itu di samping taktik Belanda yang berhasil memecahkan kelompok bangsawan ini dengan berhasilnya membujuk La Ode Ijo, perlawanan mereka gagal sama sekali. Muna tidak pernah menandatangani suatu perjanjian dengan Belanda. Perjanjian Asyikin – Brugman (1906) juga meliputi Muna, karena bagi Belanda Muna adalah wilayah Buton. Dengan kata lain bahwa raja Muna bebas mengurus negerinya adalah tunduk pada Sultan Buton. Perjanjian-perjanjian dengan Buton juga mengikat Muna.

Ranomeeto sejak awal abad ke 19 telah menyatakan diri sebagai suatu kerajaan yang berdaulat dengan nama Liwui dan mengadakan hubungan luar antaranya dengan Belanda (Lang Contract 1858). Pada 16 April 1906 Sao-Sao Raja Laiwui (1871 – 1928) menandatangani *Lang Contract* yang juga pernah dilakukannya pada 1885.

Sejak itu maka di Kendari ditempatkanlah seorang *Gezaghebber*. Namun demikian kekuasaan Belanda belum dapat mencapai daerah-daerah di luar kekuasaan Sao-Sao (Raja Lawui). Pemimpin-pemimpin wilayah bekas Konawe di luar Ranomeeto (Lawui) tetap tidak mengakui Sao-Sao sebagai raja mereka yang menentang kedatangan Belanda ke wilayahnya. Mereka menyadari bahwa kedatangan Belanda merupakan ancaman fatal bagi pengaruh politik mereka dan akan merusak tata kehidupan tradisional mereka secara turun-temurun. Di setiap tempat yang didatangi Belanda pastilah terjadi perlawanan-perlawanan sengit.

- a. Di Unaaha (bekas ibu kota Konawe) Watukila (*Peng-gawa Tongauna*), Sumuale Sulewata Wawotobi), Wulumohito (*Puutobu Tuoi*) mengorganisasi kekuatan rakyat untuk menghadapi Belanda.
- b. Lapotendo menghadang ekspedisi *Controleur Hekker* pada 1907 tetapi gagal yang kemudian menyerang ekspedisi *Kapten Helleks* di Palarahi (Wawotobi) pada 1908.
- c. Ekspedisi *Controleur van Eys* dan Kapten Helleks diserang oleh *Lapadi* di Windo 1908. Perlawanan *Lapadi* berlangsung sampai 1910. Ia ditangkap di Ngapamandati, tetapi dapat meloloskan diri dari tahanan. Dalam pasukan *Lapadi* dikenal seorang wanita yang

berani yaitu *Aliyna*.

- d. Di Tongauna seorang wanita bernama *Weribundu* dengan teman-temannya (pria) mempersiapkan pula perlawanan.
- e. Matasala membunuh pionir Belanda (Han Po Seng) Lahlutu (Pudai) dan di Baito Polonui memimpin perlawanan.
- f. Pertempuran-pertempuran terjadi di Bunggu Osu, Wawotobi dan Tongauna pada 1910. Lamboasa gugur di Bunggu Osu dan mayatnya ditanam terbalik oleh Belanda di Ngapa Walanda (Palarahi) yang merupakan basis Belanda di pedalaman.
- g. Perlawanan di pusat bekas kerajaan Konawe (Tongauna, Unaaha, Wawotobi, Puday) dapat dipatahkan pada 1912 dengan mengasingkan pimpinan-pimpinan perlawanan yang dapat ditangkap. Pembuangan ini dilaksanakan oleh *Controleur de Treffers*. Mereka yang dibuang itu antara lain adalah:
 1. Watukila (Ponggawa Tongauna) ke Makassar.
 2. Sumualo (Sulewata Wawotobi) ke Makassar.
 3. Matasala (dan kawan-kawannya) ke Sawahlunto.
- h. Di Konawe Selatan juga terjadi perlawanan-perlawanan. Pemimpin-pemimpinnya adalah: Lamangga (1911), Abdullah (1914 - 1915). Beberapa di antara mereka dan anggota pasukannya dibuang ke Payakumbuh dan Nusakambangan. ⁴⁾

"Penaklukan" (bekas) Konawe selesai seluruhnya pada 1916. Pada 1917 di Kendari diadakanlah pertemuan antara Belanda dan Sao-Sao bersama pembesar-pembesar kerajaannya dan beberapa bangsawan Konawe lainnya yang menghasilkan suatu perjanjian yang menjadikan bekas Konawe (dengan nama Laiwui) merupakan bagian dari Hindia Belanda (*Korte verklaring* 30 Agustus 1917).

Setahun kemudian Sao-Sao dilantik sebagai raja Laiwui

4) Perw. Dep. P dan K Sultra, *Monografi Daerah Sulawesi Tenggara 1974 - 1975*, hal. 34, 35.

(meliputi seluruh bekas Konawe) dengan gelar *Sangia Laiwui*, walaupun beberapa bangsawan Konawe menolaknya, malah sampai timbul perlawanan-perlawanan antaranya oleh *Uluwulu* di Motaha. Dengan dukungan Belanda kekuasaan Sao-Sao atas bekas Konawe menjadi mantap.

Datu Luwu yang juga membawahi Mekongga ditaklukkan Belanda pada 1905 dan terpaksa menandatangani perjanjian takluk pada Belanda (*Korte verklaring*, 19 September 1905). Mekongga didatangi Belanda pada 1906. *Bokeo I Bio* (Bokeo Bola) dengan seorang pembantunya *Mambulo* meninggalkan ibu kota kerajaannya dan mempersiapkan perlawanan di pedalaman. Kemudian Nambulo dapat terbujuk oleh Belanda dan diangkat menjadi *Mokole di Rate-Rate*. Seterusnya *Latambaga* kemenakan Bokeo Bula diangkat oleh Belanda sebagai Bokeo (Raja) Mekongga (1907). Perlawanan rakyat timbul di beberapa tempat dipimpin oleh *Kapita Pombili*.

Di bagian utara (Patampanua) timbul perlawanan-perlawanan sengit terhadap Belanda yang dipimpin oleh *H. Hasan* dan *Tejabi*. Daerah perlawanan H. Hasan meliputi Luwu, Wajo dan Mekongga. Pusat perlawanan mereka adalah Lasusua, Wawo dan benteng gunung Tojabi (Kolaka Utara). Dalam suatu pertempuran di Wawo pasukan H. Hasan dan Tojabi dapat menewaskan 200 orang pasukan Belanda. 5) Di Lasusua dapat ditewaskan 14 orang Belanda. Pemimpin-pemimpin perlawanan yang lain di Konawe Utara adalah: *To Indera*, *La Tollong* dan *La Kampacu*. Pusat perlawanan mereka adalah benteng gunung To Jabi. H. Hasan dapat ditangkap Belanda dan meninggal dalam penjara Palopo pada 1914. To Jabi sampai kedatangan Jepang tidak pernah tertangkap oleh Belanda. Hal ini menggambarkan bahwa Kolaka Utara tidak pernah seluruhnya dikuasai oleh Belanda. Daerah Moronene (Poleang dan Rumbia) yang merupakan daerah pengaruh kesultanan Buton dimasuki Belanda pada 1910 (ekspedisi Kapten de Jong). Mokole Poleang bersama pengikut-pengikutnya menentang kedatangan Belanda di daerahnya. Dalam penyerangan ke Toburi (Ibu kota Poleang) Belanda dapat dipukul mundur. Kemudian Belanda mengajak Mokole untuk berunding di suatu tempat di luar ibu kota. Dalam suatu jamuan

5) Sanusi Og. Mattata *Luwu dalam revolusi*, hal. 86.

makan Mokole Polea (ng) *Sangia Dowo* diracun oleh Belanda dan menemui ajalnya. Walaupun Sangia Dowo telah gugur pengikut-pengikutnya tetap mengadakan perlawanan di bawah pimpinan *Mbohogo* sampai 1912 pada waktu ia dan pengikut-pengikutnya ditangkap oleh Belanda. *Mbohogo* dibuang ke Nuskambangan kemudian dihukum gantung. Temannya I Ule dihukum gantung di Bau-Bau.

2. Pemerintahan Belanda

Setelah Belanda berhasil membuat raja-raja Sulawesi Tenggara tunduk kepadanya, maka Belanda berusaha mengamankan seluruh wilayah golongan-golongan bangsawan atas kepala-kepala wilayah setempat yang menunjukkan sikap menentang. Di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam usaha pasifikasi, Belanda membangun bivak-bivak yang merupakan pangkalan-pangkalan tentara Belanda dalam menumpas perlawanan-perlawanan yang mungkin timbul. Sampai pada 1910 kerajaan Buton, Muna dan Mekongga telah dapat diamankan dan dikuasai sepenuhnya, sedangkan Laiwui berlanjut sampai pada 1917. Hal ini disebabkan karena sebelumnya kerajaan ini terbagi atas wilayah-wilayah bekas kerajaan Konawe yang masing-masingnya mengurus dirinya sendiri. Belanda memilih Ranomeeto (Laiwui) untuk memerintah seluruh bekas Konawe.

Dengan kata lain bahwa Belanda memantapkan Laiwui atas seluruh bekas Konawe sebagai politik untuk berkuasa di wilayah itu. Dan melalui Raja (Sangia) Laiwui yang didukungnya Belanda mengatur kuasa pemerintahannya. Di tiap-tiap kerajaan ditempatkan pejabat-pejabat militer Belanda. Di Buton dan Laiwui ditempatkan seorang Kapten sedangkan Muna dan Mekongga ditempatkan masing-masing seorang Letnan. Setelah Belanda merasa aman maka di tiap-tiap daerah ditempatkan pejabat-pejabat sipil (*Controleur*) walaupun kedudukan pasukan tetap dipertahankan untuk menjaga timbulnya gangguan-gangguan keamanan.

Setelah Belanda menguasai keadaan maka diambillah langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan senjata api yang dipunyai penduduk.
- b. Larangan perdagangan budak.
- c. Pembuatan jalanan ke pedalaman dengan tujuan utama

memudahkan patroli-patroli jika diperlukan. Pembuatan jalan ini disertai dengan kewajiban rakyat untuk bekerja selama 42 hari dalam setahun (1908).

- d. Pejabat-pejabat kerajaan digaji oleh Pemerintah (Belanda) yang disusul dengan pengurangan fungsionaris-fungsionaris kerajaan. Jabatan-jabatan yang menyangkut pertahanan kerajaan dan ekonomi (umpamanya Kapitalao dan Sabandara di Buton) dihapuskan.
- e. Mendirikan "sekolah anak Bumi Putra" di Bau-Bau (Buton) 1908, di Raha (Muna) 1910, Kendari 1916, di Kolaka baru pada 1918 dibuka Landschap school ⁶⁾
- f. Pembagian wilayah kerajaan.
Wilayah tradisional dari tiap-tiap kerajaan diberi bentuk baru atau di ubah sama sekali strukturnya maupun wilayahnya. Wilayah baru ini disebut distrik yang dikepalai oleh seorang Kepala Distrik sebagai pegawai yang digaji oleh pemerintah Belanda. Gaji tiap Kepala Distrik tidak sama tetapi bervariasi antara Rp. 30,— sampai Rp. 60,— sesuai dengan luas wilayahnya dan banyaknya penduduk (wajib pajak) yang diperintahkannya. ⁷⁾

Pembagian wilayah lengkapnya sebagai berikut:

a. Kerajaan Buton (1913)

- 1) Distrik Tiworo
- 2) Distrik Gu
- 3) Distrik Mawasangka
- 4) Distrik Kalingsusu
- 5) Distrik Kaledupa
- 6) Distrik Binongko
- 7) Distrik Kabaena
- 8) Distrik Tomia
- 9) Distrik Wanci
- 10) Distrik Poleang
- 11) Distrik Kapontori
- 12) Distrik Rumbia

6) Ch. Pingak, Dokumenta Kolaka (1963), hal. 37.

7) Memori Kapten de Jong, 10 Mei 1916.

- 13) Distrik Pasarwajo
- 14) Distrik lasalimu
- 15) Distrik Bolio (Wolio)
- 16) Distrik Bungi
- 17) Distrik Wakarumba
- 18) Distrik Batauga
- 19) Distrik Sampolawa

b. Kerajaan Muna (1913)

- 1) Distrik Katobu
- 2) Distrik Lawa
- 3) Distrik Kabawo
- 4) Distrik Tongkuno

c. Kerajaan Laiwui(1918)

1) Distrik Ranomeeto dibagi atas 5 Onderdistrik:

- a) Konda
- b) Abeli
- c) Kandari
- d) Sampara
- e) Wawonii

2) Distrik Konawe dibagi atas 7 Onderdistrik:

- a) Pondidaha
- b) Wawotobi
- c) Tongauna
- d) Uepay
- e) Lambuya
- f) Abuki
- g) Latoma

3) Distrik Lasolo, terdiri dari 4 Onderdistrik:

- a) Tinobu
- b) Wiwirano
- c) Lasolo
- d) Asera

4) Distrik Andoolo, terdiri dari 3 Onderdistrik:

- a) Palangga
- b) LaEya
- c) Kolono

d. *Mekongga* (1907) ----- (Tahun 1933 = 3 Onderdistrik)

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) Distrik Kolaka | 1) Kolaka |
| 2) Distrik Singgere | 2) Solewatu |
| 3) Distrik Lapai | 3) Patampanua |
| 4) Distrik Mambulu | ----- |
| 5) Distrik Tawanga | |
| 6) Distrik Konaweha | |
| 7) Distrik Kondoeha | |

Tiap-tiap distrik (atau Onderdistrik) terbagi atas kampung-kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang sebelumnya tidak dikenal dalam jabatan-jabatan tradisional. *Toono Motuo* (Konawe, Mekongga) yang sebelumnya mempunyai kedudukan khusus dalam pandangan tradisional sekarang diubah menjadi kepala kampung. Demikian pula *Mieno/Kamokula/Kino* di Muna serta *Bonto/Bobato* (Lakina) di Buton. Kedudukan tradisional mereka hilang sama sekali. Malah kemudian pengangkatan Kepala Distrik dan Kepala Kampung tidak sesuai lagi dengan tata cara tradisional dan kurang memperhitungkan elite tradisional setempat, walaupun tidak dilupakan sama sekali dengan perhitungan-perhitungan tertentu utamanya dalam soal keamanan setempat.

Dalam perubahan struktur pemerintahan yang dibuat Belanda sampai eselon terbawah ini nyata sekali tujuannya adalah untuk menghancurkan sama sekali (secara bertahap) sendiri-sendiri dari masyarakat tradisional setempat yang telah berlangsung beberapa abad turun-temurun. Namun demikian elite teratas dari kerajaan tetap dipeliharanya tetapi dengan tujuan memeralat. Belanda memerintah melalui raja (sisa tradisional) atas struktur baru yang tidak tradisional. Dengan sendirinya sendiri kekuasaan raja rapuh sekali dan kemudian nyata bahwa dia hanya merupakan simbol saja. Yang berkuasa sebenarnya adalah Belanda.

Kerajaan Buton (dan Muna) dan Laiwui dalam struktur Pemerintahan Belanda digabung menjadi *Afdeling Buton dan Lawui* dan dibagi atas 3 *Onderafdeling* yaitu *Onderafdeling Buton*, *Onderafdeling Muna* dan *Onderafdeling Kendari* (bukan Laiwui) Sebelumnya wilayah-wilayah ini tergabung dalam *Afdeling Sulawesi Timur (Bestuurafdeling van Oost Celebes)* yang wilayahnya meliputi pantai timur Sulawesi termasuk Luwuk – Banggai.

Sampai 1928 Laiwui masih di bawah pemerintahan militer Belanda. 8) Demikian pula Muna dan Kolaka. Dalam pembagian Onderafdeling ini kelihatan adanya suatu keunikan yaitu Onderafdeling Muna wilayahnya lebih luas dari Kerajaan Muna. Kerajaan Muna terbagi atas 4 Distrik tetapi Onderafdeling Muna terdiri dari 7 Distrik yaitu Distrik Kerajaan Muna ditambah Tiworo, Wakarumba dan Kalingsusu dari Kerajaan Buton. Pada 1906 pada mula Belanda datang di Buton, disepakati pula tentang pengangkatan seorang raja Muna yaitu Laode Akhmad yang sebelumnya juga merupakan calon kuat untuk jabatan Sultan Buton. Laode Akhmad meninggal pada 1914 dan digantikan oleh anaknya *La Ode Safiuddin* sebagai raja Muna, yang kemudian pada 1918 diangkat pula sebagai Sultan Buton (jabatan rangkap) Dalam Pernyataan Pendek (*Korte verklaring*) yang ditandatangani oleh Sultan Buton Safiuddin pada 1922, kerajaan Muna tidak disebut walaupun ia merangkap sebagai raja Muna. Bagi Belanda kerajaan Muna adalah termasuk *Zelfbestuur* Buton. Sultan Safiuddin meninggal pada 1924 *Laode Rere* diangkat sebagai raja Muna tetapi tidak menerima Muna sebagai wilayah kesultanan Buton sehingga ia dipecat dari jabatannya (1927). Sebagai gantinya oleh Sultan Buton dan Belanda diangkat seorang pegawai Belanda orang Manado sebagai pelaksana Raja Muna (1927 — 1929) yaitu Warouw.

Kejadian di Mekongga (Kolaka) lebih unik lagi. Sebelum Belanda memerintah di sana Bokeo Mekongga merupakan raja yang berkuasa dengan pembantu-pembantunya didampingi *Sulewatang Ngapa* sebagai aparat pemerintahan kerajaan Luwu. Mekongga adalah wilayah pengaruh kerajaan Luwu (Sulawesi Selatan). Setelah Belanda membentuk Distrik pejabat kerajaan yang tidak dihapus hanyalah Bokeo (Raja) dan Kapita tetapi keduanya dijadikan Kepala Distrik. Di pucuk pemerintahan adalah Kontrolur (Gezaghebber) dari Onderafdeling Kolaka (termasuk Afdeling Luwu dan daerah takluknya) didampingi Sulewatang sebagai aparat kerajaan Luwu di sana. Sejak itu nama Mekongga hilang sebagai istilah politik (pemerintahan) dan digantikan oleh Kolaka.

Dengan demikian maka dalam sistim pemerintahan Be-

8) Kongoasa.

landa hanya dikenal dua daerah Pemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*) di Sulawesi Tenggara yaitu Kesultanan Buton (termasuk Muna) dan Kerajaan Laiwui sedangkan Mekongga (Kolaka) merupakan bagian dari *Zelfbestuur* Luwu (Sulawesi Selatan).

Belanda mulai menjalankan pajak pada 1908 di Sulawesi Tenggara (Buton), setelah pencatatan jiwa diadakan sebelumnya dengan memberikan kartu penduduk (rumah tangga). Pajak ini berupa uang yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak tiap tahun dan besarnya paling kurang fl. 2,—⁹⁾ Pajak ini disebut *Sima Assappareng atuwang* (bhs. Bugis) yaitu pajak diri atau pajak kepala (*sima uhu*, bhs. Bugis). Jenis pajak ini tidak dikenal dalam pemerintahan tradisional (kerajaan). Pajak tradisional yang di Buton dikenal sebagai *weti* merupakan pajak wilayah (bukan perorangan) yang umumnya terdiri dari hasil bumi (pertanian). *Weti* yang di Buton malah tidak dikenal semacamnya pada kerajaan-kerajaan lain yang hanya mengenal *antaran-antaran* yang teradat dan tidak periodik.

Ditambah dengan kewajiban kerja (rodi) pajak ini amat berat dirasakan oleh rakyat. Pajak yang minimum fl. 2.— itu amat menekan rakyat jika dibandingkan dengan harga dari 250 biji jagung hanya fl. 0,10 (sepuluh sen). Untuk membayar pajak ini dibutuhkan sekitar 5.000 biji jagung kira-kira sepertiga dari hasil kebun yang bersangkutan dalam setahun (2 X musim tanam).¹⁰⁾ Beratnya pajak ini memancing kemarahan rakyat sehingga dimana-mana timbul keresahan malah kekerasan dan pemberontakan.

Pada 1914 Kepala Distrik Tiworo (Buton) *Araaeta* mati dibunuh rakyatnya karena dianggap amat kejam dalam penagihan pajak. Demikian pula Kepala Distrik Pasarwajo (Buton) *La Ode Sambira* juga terbunuh karena pajak. Pemimpin dalam peristiwa La Ode Sambira ini adalah *Mantalagi* dengan pengikut beberapa ratus banyaknya. Dalam peristiwa ini tertangkap sekitar 300 orang. Terkenal pula pemberontakan *La Ode Boha* di Waruruma (Buton) dengan pengikut-pengikutnya. Peristiwa ini terjadi sebelum pembunuhan Kepala Distrik Tiworo

9) Muna (Informasi dari Muna diterima oleh Peneliti melalui informan kelompok).

10) Muna.

dan Pasarwajo. La Ode Boha mempunyai banyak pengikut, yang terkenal di antaranya adalah *La Ode Amane* (Yarona Lambelu), *La Ode Sijaai* dan *Mazai*. La Ode Sijaai gugur dalam perlawanannya sedangkan La Ode Boha tertangkap dan dibuang ke Jawa. Di Kaledupa (p.p. Tukang Besi) seorang pegawai Belanda bernama Rumagi mati ditikam penduduk karena tindakan-tindakannya (1914).

Peristiwa-peristiwa di atas sebenarnya didasari atas ketidaksenangan diperintah oleh kafir (Belanda) walau pun yang menjadi sebab khusus adalah beratnya pajak dan kejamnya para penagih pajak. Beberapa bangsawan malah pembesar kerajaan turut dibelakang peristiwa-peristiwa ini. Di Muna beberapa bangsawan menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak dan berusaha mengorganisir pemberontakan, di antaranya *Laode Pagora* dan *Laode Pulu*. *Laode Pulu* malah tertembak oleh Belanda. ¹¹⁾

Pelaksanaan pajak betul-betul dianggap oleh rakyat sebagai tindakan yang melampaui batas dari Belanda. Di Mekongga dan Liwui (Kolaka—Kendari) banyak rakyat yang menyingkir ke gunung-gunung berladang di tempat-tempat terpencil karena kengeriannya atas pajak. Pajak memperbesar sikap antipati rakyat terhadap Belanda.

Sistim pemerintahan Belanda yang mengubah struktur bawahan dari setiap kerajaan merupakan pukulan keras terhadap sendi kemasyarakatan tradisional. Distrik dan Kepala Kampung baik struktur maupun hubungan kerjanya amat berbeda dari yang dikenal sebelumnya. Jabatan-jabatan bawahan kerajaan (tradisional) mengenal elite masing-masing, di mana dalam sistem Belanda, pejabat-pejabat ini diangkat oleh Belanda dan diberi gaji pula. Kadang-kadang pengangkatan Kepala Distrik tidak memenuhi selera rakyat banyak, karena tidak sesuai dengan perasaan tradisionalnya khususnya dalam derajat elitinya.

Jabatan-jabatan kerajaan (pusat) yang mengenai masalah pertahanan/keamanan dan ekonomi dihapuskan karena kedua masalah ini ditangani langsung oleh Pemerintah Belanda (*Kapitalao* dan *Sabandara*).

Dengan pembentukan wilayah Distrik dan Kampung-kampung banyak di antara bangsawan wilayah kehilangan fungsi dan pengaruhnya. Kepedihan mereka ini diperberat lagi karena

11) Muna

mereka tanpa kecuali harus membayar pajak malah harus bekerja (rodi) yang sebelumnya merekalah yang menerima antaran dan menyuruh orang bekerja. Maka tidak heran jika beberapa di antaranya berani secara terbuka menentang Belanda malah ada yang sampai menjadi korban atau dibuang.

Penentangan terhadap Belanda secara terbuka padam betul menjelang 1920 yaitu sesudah 14 tahun dari penandatanganan Perjanjian 1906. Daerah yang dianggap paling kacau adalah Laiwui (di luar wilayah Ranomeeto) dan Muna. Di Muna sejak masuknya Belanda sampai 1926 ditempatkan pejabat-pejabat militer (Letnan Infantri) sebagai pejabat pemerintahan.

Lengkapannya sebagai berikut:

- | | | |
|-----|-------------------------|-------------|
| 1. | Let. Inf. Palack | 1907 – 1909 |
| 2. | Let. Inf. Ball | 1909 – 1911 |
| 3. | Let. Inf. Ross | 1911 – 1913 |
| 4. | Let. Inf. van Belt | 1913 – 1917 |
| 5. | Let. Inf. Gualing | 1917 – 1919 |
| 6. | Let. Inf. Gertmas | 1919 – 1923 |
| 7. | Let. Inf. Mars | 1923 – 1925 |
| 8. | Let. Inf. van Gigen | 1925 – 1926 |
| 9. | Adp. Contr. v. Vieser | 1926 |
| 10. | Gezaghebber THP Gaans | 1926 – 1927 |
| 11. | Let. Inf. v. Hansbergen | 1927 |
| 12. | Contr. BB de Jong | 1927 – 1928 |
| 13. | Gezaghebber Gitsels | 1928 |

Pada 1927 kembali ditempatkan seorang tentara (let. Inf.) karena raja Muna Laode Rere menentang pengaruh kuasa Buton atas Muna yang dianggap menentang Belanda. Kejadian ini berakibat dipecatnya Laode Rere sebagai Raja Muna. La Ode Rere digantikan Warouw sebagai pelaksana Raja Muna (1928 – 1929). Pada saat ini kelihatan kekejaman-kekejaman Belanda di Muna.¹²⁾ Kemudian La Ode Dika sebagai *Lakina Wuna* (1930). Setahun kemudian beliau mengikuti jejak Laode Rere dan dipecat. Saat itu ditempatkan lagi seorang letnan tentara di Muna, malah berturut-turut 3 orang sampai 1933, karena kembali dianggap tidak aman (pemerintahan militer). Sejak Laode Dika raja Muna tidak diangkat lagi. Fungsinya dijalankan oleh seorang pelaksana sampai

12) Muna

datangnya Jepang.

Sikap perlawanan dan tidak suka akan Belanda ini bukan semata-mata karena pajak dan merusak struktur masyarakat tradisional tetapi juga turut didasari atas perasaan keagamaan, di mana Belanda dianggap orang kafir (*kafiri, kapere*). Namun bagaimana pun kuatnya perasaan benci dan tak rela diperintah Belanda, tetapi kesanggupan untuk melawannya tidak ada. Hal ini sesudah 1920 menimbulkan sikap frustrasi dan apatis bagi rakyat. Masyarakat menerimanya sebagai suatu kenyataan yang kemudian merosotkan sendi-sendi dan kaidah-kaidah masyarakat tradisional secara drastis. Ditambah dengan beban pajak yang makin berat menjadikan kehidupan lahir batin semakin merosot.

Kemudian kesadaran akan kekurangan dari ini membangkitkan semangat lain yang merupakan benih masa depan yaitu kesadaran akan pentingnya penuntutan ilmu pengetahuan melalui sekolah, walaupun sekolah ini pada mulanya dicurigai sebagai alat Belanda. Menjelang 1930 semangat bersekolah ini sudah meng-gairahkan rakyat secara maksimal. Bibit-bibit elite baru mulai timbul di atas reruntuhan tradisional setelah sekitar 20 tahun penjajahan Belanda.

3. Kehidupan sosial ekonomi

Sejak 1906 Keperintahan kerajaan-kerajaan Sulawesi Tenggara mulai langsung dicampuri oleh Belanda. Pejabat-pejabat sipil dan militer Belanda mulai ditempatkan secara permanen. Selanjutnya daerah-daerah bawahan diatur kembali dan diubah menjadi *Distrik* seterusnya *Kampung* yang tidak dikenal dalam pemerintahan kerajaan. Pejabat-pejabat kerajaan menjadi pegawai pemerintah (Belanda) dan diberikan gaji. Beberapa jabatan kerajaan dihapuskan yaitu jabatan-jabatan yang mengurus pertahanan keamanan dan perekonomian. Pajak ditetapkan ditambah kewajiban bekerja beberapa hari lamanya untuk kebutuhan pemerintahan (pembuatan jalan dan lain-lain). Tindakan Belanda ini berakibat hilangnya kedudukan dan aspirasi masyarakat tradisional. Beberapa bangsawan daerah bawahan yang wilayahnya dirombak ke dalam *Distrik* kehilangan kedudukannya sama sekali sehingga warisan kebesaran tradisionalnya berangsur-angsur hilang malah dia tidak terlepas dari kewajiban pajak, sama dengan rakyat biasa. Kalau sebelumnya menerima pajak (antaran) tradisional dan menyuruh kerja, maka sekarang mereka harus membayar pajak dan disuruh

kerja.

Tindakan Belanda lainnya adalah larangan memiliki senjata api padahal banyak bangsawan-bangsawan yang pernah memilikinya termasuk meriam. Juga Belanda dengan keras melarang penjualan budak malah melarang memperkerjakan orang tanpa diberi gaji, sedangkan budak dan pengabdian merupakan ciri khusus dalam masyarakat tradisional. Bea masuk dan ke luar barang-barang dagangan langsung diurus dan diawasi oleh pemerintah Belanda.

Tindakan-tindakan Belanda ini yang amat drastis dan tegas mempunyai pengaruh besar atas kehidupan masyarakat tradisional yang telah teradat dan diwarisi turun-temurun. Timbul ras antipati dari masyarakat yang kadang-kadang menjurus pada terjadinya perlawanan terbuka yang dipertegas dengan anggapan bahwa Belanda adalah *Kapere* (kafir). Tetapi Belanda terlalu kuat dan *modern* untuk dilawan sehingga kehadiran maka semua keinginannya harus diterima, walaupun dengan perasaan terpaksa dan tertekan. Hal ini menimbulkan sikap frustrasi dan apatis yang menghilangkan semua ambisi dan aspirasi masyarakat tradisional. Kebanggaan tradisional lenyap dan terciptalah masyarakat *mbe-mbe toka* (bahasa Tolaki = mana-mana saja).

Politik desentralisasi Belanda berhasil mencapai tujuannya yang tersirat di belakang yang tersurat yaitu melenyapkan struktur, ambisi dan aspirasi masyarakat tradisional, walaupun *establishment* kerajaan tetap dipertahankan untuk diperalat. Perorangan atau golongan yang dilihat menentang kekuasaan dan kebijaksanaan Belanda ditangkap dengan dalih pajak atau penjualan budak.

Mata pencaharian penduduk hampir-hampir tidak mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Makanan pokok rakyat juga tidak mengalami variasi menyolok yaitu beras dan sugu di daratan jazirah Sulawesi Tenggara sedangkan di kepulauan umumnya terdiri dari jagung, ubi kayu dan beras, kecuali Kabaena yang sejak lama merupakan penghasil beras. Suatu variasi adalah dikenalnya jenis ubi kayu yang langsung dapat dimakan tanpa diproses terlebih dahulu yang dikenal sebagai *uwikauambo* (ubi kayu ambon) atau *landibau* atau *lambau* yang berasal dari kata *landbouw*. Jenis ubi kayu yang dikenal sebelumnya adalah ubi kayu beracun yang tidak dapat langsung dimasak tanpa melalui pengolahan tertentu lebih dahulu.

Hasil-hasil utama yang diekspor adalah kulit/tanduk kerbau,

mutiara (dan hasil laut lainnya), kulit kayu bakau dan akar *bangkudu*. Sistem perdagangan makin lancar dengan dibukanya jalan darat dan makin ramainya hubungan laut.

Dalam perdagangan, sistem barter masih sering dilakukan. Barang-barang yang menjadi penukar dari hasil-hasil rakyat selain uang adalah kain-kain, garam dan alat-alat rumah tangga (utamanya alat dapur). Perdagangan ke luar banyak dilakukan oleh penduduk yang membawanya ke pelabuhan dari daerah-daerah atau langsung membawanya ke Surabaya. Pada sekitar 1920 hasil kulit bakau dan bahan *karoro (agel)* dikeluarkan dari Poleang/Rumbia di samping beras dan kulit/tanduk kerbau. Lasalimu (di Buton tengah) banyak menghasilkan akar bangkudu. Pengumpulan bahan-bahan ini dilakukan dengan jalan ditukar dengan kain-kain dan sebagainya, yang diberikan terlebih dahulu kepada para pengolah sesudah imbangannya (harga) ditentukan. ¹³⁾

Muna juga menghasilkan kayu jati, Menurut tradisi bibit kayu jati di Muna dibawa oleh *paelangkuta* dari Jawa. Orang Muna menyebut jati dengan *Kulidawa*. Pada 1911 Pemerintah Belanda menganjurkan penanaman jati. Anjuran ini banyak dilaksanakan oleh La Araeta Kepala Distrik Tiworo I di wilayahnya. Bibitnya di samping bibit yang telah ada di Muna juga didatangkan dari Jawa. Pada kira-kira 1925 dibukalah perkebunan jati (kultur). Di pulau Toba (ujung utara pulau Muna) oleh *NV Cultuur Maaschappij Claim Banda* dibuka perkebunan kelapa dengan kontrak 75 tahun (16 - 9 - 1911 sampai dengan 16 - 9 - 1986) seluas 1.800 ha. Kemudian menyusul *NV Cultuur Maaschappij Bungin Tumingan* pada 1918 seluas 30 ha juga dengan kontrak 75 tahun (17 - 6 - 1918 sampai dengan 17 - 6 - 1993). Di *Tampuna Bale* (pulau Buton) dibuka pula perkebunan kelapa oleh *NV Cultuur Maaschappij Tompenan* dengan kontrak 75 tahun yang terdiri dari 3 konsesi :

Konsesi I : 300 ha kontrak 26-6-1913 sampai dengan 26-6-1988.

Konsesi II : 700 ha kontrak 20-10-1915 sampai dengan 20-10-1990.

Konsesi III : 136 ha kontrak 29-12-1924 sampai dengan 29-10-1999.

Juga kepada rakyat dianjurkan untuk menanam kelapa. Pada 1925

13) La Bau.

diadakan gerakan penanaman kapok secara masal di Muna, yang sebelumnya kapok telah merupakan hasil Muna yang diekspor. Tanaman kelapa perkebunan mulai mengeluarkan hasilnya pada 1924. Pada saat itu hasil hutan berupa rotan mulai pula dikeluarkan terutama dari daratan jazirah Sulawesi Tenggara yang sebelumnya hanya menetap di Bau-Bau (Buton), dan Kendari.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIKATAKAN RELEVAN DENGAN ATAUPUN MERUPAKAN EMBRIO PROSES KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH

Kegiatan masyarakat yang dapat dikatakan relevan dengan ataupun yang merupakan embrio proses jaman kebangkitan nasional di daerah tidak dapat ditelusuri jika yang dimaksud adalah yang semacamnya timbul di Jawa sampai 1928. Sampai menjelang 1920, malah kadang-kadang sesudahnya Belanda masih harus mengadakan gerakan-gerakan pasifikasi. Pemerintahan militer di Muna dan Laiwui mulai berakhir pada 1927. perlawanan atau katakanlah perjuangan yang dihadapi Belanda antara 1906 – 1928 adalah perlawanan mempertahankan diri secara tradisional yaitu menentang masuknya penjajah. Keadaan ini pula yang mewarnai sikap Belanda walaupun zaman itu terkenal dengan adanya *politik etis*. Yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah politik kolot Belanda yaitu politik menguasai kalau perlu dengan kekuatan senjata.

Pelaksanaan politik desentralisasi tidak menonjol etisnya tetapi sebaliknya. Akibat bagi rakyat adalah hancurnya secara bertahap tetapi pasti sendi-sendi masyarakat tradisional, beratnya beban kehidupan karena adanya pajak dan kerja wajib dan munculnya ikatan-ikatan peraturan baru yang tidak dikenal sebelumnya yang tentunya mengekang kebebasan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Usaha pendidikan yang dijalankan Belanda (pemerintah) sesudah 1910 yang berupa pendirian sekolah-sekolah di beberapa tempat belum dapat menimbulkan suatu elite baru pada 1928 untuk mampu mengendalikan apalagi mendirikan usaha-usaha organisasi. Malah sekolah ini pada mulanya dicurigai karena memang sikap masyarakat pada saat itu belum merasakan kebutuhan akan pendidikan modern. Pendidikan tradisional dengan kaitan agama (pengajian dan lain-lain) lebih dirasakan kebutuhannya dari pendidikan sekolah yang diadakan Belanda.

Suatu berita dari Muna mengungkapkan adanya kegiatan atau *Laode Mizani* yang mendakwahkan pelaksanaan syariat Islam sampai ke pelosok-pelosok yang merupakan aliran *Ahlusunnahwaljamaah*. Dia dibantu seorang asal Sulawesi Selatan (Bugis) yang bernama *Manamang*. Dalam dakwah-dakwahnya dia meramalkan akan perginya bangsa putih mata (Belanda) dan satu waktu negeri kita akan kita perintah sendiri.¹⁴) Karena dakwah-dakwahnya ini *Laode Mizani* pernah ditangkap Belanda tetapi kemudian dilepaskan.

Kegiatan *Laode Mizani* ini timbul sesudah 1920 (sebelum 1928) di mana Belanda secara total telah dapat menguasai Sulawesi Tenggara. Dengan kata lain *Laode Mizani* tidak dapat membangkitkan sesuatu sikap positif dari masyarakatnya untuk mengemban fatwa dan dakwanya. Masa 1920 – 1930 di Sulawesi Tenggara adalah masa transisi di mana terjadi transformasi sosial yang menjerus kepada frustrasi karena hancurnya sendi-sendi masyarakat tradisional dalam menuju suatu sistem masyarakat baru di atas reruntuhan itu.

Sebaliknya gerakan *Ahlusunnahwaljamaah* dari *Laode Mizani* (*Aro Kamboi*) ini dapat dilihat sebagai suatu embrio gerakan Kebangkitan Nasional pada saat itu dalam ukuran Sulawesi Tenggara.

"Maka putih akan pergi dan satu saat negeri kita, kita perintah sendiri" adalah kalimat perjuangan Kebangkitan Nasional dalam menuju Indonesia merdeka.

C. INTERAKSI DI DAERAH

1. Politik

Sampai dengan 1928 tidak ada berita tentang adanya suatu partai politik di Sulawesi Tenggara. Gerakan *Aro Kamboi* (*Laode Mizani*) yaitu aliran *Ahlusunnahwaljamaah* di Muna mungkin dapat diduga sebagai akibat dari pengaruh PSSI tahun-tahun sebelumnya. Tidak jelas apakah *Aro Kamboi* pernah ke luar ataukah pengaruh datang dari luar Muna melalui orang-orang tertentu. Yang jelas bahwa seorang yang membantunya berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis) yang bernama *Manamang*. Gerakan *Aro Kamboi* pada saat itu yang tersirat dalam kalimat.

14) Muna.

"Belanda akan pergi dan suatu saat Negeri kita, kita akan perintah sendiri," sudah dapat dikatakan suatu gerakan politik yang sampai mengakibatkan Aro Kamboi pernah ditangkap Belanda.

2. Agama

Agama Islam memasuki Sulawesi Tenggara pada 948 H (1541 M). Ulama yang mula-mula membawa Islam yaitu *Syeh Abd. Wahid* tiba di Buton bersama-sama dengan seorang yang dikenal sebagai Imam Pase (Imam Pasai?). Syeh Abd. Wahid berhasil mengislamkan raja Buton ke VI yang kemudian menjadi Sultan Buton I dan dikenal dengan nama (Sultan) Murhum.

Pada awal abad ke-17 di zaman pemerintahan Sultan Buton IV *La Elangi* (cucu Murhum) oleh *Sapati La Singga* diundangkan *Martabat Tujuh* dari aliran *Tarekat Wujudiah (Wihdatul Wujud)* sebagai dasar keperintahan dan pemerintahan Kesultanan Buton. Selanjutnya *Martabat Tujuh* menjadi dasar kehidupan sosial budaya dan politik. Derajat keliman dalam ilmu agama menentukan atau menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan. Tradisi Muna memberitakan tentang masuknya Islam yang juga dibawa oleh Syeh Abd. Wahid. Dari Konawe datang berita tentang kedatangan La Embo yang diutus oleh Murhum untuk memasukkan Islam tetapi rupanya gagal.¹⁵⁾

Bokeo (Raja) Mekongga *La Duma* memeluk agama Islam yang dibawa oleh utusan Raja Luwu pada pertengahan abad ke-17. Proses Islamisasi di Sulawesi Tenggara bermula dari istana raja-raja setempat, dan secara bertahap menerobos ke pelosok-pelosok. Proses ini diperlancar lagi dengan kedatangan orang-orang luar khususnya dari Sulawesi Selatan. Kolaka Utara banyak dimasuki oleh orang-orang Bugis utamanya mereka yang berasal dari Luwu. Tiworo dan pantai selatan Konawe banyak pula didatangi orang-orang Bugis sedangkan pulau Wawonii yang terletak di jalur pelayaran menuju Ternate banyak disinggahi pelayar-pelayar terutama orang Makassar dan Bugis. Di luar ibu kota kerajaan, Kolaka Utara, Tinanggea (Konawe Selatan) dan Wawonii menjadi pusat-pusat penyebaran dan pemantapan Islam sejak akhir abad ke-18.

Pada awal abad ke-20 Islam merupakan agama yang dianut

15) Abd. Hamid Hasan.

oleh seluruh penduduk Sulawesi Tenggara kecuali Morpene yang masih banyak yang bena-benar Khalaiik. ¹⁶⁾ Dapat dipahami bahwa derajat ke-Islaman di pelosok-pelosok terpencil tidak akan sama dengan pusat-pusat penyebaran. Hampir seluruh rakyat sampai ke pedalaman telah mengaku memeluk agama Islam, tetapi pratisasi dari syariat Islam masih amat kurang. Di Laiwui (Kendari) pemantapan Islam sampai ke pedalaman terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal sekali abad ke-20, walaupun pada pertengahan abad ke-18 Mokole Konawe (Lakidende) terakhir telah menyatakan Konawe sebagai kerajaan Islam.

Agama Kristen masuk ke Sulawesi Tenggara bersamaan dengan datangnya tentara dan pegawai pemerintah Belanda. Sekitar 1915/1916 di Bau-Bau, Raha, Kendari dan Kolaka telah terbentuk jemaat-jemaat persiapan, yang timbul tenggelam bergantung kepada jumlah anggota (tentara dan pegawai) dan pimpinan. ¹⁷⁾ Di Raha di samping adanya penganut Kristen Protestan ada pula penganut Kristen Roma Katolik. Pada 1912 *Pastor P.I. Onel* telah mempermandikan tiga orang anak dari pegawai Belanda di Raha. Sampai 1928 berturut-turut telah bertugas di Raha (Muna) empat orang Pastor yaitu:

- a. P.I. Onel S J 1910 – 1914
- b. P.A. Wintjes S J 1914 – 1916
- c. P.I. Kremer S J 1916 – 1922
- d. P.H. Kappel 1922 – 1928. ¹⁸⁾

Sebegitu jauh agama Kristen Roma Katolik di Muna masih terbatas dalam kota Raha dan belum dapat tersebar di luar aparat pemerintahan kecuali jika terjadi perkawinan.

Pada akhir 1915 *Nederlandsche Zending Vereniging* mengutus *Hendrik van der Klift* dari Jawa Barat ke Sulawesi Tenggara. Sesudah mengadakan penelitian ia memilih Kolaka sebagai tempat kedudukannya, sehingga hari Natal 1915 dirayakannya di Kolaka dengan penganut Protestan setempat (aparat pemerintah). Tahun 1917 van der Klift pindah ke Mowewe (masih termasuk Onderafdeling Kolaka) dan di sanalah ia berhasil membaptis seorang penduduk untuk pertama kalinya setahun kemudian. ¹⁹⁾ Dari

16) Dr. M.C. Yongeling, *Benih yang tumbuh 10*, Lembaga penelitian dan studi DGL, 1972, hal. 6.

17) *Ibid*, hal. 5.

19) *Ibid*, hal. 5.

Mowewe agama Kristen Protestan berkembang sampai memasuki Onderafdeling Kenadari (Laiwui) dan Onderafdeling Buton (Moronene). Pusat penyebaran Kristen selain Mowewe di Kolaka, juga Lambuya di Kendari dan Taubonto di Moronene (Buton).

Nederlandsche Zending Vereniging satu-satunya organisasi gereja yang diluaskan menyebarkan agama Kristen di Sulawesi Tenggara yang wilayahnya terbatas pada daratan jazirah Sulawesi Tenggara. Gereja Kristen yang ada di tiap ibu kota Onderafdeling hanya dikhususkan bagi pegawai dan tentara dan tidak mempunyai fungsi penyebaran. Missi Katolik di Muna barulah pada 1930 mendapat izin penyebaran di luar kota Raha.

Dapatlah dibayangkan beratnya tugas pendeta van der Klift untuk menyebarkan agama Kristen di daerah yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Sesudah 3 tahun memulai usahanya barulah dia berhasil membaptis seorang pemuda di Mowewe. Usahanya berjalan secara damai di tengah-tengah penduduk yang sedikit banyaknya mencurigai usahanya. Penyebab utama dalam hal ini adalah anggapan bahwa agama Kristen itu adalah agama Belanda dan berbau kafir oleh karena mereka berpendapat bahwa orang kulit putih kafir (kapere).²⁰⁾ Memang pada saat itu kebencian pada Belanda masih mendalam pada sebagian pemuka-pemuka agama Islam yang merasa tidak senang dengan kehadiran agama Kristen di daerahnya. Namun demikian sebegitu jauh tidak pernah terjadi insiden-insiden terbuka dan membahayakan, walaupun Palangga (Laiwui Selatan) yang penduduknya tidak suka menerima orang *sarani* harus ditinggalkan oleh Pendeta *C.C Storm*, yang dibukanya pada 1921, atas permintaan pemerintah.²¹⁾ Usahanya dilanjutkan di Moronene (Toubonto) yang penduduknya masih banyak khalaik. Pendeta *D. Kok* berkedudukan di *Sanggon* (Kolaka) pada 1919 tetapi gagal dan digantikan oleh *M.J. Gouweloos* 1924. Sesudah 10 tahun di sana barulah dia berhasil mengadakan pembaptisan.

Pendeta-pendeta Zending yang dikirim ke Sulawesi Tenggara berasal dari *Hervormde Kerk* di Negeri Belanda yang kepercayaannya tidak bersifat dogmatis atau fundamentalis, ortodoksinya tidak terlalu keras.²²⁾ Hal ini besar pengaruhnya ditambah dengan

20) Ibid, hal. 6.

21) Ibid, hal. 6.

22) Ibid, hal. 7.

sistem pendekatan yang menonjolkan usaha sosial tanpa pamrih dengan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Perkembangan agama Kristen di daratan Sulawesi Tenggara tidak memancing suatu ledakan emosi dari masyarakat Islam sekelilingnya malah tidak meretakkan hubungan kekerabatan dan tidak terlihat adanya suatu konfrontasi sosial.

Agama Islam yang berkembang di daerah ini sejak pertengahan abad ke-16 telah berhasil menempah struktur sosial, budaya dan politik ke dalam bentuk yang dihayati sebagai kebudayaan yang telah terdapat. Namun demikian sisa-sisa kebudayaan sebelum Islam masih dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Kecuali Buton yang menggelar rajanya sebagai Sultan daerah-daerah lain tetap memakai gelaran-gelaran sebagai Manreramantera dalam upacara-upacara yang berasal dari pra Islam melalui modifikasi sana-sini tetap dilanjutkan. Banyak mantera-mantera pra Islam ini ditutup dengan *Kun Payakun* maka jadilah ia mantera dalam masyarakat Islam. Jabatan-jabatan adat dan pra Islam banyak yang dipertahankan termasuk jabatan-jabatan yang menyangkut kepercayaan dan upacara di samping adanya jabatan-jabatan imam, kadhi, dan lain-lain. *Mbusehe* yang memimpin upacara mosehe masih tetap diadakan walaupun mantera-manteranya telah dimodifikasi menjadi berwarna Islam. Upacara Mosehe adalah upacara korban yang dilaksanakan utamanya untuk mendamaikan suatu perselisihan.

Di Buton dan Muna terutama di pedalaman upacara-upacara panen (bersyukur sesudah panen) masih dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang dianggap kramat tentunya dengan mantera-mantera yang telah diwarnai baru karena pengaruh Islam.

Para pendeta agama Kristen dalam menyebarkan agamanya terlebih dahulu mempelajari bahasa dan adat istiadat di tempatnya bertugas. Van der Klift menyusun buku bacaan untuk SD dalam bahasa Tolaki yang diberi judul *Sura Pobasaa* (buku bacaan). Kemudian diterbitkan pula buku *Sala Salmaa* (jalan keselamatan) dengan natsnats Alkitab dalam bahasa Tolaki dengan huruf Arab.²³⁾ Penginjil yang sama statusnya dengan guru jemaat diberi nama jabatan *Ponggawa*²⁴⁾ suatu nama jabatan yang berasal dari jabatan tradisional kerajaan Konawe dan kemudian Laiwui. Juga ada usaha untuk menterjemahkan Injil ke dalam bahasa Tolaki.

23) Ibid, hal. 5.

24) Ibid, hal. 7.

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa baik Islam maupun Kristen memasuki Sulawesi Tenggara dengan menyerap aspek-aspek budaya setempat atau dengan kata lain bahwa kedua agama ini mewarnai kebudayaan asli masyarakat tentunya. Malah terakhir penganut Kristen yang berasal dari keluarga Islam sebelumnya, masih tetap mempertahankan sikap dan nilai sosial pra Kristen yang sedikit banyaknya amat dipengaruhi oleh sikap dan nilai sosial Islam sampai pada pantangan (larangan) yang bersumber dari Islam masih ada yang dipantangkannya walaupun mereka telah memeluk agama Kristen. Yang berpengaruh kuat dalam hal ini adalah hubungan kekerabatan yang tetap dipelihara walaupun dalam kenyataan mereka telah berbeda keyakinan.

3. Pendidikan

Pendidikan sebelum 1906 merupakan pendidikan tradisional yang jika dikelompokkan dapat dibagi atas dua wajah yaitu:

- a. pendidikan keterampilan di lapangan.
- b. pendidikan yang berlandaskan ilmu agama yang diawali dengan pengajian al Quran, kemudian melebar ke ilmu kemasyarakatan, politik, ekonomi dan malah filsafat dan kadang-kadang disertai ilmu bela diri.

Di Buton terdapat suatu kekhususan dengan diajarkannya Bahasa Indonesia (baca Melayu) dengan buku pegangan (pelajaran) yang disiapkan (tulisan Melayu Arab). Juga dipelajari bahasa dan tulisan Bugis/Makassar. Tentunya pelajar ini terbatas pada golongan/keluarga tertentu yang punya kedudukan dan ambisi dalam pemerintahan (politik) dan ekonomi.

Sekolah yang pertama didirikan pemerintah Belanda ialah *Sekolah Anak Bumi Putra* di Bau-Bau pada 1908 (bulan Mei).²⁵⁾ Menyusul Raha (Muna) pada 1910, Kendari 1916 dan di Kolaka *Landschap school* didirikan pada 1918. Pada 1925 di tiap Distrik telah terdapat satu sekolah (3 tahun) sedang di ibu kota Onderafdeling kelasnya sampai kelas 5 (5 tahun). Tidak ada di antara sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda (HIS). Pada 1918/1919 Zending yang berpusat di Mowewe mulai mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah yang pertama didirikan adalah di Rate-Rate

25) A.M. Zahari.

26) Dr. Mr. Jongeling, op cit, hal. 4.

(Kolaka) dan kemudian Mowewe (Kolaka) pada 1920. Sekolah Zending ini kemudian berkembang ke tempat-tempat lain di pedalaman seperti Sanggona (Kolaka), Lambuya (Kendari, Palarahi (Kendari), Taubonto (Buton) dan lain-lain.

Usaha Zending dalam bidang pendidikan di pedalaman sebenarnya tidak terlalu disukai oleh Pemerintah Belanda karena dapat membawa semacam pengaruh kepada masyarakat sehingga ketentraman kurang terjamin. Zending dianggap sebagai *onrust-stoker* (membikin gelisah, kacau).²⁶) Kurang terjaminnya ketentraman ini mungkin disebabkan adanya ciri tidak menerima kegiatan Zending oleh masyarakat Islam apalagi Zending diidentikkan sebagai Belanda. Usaha Zending dianggap sebagai usaha Belanda. Usaha Zending di Palangga terpaksa dilarang oleh pemerintah Belanda karena timbulnya ketidaksukaan dari masyarakat setempat pada orang *sarani*.

Mungkin pula ketidaksenangan Belanda akan usaha Zending membuka sekolah-sekolah di pedalaman dianggap sebagai menanam bibit yang dapat berbahaya di kemudian hari dengan melihat usaha-usaha dari kaum pergerakan di Jawa pada waktu itu yang umumnya terdiri dari kaum terpelajar. Di Raha (Muna) oleh *Yayasan Santo Paulus* dibuka pula sekolah pada 1927. Dari golongan Islam sampai pada 1928 belum ada usaha mendirikan sekolah karena pada saat itu belum ada organisasi Islam di Sulawesi Tenggara.

4. Seni Budaya

Kedatangan Belanda pada 1906 di Sulawesi Tenggara yang diikuti dengan peraturan pemerintahannya menggoncangkan sendi-sendi masyarakat tradisional yang terjadinya suatu proses transformasi sosial yang drastis. Masa 1906 sampai sekitar 1918 merupakan masa pasifikasi, karena kehadiran dan tata cara pemerintahan dan penguasaan Belanda mendapat reaksi yang kadang-kadang cukup keras. Untungnya bagi Belanda, reaksi perlawanan-perlawanan itu tidak terkoordinasi sehingga dengan mudah dapat dinetralisir. Masa itu adalah juga merupakan masa politik etis Belanda sehingga tindakan Belanda di Sulawesi Tenggara merupakan tindakan dua muka yang sebetulnya berlawanan yaitu tindakan dua muka yang sebetulnya berlawanan yaitu tindakan kolonial dan tindakan etis. Pada zaman itu pemerintahan Belanda mendirikan sekolah-sekolah (etis) dan menindas (kadang-kadang mengadu

domba) kelompok-kelompok yang menentang kehadirannya dan tindakan-tindakannya.

Masa 1918 — 1928 adalah masa di mana rakyat harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga terjadi suatu proses transformasi sosial yaitu hilangnya sendi-sendi masyarakat tradisional menuju masyarakat baru. Proses transformasi sosial ini tidak memungkinkan suatu perkembangan seni budaya malah yang terjadi adalah kebalikannya. Seni tradisional adalah seni yang hidup dalam kesatuan masyarakat tradisional. Runtuhnya sendi-sendi masyarakat tradisional juga mengakibatkan jatuhnya nilai-nilai seni budaya tradisional.

Masa ini tidak memungkinkan adanya kreasi-kreasi baru di bidang seni budaya. Ahli-ahli seni budaya tradisional pelan-pelan hilang fungsi dan kedudukan sosialnya di mana ahli-ahli baru yang *up to date* belum dapat diterima begitu saja kemunculannya oleh masyarakatnya yang dapat dikatakan dalam stadium apatis.

Di zaman inilah banyak materi-materi seni budaya Sulawesi Tenggara mulai ditinggalkan kemudian dilupakan sama sekali. Para ahli seni budaya kemudian hilang satu-satu ditelan masa, hampir tidak mempunyai pengganti yang dapat disetarakan dengan mereka pada zamannya. Golongan muda yang muncul kemudian hampir-hampir tidak memperhatikan warisan seni budayanya karena masyarakatnya telah berubah.

5. Pers

Di Sulawesi Tenggara tidak pernah diterbitkan suatu media pers. Tetapi menjelang 1928 (1925 — 1928) pers dari lain daerah satu dua telah dapat mencapai Sulawesi Tenggara, walaupun pembacanya hanya terbatas pada aparat pemerintah (pegawai dan guru).²⁷⁾

27) La Ero.

BAB IV KEADAAN DI SULAWESI TENGGARA DARI TAHUN 1928 - 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA.

Kedatangan Belanda di Sulawesi Tenggara pada 1906 disusul dengan tindakan-tindakan drastis dalam mengatur pemerintahannya. Di Buton sistem pemerintahan kerajaan tetap dipertahankan di tingkat pusat dimana tingkat bawahan dibentuk kembali menjadi bagian-bagian yang disebut distrik. Jabatan-jabatan yang menyangkut kemiliteran kerajaan dihapuskan demikian pula jabatan-jabatan yang mengurus ekonomi (khususnya bea pelabuhan) dihapuskan karena keduanya langsung ditangani oleh Belanda.

Muna dikokohkan Belanda sebagai wilayah bawahan Buton rajanya adalah raja bawahan dari Sultan Buton. Tindakan ini menjadikan Muna merupakan daerah yang kurang aman sampai pada 1930. Di Kendari (Laiwui) Belanda menjadikan Raja Kendari (Laiwui) sebagai raja yang meliputi wilayahnya bekas kerajaan Konawe. Pengukuhan ini dimaksud untuk memudahkan menguasai/memerintah rakyat bekas Konawe yang wilayah-wilayahnya pada saat itu mengurus dirinya masing-masing. Pasifikasi di Laiwui baru berakhir pada 1917 dengan pengukuhan Sao-Sao sebagai Sangia Laiwui yang membawahi seluruh bekas Konawe. Bokeo di Mekongga tetap ada tetapi fungsi politiknya dihilangkan yang digantikan oleh Sulewatang yaitu pembesar kerajaan Luwu. Bokeo hanya diberi jabatan sebagai Kepala Distrik di Kolaka.

Dengan memperalat raja-raja setempat dan pembagian wilayah bawahan ke dalam struktur baru yang tidak dikenal sebelumnya, Belanda menjelang 1930 berhasil merombak sistem masyarakat tradisional walaupun mendapat tantangan-tantangan sporadis yang dengan mudah dapat dipadamkan. Sisa-sisa sistem masa lampau yang ada hanya terbatas pada lingkungan istana kerajaan.

Dalam struktur pemerintahan Belanda Sulawesi Tenggara

ra pada mulanya tergabung dalam *Bestuur Afdeling Oost Celebes* (Sulawesi Timur) yang meliputi wilayah sampai dengan Luwuk Banggai. Kemudian pada 1926/1927 dibentuklah *Afdeling Boetoeng en Laiwoei* yang terdiri dari:

1. Onder afdeling Boetoeng (Buton)
2. Onder afdeling Muna.
3. Onder afdeling Kendari, yang meliputi dua *Zelf bestuur* (Swapraja) yaitu Kesultanan Buton (termasuk Muna) dan kerajaan Laiwui.

Onder afdeling Kolaka termasuk *Afdeling Loewoe dan daerah takluknya*.

Pegawai-pegawai kerajaan menjadi pegawai pemerintah. Pembentukan sistem pemerintahan Belanda dan pembukaan sekolah-sekolah ditambah dengan petugas-petugas keamanan (tentara, polisi dan jaksa) menambah banyaknya pegawai-pegawai pemerintah. Pegawai-pegawai pemerintah ini kebanyakan didatangkan dari luar sementara bagian yang dapat diangkat di daerah adalah tamatan sekolah-sekolah (maksimum kelas V) setempat. Pengangkatan pegawai-pegawai setempat ini dapat diperkirakan jumlahnya mengingat pembukaan sekolah baru dilaksanakan sekitar 1910.

Golongan pegawai termasuk pegawai-pegawai kerajaan (*Zelfbestuur*) menjadi elite masyarakat yang amat menonjol kira-kira 1930. Masyarakat yang baru saja kehilangan sendi-sendi tradisionalnya, pada sekitar 1930 mulai hidup kembali dengan aspirasi dan prospek baru. Mereka menyadari bahwa aspirasi-aspirasi itu hanya dapat dicapai melalui pendidikan (sekolah).

Dan sejak itu pula kelihatan adanya transformasi sosial menuju ke masyarakat modern.

Pegawai-pegawai yang didatangkan dari daerah lain (Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Manado, Bugis/Makassar) membawa pengaruh tersendiri yang mendorong kepenghayatan masyarakat modern. Melalui mereka pula ide-ide baru dalam politik, agama dan sosial budaya mulai dikenal dan mempengaruhi.

Pembukaan jalan ke pelosok-pelosok, pelayaran yang ramai dan tetap, membawa perkembangan di bidang ekonomi. Perdagangan hasil hutan dan hasil laut, pembukaan onderne-
ming, pembukaan tambang (aspal di Buton, nikel di Pomalaa)

menjadikan Sulawesi Tenggara lebih mantap dalam pengelolaan dan pengusahaan bidang ekonomi. Orang-orang Cina mulai bersebar ke pedalaman sampai-sampai ada yang menetap disana. Kendari, Bau-Bau, Raha dan Kolaka berkembang menjadi pelabuhan-pelabuhan yang ramai. Perdagangan antar pulau yang dilakukan oleh pelayar-pelayar setempat dan yang dari luar daerah semakin ramai. Pada 1930 hampir tidak dikenal lagi sistem barter (tukar-menukar) dalam perdagangan. Peredaran uang telah dikenal sampai ke pelosok-pelosok. Pada 1920 perdagangan dengan Moronene (hasil bumi/hutan masih dilakukan secara barter. ¹⁾ Pada sekitar 1924 pengusaha Jepang sudah ada yang menetap (S. Fujika) di Buton. ²⁾

B. DEPRESI EKONOMI 1930)

Pemerintahan sipil Belanda dimantapkan pada 1927/1928, sesudah dirasakannya adanya kestabilan di Sulawesi Tenggara. Aspirasi-aspirasi masyarakat tradisional yang menentang Belanda telah punah sama sekali. Belanda telah berhasil melaksanakan transformasi sosial setelah masa pasifikasi dilaluinya (1906 - 1918) dalam jangka waktu relatif pendek (1919 - 1928). Keamanan dan sikap masyarakat yang menunjang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Sarana perhubungan yang mantap, pembukaan onderneming yang telah mulai berproduksi pada 1925, pengeluaran hasil-hasil hutan, pengolahan kayu, pembukaan tambang (nikel dan aspal) amat menggerakkan Belanda dalam mengelola ekonomi Sulawesi Tenggara.

Dalam keadaan yang penuh harapan itu timbullah depresi ekonomi dunia yang gelombangnya juga mencapai Sulawesi Tenggara. Pada 1930 itu rakyat Sulawesi Tenggara sebagianya saja lepas dari sistem barter. Dengan kata lain bahwa kebudayaan uang baru merata sampai di pelosok-pelosok pada sekitar 1925, yaitu pada saat hasil hutan dan ternak dapat dibeli sampai di pedalaman. Pengenalan akan kehidupan dengan sarana tukar yang berupa uang ini tentunya membawa pengaruh pula akan sikap hidup masyarakat. Jika sebelumnya kebutuh-

1) La Bau

2) Menurut dokumen tanah (agraria) yang ada pada A Mulku Zahari

an langsung ditukarkan dengan kebutuhan orang lain tanpa adanya penilaian dengan uang, maka pada saat itu uang mempunyai arti yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan.

Akibat dari depresi ekonomi setelah macetnya perdagangan, yang berarti rakyat tak dapat menjual hasil hutan, hasil bumi dan ternaknya. Dengan kata lain pada saat itu rakyat amat sulit untuk memiliki uang.

Kebutuhan pokok mungkin dapat dipenuhinya tetapi kebutuhan sekunder yang harus dibeli tak dapat diperolehnya karena tidak punya uang. Yang amat berat dirasakan oleh rakyat adalah pembayaran pajak. Karena tidak sanggup membayar pajak dan takut pada tindakan pemerintah maka banyak rakyat yang meninggalkan kampungnya, mengungsi ke pedalaman dan berladang di gunung-gunung. ³⁾ Pemerintah Belanda sendiri tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat dianggap memberatkan rakyat (umpamanya menaikkan pajak). Keadaan ekonomilah yang membuat rakyat tidak dapat mencari uang untuk membayar pajaknya. Pemerintah Belanda di Sulawesi Tenggara tidak mengambil *beleid* yang drastis dan patut dicatat dalam bidang ekonomi. Segalanya dalam bidang pemerintahan berjalan seperti biasa. Satu-satunya tindakan Belanda pada saat itu yang merupakan akibat depresi ekonomi adalah adanya beberapa orang yang ditangkap, malah ada yang sampai dibuang dengan dalih tidak mau membayar pajak.

Mereka yang ditangkap dan dibuang adalah mereka yang dianggap memelopori dan menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. Di Muna timbul gerakan yang dipelopori oleh orang-orang Muhammadiyah yang melontarkan ucapan-ucapan kode antara mereka:

Loekata = Lawan orang Eropa karena tidak adil dan
Kaneko = Kas Nederland Kosong.⁴⁾

Akibatnya pada 1934 dua orang dari mereka ini ditangkap dengan dalih menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. ⁵⁾ Mereka yang ditangkap adalah *La Kare* dan *Laode Buntu*. Keduanya dibuang ke Makassar.

3) kertasnya terpotong

4) Muna (La Kare)

5) L M Shailihi

La Kare dibuang selama 6½ tahun sedangkan Laode Buntu 5 tahun. Disamping tindakan menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak, mereka dituduh pula menghina seorang pastor yang bertugas di *Lasehao* (pedalaman Muna) disamping tentunya tuduhan-tuduhan dengan latar belakang politik.

C. PENDIDIKAN

Pada 1930 semua distrik dan Onderdistrik telah mempunyai sekolah malah di beberapa kampung yang padat penduduknya dibuka pula sekolah.

Sekolah-sekolah ini kebanyakan berkelas 3 kecuali di Bau-Bau (Buton), Raha (Muna), Kendari dan Wawotobi (Kendari) dan Kolaka yang sampai kelas V.

Zending (NZV) di daratan jazirah Sulawesi Tenggara amat giat mendirikan sekolah-sekolah di pedalaman. Pada 1938 Zending telah berhasil membuka 16 sekolah (SD) dan sebuah HIS di Kendari. Pada 1942 jumlah SD Zending 27, satu HIS (Kendari) dan 3 sekolah lanjutan. ⁶⁾

Missi Katolik di Muna pada 1932 membuka pula sekolah di pedalaman Muna disamping sekolah yang telah ada di Raha. Pada saat itu Muhammadiyah membuka pula 2 sekolah agama di Muna. (Raha dan Mabolu) yang masing-masing dipimpin oleh *La Ati* dan *La Kare*. ⁷⁾ Di Kolaka Utara pada 1937 Pemuda Muslimin Indonesia berhasil pula mendirikan *Sekolah Arab*. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Muna ditutup pada 1935 karena gurunya La Kare ditangkap Belanda dan diasingkan (1934) bersama-sama dengan seorang tokoh Muhammadiyah lainnya (Laode Buntu).

Sebagai ilustrasi dibawah ini diturunkan data sekolah dalam Onderafdeling Muna (7 distrik).

Tahun:	1915	1920	1925	1930	1935	1940	1945
Negeri:	1	1	4	11	11	13	21
Swasta:	—	—	—	3	4	2	2

Zending membuka *Normaalleergang* (1926 - 1934) di Mowewe (Kolaka) sedangkan di Bau-Bau sekolah guru (*CVO*) dibuka pada 1938 setelah *LVO* dihapuskan sebelumnya. Di Wa-

6) Dr. MC. Jongeling, op. cit., hal. 7

7) Muna

wotobi (Kendari) pada 1939 dibuka *Sekolah Landbouw* (Praktek Umum).⁸⁾ CVO dan *Landbouw School* adalah sekolah negeri (kepunyaan Pemerintah).

Zending mengirim beberapa pemuda Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan pelajaran di Pandolo dan Tentena (Sulawesi Tengah) sedang Missi Katolik di Muna mengirim beberapa pemuda ke Manado dan Tomohon.

Kekurangan guru Sekolah Desa (3 tahun) ditutupi dengan mengangkat mereka yang tamat kelas V sebagai guru.

D. INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN ORGANISASI/PARTAI

Menjelang tahun 1930 ada tiga situasi yang perlu dicatat di Sulawesi Tenggara:

Pertama, Terjadinya mobilitas sosial sebagai akibat dari runtuhnya sendi-sendi masyarakat tradisional dan adanya sekolah-sekolah yang menjadi sumber kemajuan ke masyarakat modern.

Mobilitas sosial ini ditunjang dengan tidak dikenalnya akan perbedaan dan perbedaan kesempatan untuk memasuki sekolah. Di Sulawesi Tenggara tidak dikenal sekolah-sekolah yang khusus untuk golongan-golongan tertentu.

Kedua, Munculnya elite baru dalam masyarakat yang terdiri dari golongan pegawai. Golongan ini berasal dari bermacam-macam suku bangsa (Jawa, Bugis/Makassar, Timor/Flores, Ambon, Manado/Sangir, Sumatra/Melayu) disamping mereka yang berasal dari dalam daerah.

Ketiga, Timbulnya pola pemikiran baru yang mempunyai pengaruh dalam menilai tata kehidupan (sosial) tata pemerintahan (politik) dan agama (khususnya Islam). Keadaan ini dimatangkan oleh adanya hubungan dengan luar daerah baik melalui saluran pemerintahan maupun sosial budaya (perdagangan dan pers) maupun melalui agama.

8). La Doho.

Ketiga situasi di atas ini memungkinkan untuk timbulnya aspirasi-aspirasi yang dapat disalurkan melalui organisasi. Maka sejak itu pula mulailah dikenal adanya beberapa organisasi (sosial) dan partai (politik) sebagai hasil persebaran organisatoris atau idealis dari organisasi/partai yang ada di Indonesia pada waktu itu.

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang merupakan gerakan yang membawa pembaharuan dalam Islam. Dalam usaha pembaharuan (modernisasi) ini Muhammadiyah dalam usaha-usahanya disamping dakwah Islamiyahnya (tabligh) juga mengusahakan pendidikan melalui sekolah-sekolah.

Aliran Muhammadiyah dikenal di Sulawesi Tenggara melalui pegawai-pegawai pemerintah dan guru-guru sekolah yang datang (ditugaskan oleh Pemerintah Belanda) dari luar daerah. Gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara didorong oleh dua hal yaitu:

- a. Pemantapan dan pembaharuan Islam yang dirasakan kepentingannya terutama dari mereka yang datang dari luar (pegawai) yang telah melihat kemajuan Islam dan aspirasinya di daerah lain terutama di daerah asalnya.
- b. Masuknya Zending dan Missi Katolik di Sulawesi Tenggara sampai ke daerah pedalaman, yang oleh beberapa tokoh Islam dianggap sebagai suatu tantangan.

Gerakan Muhammadiyah ini merupakan usaha-usaha terpisah dari masing-masing daerah (Onderafdeling).

Di Kendari Muhammadiyah mulai dikenal pada 1929/1930.⁹⁾ Penganjurnya adalah seorang guru (asal Makassar) bernama Akhmad Makkarusu Daeng Ngilau. Atas usahanya maka Muhammadiyah diterima oleh beberapa tokoh di Kendari, yang kemudian terwujud menjadi suatu organisasi yang mantap. Susunan Pengurusnya adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Akhmad Makkarusu Dg. Ngilau
(guru).

9). Bunggasi/M. Said.

Sekretaris I : Danu Hasan (Klerk Swapraja Laiwui)
 Sekretaris II : Muh. Kasim Maddualeng (Swasta)
 Komisaris : Iwana (Kepala Distrik)
 H. Abd. Rachman Daud
 Andi Baso (Kepala Kendari)
 Abd. Chalik
 M. Idris Dg. Mancigi
 Adviseur : Sarbari (Landbouw opzichter).

Pada 1934 A. Makkarasusu dipindahkan oleh Pemerintah Belanda ke Makassar (Ujung Pandang) sehingga susunan pengurus Muhammadiyah Kendari berubah. Ketua dijabat oleh Danu Hasan, sedangkan Sekretaris hanya seorang yaitu Muh. Kasim Maddualeng dan yang lain tetap.

Penerimaan anggota melalui seleksi yang teliti karena dikhawatirkan adanya penyusupan yang mungkin membahayakan. Namun demikian *tabligh* boleh dihadiri oleh siapa saja. *Tabligh* ini diadakan dua kali seminggu bertempat di kantor Muhammadiyah pada setiap malam Minggu dan malam Rabu. Isi pokok dari setiap *tabligh* adalah pemantapan ajaran Islam dan pengertian Kemerdekaan. Muh. Kasim Maddualeng sebagai pembicara utama Muhammadiyah Kendari dalam setiap *tabligh*nya menjadikan buku *Pedoman Ringkas* karangan Bung Karno sebagai pegangan utama.

Isi pokok buku tersebut adalah:

- a. Kita harus cinta bangsa dan cinta tanah air melebihi dari cinta kepada anak dan keluarga.
- b. Kita sebagai umat Islam tidak sah ke-Islaman kita jika tidak merdeka.¹⁰⁾

Pengurus Muhammadiyah Kendari berlangganan surat-surat kabar antaranya *Berdasar Islam bersendi kerakyatan* yang dipimpin oleh M. Ishag dan Firdaus.

Ciri Muhammadiyah Kendari tercermin dalam kelengkapan-kelengkapannya berupa panji (bendera), dasi dan lenso (saputangan) berwarna merah dan hijau yang di atasnya tertulis duakalimat syahadat dan "Muhammadiyah" serta gambar matahari. Lenso (saputangan) dilipat segitiga dan diselipkan di kan-

10). Muh Kasim Maddualeng.

tong baju (jas) dimana tulisan dan lambang matahari tersembul keluar.

Karena tabligh-tablighnya yang radikal dan berbau politik Muhammadiyah Kendari mengalami pengawasan ketat dari Belanda malah diberi ciri merah. Setiap tablighnya dihadiri oleh intelijen Belanda. Malah pengurus-pengurusnya diancam untuk ditindak dan diberi peringatan keras.

Gerakan Muhammadiyah di Bau-Bau mendapat tantangan keras dari pemuka-pemuka agama setempat yang menganut paham lama (Martabat Tujuh) yang sedikit banyaknya mempunyai pengaruh kuat di pucuk pemerintahan kesultanan Buton. Muhammadiyah di Buton tidak dapat berkembang dengan luas karena adanya tantangan ini, sehingga pengikut-pengikutnya terbatas dari kaum pendatang dan beberapa orang Buton asli. Dalam gerakan Muhammadiyah di Buton disamping dakwah Islamiyah menonjol pula langkah-langkah modernisasi sosialnya, walaupun identitasnya sebagai suatu organisasi resmi tidak dapat diwujudkan karena tidak memperoleh izin resmi dari Sultan Buton dengan alasan dapat menimbulkan ketegangan yang mungkin menjadi pertentangan terbuka dengan aliran terdahulu yang telah berurat berakar dalam masyarakat Buton. Namun demikian idea modernis Muhammadiyah tetap memancing pengikut-pengikut baru, sekurang-kurangnya ikut dihayati.

Di Raha (Muna) pada sekitar 1929/1930 Bestuur Assisten *Zainuddin Daeng Manrapi* secara diam-diam menganjurkan didirikannya organisasi Muhammadiyah. ¹¹⁾ Anjuran ini diterima oleh *Abd. Kadtr* yang menjabat Kepala Kehutanan pada waktu itu. Alasan khusus untuk mendirikan organisasi ini ialah diizinkan Missi Katolik meluaskan ajaran-ajarannya memasuki wilayah pedalaman pulau Muna. Sebelumnya gereja di Raha hanya dibolehkan melayani pegawai Belanda yang beragama Katolik tanpa izin penyebaran. Pada 1930 Missi Katolik memperoleh izin memasuki pulau Muna. Pada saat itu Sulawesi Tenggara diatur oleh Pemerintah Belanda dalam penyebaran agama Kristen (Protestan dan Katholik) sebagai berikut:

11) Muna

- a. Daratan jazirah Tenggara Sulawesi diperbolehkan untuk Zending (Protestan).
- b. Pulau Muna boleh dimasuki Missi (Katholik).
- c. Pulau Buton terlarang untuk keduanya.¹²⁾

Organisasi Muhammadiyah segera berkembang sampai ke desa-desa dan mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Hubungan dengan pusat (Yogyakarta) selalu ada dengan penghubung *Said Jafar* dan *Mantigi* dari Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah Muna pada waktu itu adalah: La Kare,¹³⁾ La Mane, Bakarang, La Ode Buntu, dan La Ati. Di pedalaman (desa-desa) dikenal pula: La Kaniha (Bangkali), La Padoi (Batuputih), La Ode Zulfakar (Tewehu), dan La Ode Rauf (Masalihi).

Satu hal yang nampak dalam perkembangan yang pesat dari Muhammadiyah di Muna adalah penerimaan kaum terpelajar setempat atas gerakan ini. Abd. Kadir tidak lama setelah membentuk Muhammadiyah dipindahkan oleh Belanda dari Raha. Namun Muhammadiyah telah mendapat pengikut dari anak-anak daerah.

Muhammadiyah berhasil mendirikan dua sekolah di Raha dengan pimpinan La Ati dan La Kare memimpin sekolah di Mabolu.

Dalam perkembangan Muhammadiyah berhasil pula membentuk Kepanduan *Hisbulwathan* atas inisiatif *Muh. Safei* Kepala Pertanian, yang menjadikan Muhammadiyah dua kutub organisasi:

- a. Muhammadiyah dipimpin oleh La Kare dan La Ode Buntu, dan
- b. Hisbul Wathan oleh La Mane, Bakkareng dan La Ati.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah Muna dengan cara-cara radikal dalam membawa misi dakwah dan modernisasi yang mendapat penilikan tajam dari Belanda. Usahnya di bidang pendidikan diamati Belanda dengan kacamata *wildescholen ordonnantie*.

Begitu radikalnya mereka ini sehingga Belanda melihat organi-

12). L. M. Shalihi.

13). Muna/La Kare.

sasi Muhammadiyah Muna sebagai organisasi non koperasi yang banyak mendiskreditkan Pemerintah (Belanda) pada rakyat. Hal ini nyata dalam semboyan kode *LOEKATA* yang berarti *Lawan Orang Eropa Karena Tidak Adil dan KANEKO* dengan maksud *Kas Nederland Kosong*.

Bagi Belanda Muhammadiyah Muna adalah organisasi politik setempat. Kebetulan pada saat itu banyak rakyat yang tidak sanggup membayar pajak akibat depresi ekonomi (Malese). La Kare dan La Ode Buntu dituduh oleh Belanda menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. ¹⁴⁾ Tuduhan lainnya adalah menghina *Pastor Spels* yang pada saat itu mendirikan gereja dan sekolah di Lasehao (pedalaman Muna). ¹⁵⁾ La Kare dan La Ode Buntu ditangkap Belanda, organisasinya dibubarkan dan sekolahnya ditutup. Mereka ditahan di Raha selama 2 bulan kemudian diasingkan. La Kare diasingkan ke Makassar (6 bulan) kemudian ke Selayar (2 tahun) dan akhirnya ke Bulukumba (4 tahun). La Kare dipenjara 6 tahun 6 bulan lamanya. La Ode Buntu dipenjara di Makassar selama 5 tahun. Sebelumnya Zainuddin Daeng Manrapi dan Abd. Kadir dilepas dari jabatannya masing-masing sebagai HBA dan Kepala Kehutanan di Muna.

Onderafdeling Kolaka sejak lama didatangi penetap-penetap dari Sulawesi Selatan.

Perdagangan hasil hutan yang banyak didapatkan di daerah ini memungkinkan adanya hubungan-hubungan pelayaran dengan daerah-daerah lain utamanya Ujung Pandang dan Surabaya. Keadaan ini memungkinkan tumbuhnya pengaruh dari luar utamanya pengaruh Muhammadiyah dalam agama Islam yang saat sesudah 1930 amat populer di Sulawesi Selatan.

Muhammadiyah berdiri di Kolaka atas usaha dari *Mat Giri* (asal Kalimantan) seorang guru dari sekolah *Gouvernement 2 de klas* Kolaka pada 1934 bersama-sama dengan *H. Daeng Marakka Abd. Rahim* dan *M. Sanusi*. Muhammadiyah Kolaka diikuti pula dengan pandu Hisbul Wathan. Kegiatan utamanya ialah dakwah Islamiyah dengan membawa pikiran-pikiran baru dan pemantapan Islam sampai ke desa-desa dan pembinaan pemuda

14). L. M. Shalihi.

15). Muna

(kader). Dalam waktu singkat tanpa halangan ranting-ranting Muhammadiyah, telah terbentuk di beberapa tempat. Di Kolaka Utara (Wawo dan Tolala) dibentuk ranting-ranting dengan pelopor-pelopor M. Ali Kamri, M. Junus Majid dan Petta Rukka. Di wilayah Selatan Kolaka (Tangketada) dibentuk pula ranting Muhammadiyah (1939).

Muhammadiyah Kolaka tidak menampakkan usaha-usaha yang radikal yang dapat dinilai politis oleh Belanda sehingga tidak memperoleh rintangan seperti di Muna. Usaha-usahanya betul-betul terbatas pada dakwah Islamiyah tanpa menampakkan radikalisme baik terhadap pemerintah maupun terhadap Zending yang berpusat di Mowewe yang masuk dalam wilayah onderafdeling Kolaka. Usahnya yang menonjol adalah pembinaan pemuda (kader) dalam kepanduan Hisbul Wathan disamping misi modernisasinya.

2. PSII.

Kesadaran dan aspirasi politik muncul dari kalangan kaum terpelajar yang di Sulawesi Tenggara berpusat pada kalangan pegawai pemerintah. Sesudah golongan pegawai terlihat pula kesadaran/aspirasi politik pada golongan pedagang yang karena terjadinya interaksi ekonomi dalam versi modern beberapa diantaranya dapat dikategorikan sebagai kaum terpelajar apalagi jika ditinjau dari segi pengaruh agama Islam.

Kedua golongan ini (pegawai, pedagang) dapat mengikuti perkembangan di luar Sulawesi Tenggara sesuai dengan profesi masing-masing. Sulawesi Tenggara pada saat sebelum Perang Dunia II adalah daerah "baru" yang dianggap terpencil sekali dan merupakan "daerah pelosok" Indonesia yang menjadi sarang malaria terutama Kolaka dan Muna. Ke daerah inilah pegawai-pegawai pemerintah Sulawesi Selatan yang dianggap Belanda berbahaya karena kesadaran dan aspirasi politiknya di "asingkan". Kesini pula beberapa orang swasta (pedagang) yang merasa dirinya terbatas gerakannya ditempatnya semula bermukim dan merasa lepas dari kungkungan terhadap aspirasi dan idealismenya. Walau mereka berada di tempat yang terasing hubungan mereka keluar tidak dapat dibendung sama sekali. Hubungan dengan luar Sulawesi Tenggara yang tetap hidupkan aspirasi politik mereka adalah melalui surat-surat kabar utamanya surat-surat kabar yang dikategorikan Be-

landa sebagai surat kabar "merah". Di Kolaka pernah *Controleur* Belanda mengumpulkan pegawai yang berlangganan surat kabar demikian dan diancam agar mereka berhenti berlangganan surat kabar.

Dikhawatirkan mereka dapat menghasut rakyat untuk bangkit melawan kekuasaan Belanda. Mereka ini kebanyakan dari PSII dan PNI yang walaupun organisasinya tidak terbentuk tetapi merupakan anggota-anggota/aktifis tersiar.¹⁶⁾

Namun demikian di desa Lasusua (Kolaka Utara) pada 1935 terbentuk organisasi *PMI (Pemuda Muslimin Indonesia)* yaitu organisasi bawahan PSII. Organisasi ini dibentuk oleh seorang pensiunan polisi yaitu *Abd. Rahim Daeng Nompo*. PMI pada 1937 membuka sebuah Sekolah Dasar Islam di Lasusua dengan nama Sekolah Arab. Sekolah Arab kemudian dibuka pula di Latou (Kolaka Utara).

Sesudah 3 tahun *Abd. Rahim Daeng Nompo* membina kader dalam PMI maka dibentuklah cabang PSII di Lasusua. Pembentukan cabang PSII di desa Lasusua merupakan fasilitas istimewa dari Pengurus Pusat PSII dengan melihat aspirasi rakyat setempat. *Sangaji* yang merupakan tokoh PSII di pusat pernah berkunjung ke Lasusua langsung dari Makassar (Ujung Pandang) dengan diantar oleh *H. Idrus, La Hia Daeng Gasing* dan *Suleman* yaitu tokoh-tokoh PSII Sulawesi Selatan pada waktu itu.

Sangaji dalam kesempatan ke Lasusua (Cabang PSII di Kolaka Utara) memberikan semangat juang pada anggota-anggota PSII untuk berjuang mencapai Indonesia merdeka.

Pada saat itu pula Pemerintah Belanda hampir menangkap pimpinan PSII cabang Lasusua dengan dalih bahwa di Kolaka sendiri sebagai ibukota Onderafdeling tidak berdiri partai PSII mengapa pula di desa PSII dibentuk. Kemudian HBA (*Hulp Bestuur Assistent*) *Abd. Waris* dikirim ke Lasusua untuk mengawasi dan meneliti PSII Cabang Lasusua. Tetapi ternyata HBA *Abd. Waris* adalah seorang simpatisan (malah anggota) PSII.

Pada 1939 beberapa anggota PSII di Lasusua membentuk PENYADAR yang berdasar pada adanya perpecahan (perbeda-

16). Ch. Pingak.

an pendapat) di antara pimpinan organisasi pusat PSII. Walaupun kenyataannya terbentuk dua aliran (PSII dan Penysadar) namun tidak terlihat konfrontasi antara keduanya. Keadaan ini (PSII dan Penysadar) berlangsung sampai Jepang melarang semua organisasi politik.

Tokoh-tokoh PSII (dan Penysadar) di Lasusua (Distrik Patampanua, Onderafdeling Kolaka, Afdeling Loewoe en Onderhoorigheden) adalah:

- 1). Abd. Rahim Daeng Nompo
- 2). M. Junus Makkajareng
- 3). Halide
- 4). Usman (Usmana)
- 5). Ibrahim Daeng Massiara
- 6). M. Arsyad
- 7). Yasir
- 8). dan lain-lain.

Distrik Patampanua mempunyai kedudukan tersendiri dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tenggara pada waktu itu:

- a. Secara struktur pemerintahan Onderafdeling Kolaka terpisah dari kesatuan Sulawesi Tenggara karena termasuk dalam Afdeling Luwu dan daerah takluknya dan Swapraja (*Zelfbestuur*) Luwu. Sedangkan wilayah Sulawesi Tenggara lainnya bersatu dalam Afdeling Buton dan Laiwui yang meliputi *Zelfbestuur* Buton dan *Zelfbestuur* Laiwui.
- b. Penduduk Distrik Patampanua (ibu kotanya Lasusua) kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan (pemukim baru) terutama orang Bugis dari Luwu dan Bone disamping penduduk asli. Golongan elite (pedagang dan pegawai) adalah golongan pemukim baru itu.
- c. Distrik Patampanua banyak menghasilkan kopra, rotan, damar dan lain-lain, yang langsung dipasarkan keluar oleh pedagang setempat. Hubungan dagang keluar ini (Sulawesi Selatan dan Jawa) membawa pengaruh potensial dalam kesadaran/aspirasi politik pada penduduk setempat.

PSII secara organisatoris hanya terbentuk tingkat (cabang) di Lasusua. Di daerah lain dalam Sulawesi Tenggara tidak terbentuk walaupun di beberapa tempat terdapat simpatisan/anggota tersiar. Di Kendari dan Muna aspirasi politik (golongan Islam) disalurkan melalui Muhammadiyah, walaupun organisasi ini bukan partai politik, sehingga kegiatan Muhammadiyah Kendari dan Muna mendapatkan pengawasan ketat dari Belanda. Tabligh (rapat, dakwah) mereka setiap saat dihadiri/diawasi. Di Raha (Muna) malah dua orang tokoh muhammadiyah ditangkap dan diasingkan (La Kare 6½ tahun, La Ode Buntu 5 tahun). Penganjur dan pencetus Muhammadiyah Muna Zainuddin Daeng Manrapi (HBA) dan Abd. Kadir (Kepala Kehutanan) dilepas dari jabatannya, sedangkan Akhmad Makkarasuu yang bekerja sebagai guru di Kendari dan merupakan penganjur dan pendiri Muhammadiyah Kendari dinyatakan sebagai *persona non grata* oleh Raja Laiwui atas tekanan Belanda dan dipindahkan dari Kendari. Di Buton pendirian organisasi Muhammadiyah dilarang oleh Sultan Buton atas tekanan Belanda, dimana A. Makkarasuu sebagai salah seorang pengambil inisiatif dan harus meninggalkan Buton (pindah ke Kendari).¹⁷⁾

Kenyataan-kenyataan ini membuktikan bahwa Muhammadiyah pada kurun waktu 1929 - 1937 di Sulawesi Tenggara mempunyai aspirasi dan orientasi politik yang identik dengan aspirasi dan orientasi suatu partai politik.

3. Parindra

Bau-Bau merupakan tempat kedudukan Asisten Residen Afdeling Buton dan Laiwui yang juga merupakan ibukota Kesultanan Buton. Keadaan ini sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan politik pemerintah Belanda dan juga mewarnai corak aspirasi politik rakyat dalam kaitannya dengan kebangkitan Nasional di daerah. Pandangan politik Belanda dan aspirasi rakyat merupakan dua sumbu yang berhadapan saling berlawanan arah. Di ibukota Bau-Bau sebagai pusat pemerintahan, poros atau sumbu pandangan politik pemerintah Belanda akan lebih waspada dan keras karena keadaan ibukota akan langsung menghimbasi wilayah-wilayah bawahan. Penekanan Belanda pa-

17). La Ero.

da pimpinan Swapraja setempat (Sultan Buton) akan terasa lebih tegas dari wilayah-wilayah bawahan (onderafdeling). Juga di Bau-Bau lebih banyak golongan pegawai pemerintah dibandingkan di daerah-daerah lain dimana secara kenyataan terlihat bahwa sumber kesadaran dan aspirasi politik Sulawesi Tenggara di sekitar dan sesudah 1930 berporos pada golongan pegawai pemerintah. Ada yang terang-terangan melibatkan diri dalam suatu organisasi ada pula yang bergerak di belakang layar sebagai penganjur dan pelopor.

Di Bau-Bau sejak lama bermukim pendatang-pendatang dari Bugis Makassar dan mempunyai kedudukan tersendiri dalam kegiatan ekonomi dan agama. Mereka mempunyai kepemimpinan sendiri yang terpusat pada seorang *Kapita*. Corak keislaman mereka agak sedikit berbeda dengan aliran tasauf Islam yang telah tiga abad menjadi anutan rakyat dan landasan pemerintahan Sultan Buton. Mereka mendirikan mesjid di Bau-Bau disamping mesjid tua yang ada dalam kraton Buton. Beberapa pelaksanaan syariat agama berbeda di antara kedua mesjid itu. umpamanya sembahyang Idul Fitri di mesjid Kraton dilaksanakan pada waktu yang diperkirakan bersamaan dengan sembahyang Ied di Mekkah (kira-kira jam 12) sedangkan di mesjid Bau-Bau pada waktu pagi hari. Perbedaan ini lebih membekas setelah aliran Muhammadiyah di Bau-Bau menjelang 1930. Pada saat itu perbedaan kedua aliran agama yang masing-masing berpusat pada kedua mesjid tersebut diatas lebih menonjol.

Dengan turun tangannya Sultan Buton demi menjaga keamanan dan kestabilan masyarakat, Muhammadiyah dilarang didirikan di Bau-Bau. Pada saat itu pengikut-pengikut Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara mempunyai aspirasi dan orientasi politik.

Kadaan ini tersalur kemudian dengan didirikannya cabang *Parindra* di Bau-Bau suatu organisasi politik yang menganut sikap koperasi. Ke dalam organisasi ini tergabung aspirasi dari kesadaran politik baik dari kalangan penduduk asli Buton maupun golongan yang berasal dari kalangan pendatang. Pimpinan-pimpinannya kebanyakan berasal dari pegawai pemerintah Belanda maupun swapraja antaranya: ¹⁸⁾

18). La Ero.

- 1). Laode Trom (Toromu) Klerk Swapraja
- 2). Lampou (Polisi)
- 3). Abd. Samad (Swasta)
- 4). La Ode Muh. Rusli (guru)
- 5). La Ode Abd. Majid (guru)
- 6). La Ode Bosa.

Gerakan politik dari Parindra tidak ada yang menonjol, kecuali membawa misi modernisasi kepada rakyat dan sosial kontrol tidak langsung pada pemerintah¹⁹⁾ Sedikit banyaknya pada saat itu di Bau-Bau telah timbul suatu kesadaran berorganisasi. Le Ode Manarfa dan La Ode Nafsahu berusaha mendirikan organisasi kepanduan NIP (Nederlandsch Indische Padvinderij) tetapi tidak memperoleh simpati banyak dari kalangan pemuda. Keduanya adalah anak Sultan Buton pada waktu itu (Sultan Buton terakhir La Ode Muh. Falihi). Dari kalangan guru-guru dengan koordinator Abd. Latif didirikan organisasi VOB (*Volks Onderwijzer Bond*) dan OSV (*Onderwijzer Sport Vereniging*).

Buton sebagai wilayah kepulauan mempunyai sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pedagang/pelayar. Perahu-perahu layar mereka merupakan alat pengangkut perdagangan antara pulau yang cukup potensial di Indonesia bagian Timur. Sebelum 1938 merek ini tergabung dalam *RUPELIN* (Rukun Pelayaran Indonesia) yang berpusat di Surabaya dibawah pimpinan *Najamuddin Daeng Malewa* yang saat itu menjabat sebagai Kepala Duane.²⁰⁾

Najamuddin Daeng Malewa adalah anak dari Abd. Rahim, Kapitana (Bugis) di Bau-Bau. H. Abd. Rahim bersaudara dengan H.A. Karim, Imam masjid Bau-Bau yaitu bapak dari Komisariss Besar Polisi M. Jasim.

RUPELIN dianggap menyaingi kapal-kapal Belanda dalam lalu lintas perdagangan di Indonesia bagian Timur dalam hubungan wilayah ini dengan Surabaya dan malah dengan Singapura.

Pada 1938 perahu-perahu layar *RUPELIN* ditahan dan dila-

19). La Ode Maane Bolu, B.A.

20). La Ero

rang berlayar dengan dalih menyelundupkan teh ke Singapura. ²¹⁾ Banyak perahu layar kepunyaan rakyat Buton ditahan di pelabuhan Bau-Bau dan nakhoda-nakhodanya ditangkap.

Suatu yang penting untuk diungkapkan adalah pada 1938 pimpinan (Leider) CVO di Bau-Bau *M. Harimpat* (asal Manado) mengajarkan lagu *Indonesia Raya* pada murid-muridnya dengan persyaratan tidak boleh dinyanyikan di luar sekolah. ²²⁾ Larangan ini dipegang teguh oleh para siswanya karena takut ditangkap Belanda.

Dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang berlandaskan kesadaran politik dan berorganisasi di Bau-Bau sebegitu jauh tidak ada penangkapan-penangkapan. Namun tindak tanduk dari mereka yang dianggap sadar politik selalu diikuti.

Di kalangan terpelajar di Bau-Bau sebelum Perang Dunia II banyak beredar surat-surat kabar yang terbit di Jakarta (Betawi), Surabaya, Makassar, Medan dan Padang. ²³⁾ Hal demikian ini merupakan tanda adanya kesadaran politik.

E. KEADAAN DI SULAWESI TENGGARA MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA.

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat.

Baru saja Belanda berhasil secara keseluruhan menetralsir gerakan-gerakan organisasi yang mempunyai aspirasi politik di Sulawesi tenggara (1938) meletuslah Perang Dunia II. Segera Negeri Belanda diduduki Jerman. Di Pasifik Jepang sebagai sekutu Jerman mengobarkan Perang Asia Timur Raya dan tentaranya dengan cepat sampai di pintu Indonesia. Dalam keadaan ini Belanda merasa ragu akan sikap rakyat yang baru saja berhasil dinetralsir aspirasi politiknya. Belanda berkesimpulan bahwa pada dasarnya rakyat Sulawesi Tenggara tidak menyukai kehadirannya. Penjajahan Belanda atas Sulawesi Tenggara yang praktis baru bermula pada 1906 dan mendapat tantangan-tantangan keras, baru saja dapat dirampungkannya secara menyeluruh pada 1927 sehingga pemerintahan si-

21). La Ero.

22). La Ode Maane Bolu B.A. siswa CVO pada waktu itu.

23). La Ero

pil dapat dimantapkan pada 1928. Hasil pasifikasi ini kemudian diganggu lagi gerakan-gerakan beberapa organisasi yang mempunyai aspirasi politik sejak 1930 yang memuncak pada 1935 - 1938.

Kesadaran bahwa pada hakekatnya rakyat Sulawesi Tenggara termasuk di antaranya pegawai pemerintah tidak menyukai kehadirannya membuat Belanda mengambil sikap keras dalam pemerintahannya yang dibarengi kampanye kehebatannya. Tindakan Belanda pada rakyat lebih tegas dan keras sambil mengedarkan selebaran-selebaran yang di antaranya berbunyi: "Hidup Marine Belanda", Belanda tak kenal menyerah, yang tentunya dengan maksud supaya rakyat percaya pada kekuatan militer Belanda dan rakyat tidak dimasuki propaganda musuh (jepang).²⁴⁾

Dalam menghadapi perang Pemerintah Hindia Belanda membentuk kesatuan-kesatuan siaga yaitu:

- a. Stadswacht²⁵⁾ pada Juli 1941 (Bau-Bau).
- b. Penjaga Pantai²⁶⁾ (Kendari)
- c. Rode Kruis²⁷⁾ pada Agustus 1941 (Kendari).

Rode Kruis (Palang Merah) di Kendari beranggotakan 780 orang dengan pimpinannya *Saido Johansyah*. *Stadswacht* dibentuk dengan inti anggota para pegawai pemerintah.

Menjelang kedatangan Jepang orang-orang Belanda dan tentara KNIL ditarik dari Buton dan Muna ke Makassar, sedangkan di Kendari masih ada beberapa orang Belanda dengan sepasukan tentara KNIL. Adanya tentara KNIL dan beberapa orang Belanda (termasuk para pendeta) di Kendari mungkin dengan pertimbangan bahwa dalam keadaan mendesak mereka dapat mundur ke pedalaman dan seterusnya menyeberang ke Sulawesi Selatan.

Sebelum kedatangan Jepang Belanda menangkap tiga orang Jepang yang sejak lama bermukim di Sulawesi Tenggara dan merampas semua miliknya. Ketiga orang Jepang itu yang telah kawin dengan penduduk setempat adalah: K. Oda di Bau-Bau,

24). Muna
25). La Ode Maane Bolu B.A.
26). Hama.
27). Dalami

(Buton), Nobuo Osyidari di Raha (Muna), dan Maeda di Kendari.

Pada waktu akan ditangkap N. Osyidari berpakaian lengkap (militer). Karena dia adalah perwira Jepang dan lebih tinggi pangkatnya dari Kontrolur Muna di Raha, maka dia menyekatkan diri dan dilucuti oleh Asisten Residen di Bau-Bau. Mungkin Maeda juga seorang perwira Jepang²⁸⁾, demikian pula K. Oda, tetapi sekurang-kurangnya mereka telah tahu akan rencana Jepang dan membantunya.

Menjelang kedatangan Jepang praktis Belanda tidak mempunyai kesiagaan militer malah cenderung untuk meninggalkan dan mengosongkan Sulawesi Tenggara. Yang ditinggalkan di Kendari hanya sepasukan KNIL dengan persenjataan minim (tanpa senjata berat) walaupun Belanda menyadari arti strategis Kendari ditinjau dari sudut taktis militer.

2. Keadaan masyarakat.

a. Sosial Ekonomi.

Menjelang Perang Dunia II kedudukan Pemerintah Belanda telah mantap sekali di Sulawesi Tenggara. Aspirasi tradisional yang pernah menentang kehadiran Belanda pada sekitar 1906 telah lenyap sama sekali. Aspirasi kaum pergerakan yang muncul pada sekitar 1930 telah dapat dinetralisir melalui ancaman-ancaman dan tindakan-tindakan tegas, walaupun idealismenya tidak dapat dipadamkan sama sekali malah telah mewarnai kehidupan masyarakat.

Masyarakat tradisional baik sistem maupun pola wawasannya dapat dikatakan telah lenyap sama sekali. Yang tinggal hanyalah sisa-sisa feodalisme yang dengan maksimal dipergunakan oleh Belanda dalam melaksanakan pemerintahannya. Sisa-sisa feodalisme yang terwujud di sekitar istana raja-raja setempat yang juga terdapat pada wilayah-wilayah bawahan merupakan alat Belanda dalam menghadapi masalah-masalah yang bersumber dari sistem masyarakat tradisional yang tidak menerima Belanda dan kemudian untuk menghadapi kaum pergerakan.

Transformasi sosial yang begitu laju dalam kurun waktu

28). M. Said.

kurang dari 40 tahun yang bermula pada perombakan lembaga pemerintah wilayah bawahan kerajaan-kerajaan dan sistem pembayaran pajak per kapita amat dipengaruhi oleh dikenalnya pendidikan modern, perhubungan dan perdagangan yang bertempo tinggi, munculnya golongan pegawai pemerintah yang bersamaan dengan pengenalan akan sistem organisasi (sosial maupun politik). Hal yang amat menentukan adalah adanya kecenderungan menuju modernisasi dari kaum pergerakan utamanya Muhammadiyah yang menerobos sampai ke desa-desa. Kedatangan Misi Katolik (Muna) dan Zending Protestan (Kolaka, Kendari, Moronene) yang dipimpin oleh pendeta/pastor Belanda turut membawa alam "modern" ke pedalaman Sulawesi Tenggara.

Masyarakat tradisional yang *homogen* sebelum 1906 telah digantikan oleh masyarakat yang *heterogen* yang timbul di kota-kota karena timbulnya golongan pegawai (pamongpraja, guru, polisi dan lain-lain) yang multi suku. Golongan pegawai ini menjadi golongan elite baru menggantikan elite tradisional sebelumnya. Golongan elite dalam masyarakat merupakan sumber gerakan dan interaksi masyarakat yang amat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

Dalam keadaan inilah terwujudnya kekuasaan Pemerintah Belanda dan lancar dan aman menjelang Perang Dunia II. Keadaan ekonomi begitu meyakinkan setelah Depresi Ekonomi dapat dilalui. Hasil hutan laut dan pertanian dapat dipasarkan dengan baik karena lancarnya hubungan. *Onderneming* kelapa di Buton Utara telah berproduksi sejak 1925, kayu jati di Muna telah diolah secara modern. Di Buton dibuka tambang aspal sedangkan di Pomalaa (Kolaka) ada tambang nekel. Pemerintah memberi bimbingan pertanian pada rakyat sehingga produksi dapat ditingkatkan. Orang Tolaki yang hidup berladang dengan merombak hutan dibimbing untuk bersawah.

Kemajuan di bidang ekonomi ini tidak dapat dinikmati oleh rakyat banyak secara maksimal dan langsung karena potensi ekonomi mereka tidak punya. Kehidupan ekonomi dikuasai oleh orang Belanda dan Cina, sedangkan rakyat hanya merupakan pengumpul atau peramu. Disamping Belanda dan Cina (asing) perdagangan banyak pula terletak dalam tangan pendatang (pemukim baru) dari Sulawesi Selatan (Bugis). Kecuali di Buton banyak juga penduduknya yang hidup dari perda-

gangan dan pelayaran. Di Laiwui (Onderafdeling Kendari) orang-orang Cina banyak yang bermukim sampai kepedalaman, sedangkan orang Bugis banyak yang menetap di Tiworo. Kendari Selatan, Poleang, (Moronene) dan Kolaka Utara. Kota Kendari kemudian Bau-Bau sejak lama ditempati oleh orang-orang dari Sulawesi Selatan (Bugis).

Dengan pecahnya Perang Asia Timur Raya kestabilan sosial mulai terganggu. Hal ini bersumber dari kalangan Pemerintah Belanda sendiri yang rupanya karena pengalamannya dalam menghadapi aspirasi masyarakat tradisional (menentang kehadiran Belanda) dan kaum pergerakan masih tidak percaya pada rakyat Sulawesi Tenggara sebagai kawulanya. Belanda ragu bahwa rakyat akan terkena propaganda Jepang sehingga dapat membahayakan Belanda dari dalam. Apalagi saat itu telah ada beberapa orang Jepang yang sejak lama menetap di Bau-Bau, Raha dan Kendari yang kemudian dinyatakan sebagai mata-mata Jepang malah sebenarnya adalah perwira tentara Jepang. Bertolak dari keraguan ini Belanda di beberapa tempat bersikap lebih keras terhadap rakyat dan membuat selebaran-selebaran yang menggambarkan kekuatannya.²⁹⁾

Di sementara tempat (Muna) timbul golongan masyarakat yang mengharap supaya dengan segera Jepang datang dan mengusir Belanda.³⁰⁾ Harapan ini bukan dilandasi kesukaan akan Jepang tetapi mengharapkan akan adanya suatu perubahan dalam pemerintahan sekurang-kurangnya untuk mengurangi pajak yang amat berat itu. Keadaan ini timbul karena pengalaman akan kejamnya Belanda sejak kedatangannya di Muna. Beberapa bangsawan Muna yang menentang kehadiran Belanda dan pembayaran pajak menderita malah ada yang ditembak (terbunuh) dan kemudian dua orang pemimpin Muhammadiyah Muna dibuang oleh Belanda. Sampai runtuhnya Pemerintah Hindia Belanda pajak di Muna dirasakan oleh rakyat amat berat. Pulau Muna adalah pulau yang tidak subur sehingga penghasilan rakyat amat rendah.

Pada saat itu di Sulawesi Tenggara adalah daerah yang banyak mengeluarkan hasil, yaitu:

29). Muna

30). Muna

- 1). hasil hutan : rotan, damar, kayu.
- 2). hasil laut : rumput laut, lola, ekor ikan yu, mutiara dan teripang.
- 3). hasil pertanian : kelapa (kopra), kapok, kopi, ternak (kulit/tanduk kerbau).
- 4). hasil tambang : aspal dan nekel.

Ditinjau dari segi hasil ini Sulawesi Tenggara adalah daerah makmur. Tetapi rakyat pada umumnya hidup dengan serba keterbatasan sehingga banyak diantaranya yang tidak dapat membayar pajak.

b. Pendidikan.

Pada sekitar 1940 sekolah-sekolah telah dibuka sampai di pedalaman yaitu distrik/onderdistrik dan di beberapa desa. Sekolah-sekolah ini adalah Sekolah Rakyat (Volkschool) yang lama belajarnya 3 tahun. VVS (Vervolgschool) yang berkelas 2 sebagai sambungan dari VS hanya sebanyak 5 buah yaitu Bau-Bau (Buton), Raha (Muna), Kolaka, Kendari dan Watotobi (Kendari). Sekolah lanjutan hanya 2 buah yaitu CVO (Sekolah Guru 2 tahun) di Bau-Bau dan Sekolah Landbouw (2 tahun) di Wawotobi (Kendari)

Zending juga banyak membuka sekolah-sekolah di desa (Sekolah Rakyat 3 tahun) demikian pula Misi Katholik di Muna. Pada 1940 di *Onderafdeling* Muna (7 Distrik) terdapat 12 VS, 1 VVS dan 2 VS Misi. Di Kolaka yang terdiri dari 3 Distrik terdapat 5 VS, 1 VVS dan 8 VS Zending. Di Kendari terdapat sebuah HIS kepunyaan Zending disamping beberapa VS yang dibukanya di desa-desa dalam *Onderafdeling* Kendari. Dalam wilayah Buton terdapat pula beberapa sekolah kepunyaan Zending di daerah Moronene.

c. Agama

Agama Islam mengalami gelombang kemajuan dalam sudut pemantapan ajarannya sejak akhir abad ke-19. Pemantapan ini terutama terjadi di pedalaman daratan jazirah tenggara pulau Sulawesi (Kendari, Kolaka). Islam telah menjadi anutan seluruh rakyat, tetapi pedalaman ajaran dan syariat belum berwujud secara rampung. Kemajuan pemantapan Islam ini ter-

jadi karena pengaruh pendatang pemukim baru Sulawesi Selatan yang dapat mencapai daerah-daerah pedalaman, sebagian besar karena aktifitas perdagangannya.

Pada sekitar 1930 muncullah Muhammadiyah yang membawa modernisme Islam yang hanya mendapat pengikut utamanya para pemuda. Kepanduan Hisbulwathan, merupakan wadah yang amat banyak menarik kaum muda Islam. Era 1930 sampai datangnya Jepang agama Islam di Sulawesi Tenggara merupakan masa pematangan dan kebangkitan Islam setelah mengalami kemerosotan dalam arti praktisasi dalam kehidupan sosial sebagai akibat keruntuhan sendi-sendi masyarakat tradisional sejak kedatangan Belanda (1906). Hal ini terjadi karena gambaran masyarakat tradisional pada waktu itu adalah masyarakat yang diwarnai malah berdasarkan Islam. Kerajaan Buton adalah suatu Kesultanan berdasar Islam dimana Islam menjadi sendi politik, sosial dan budaya. Setelah campur tangan Belanda praktisasi Islam dalam kehidupan politik, sosial dan budaya mengalami hantaman dan merosot praktisasinya sejalan dengan keruntuhan sendi-sendi masyarakat tradisionalnya. Tetapi di Buton modernisasi Muhammadiyah tidak mendapat sambutan baik dari kalangan masyarakat sehingga hanya terbatas pada golongan-golongan tertentu di kota Bau-Bau. Malah Sultan Buton atas tekanan Belanda melarang berdirinya Muhammadiyah secara organisatoris.

Namun demikian secara keseluruhan modernisme Muhammadiyah membawa angin baru dalam kehidupan masyarakat. Elite besar adalah pengikut sekurang-kurangnya simpatisan dari Muhammadiyah.

Pemerintah Belanda pada sekitar 1930 menetapkan wilayah kegiatan Zending (Protestan) yang terbatas pada daratan jazirah Tenggara pulau Sulawesi, sedangkan Misi (Katholik) terbatas pada pulau Muna. Zending dikenal sejak 1915 sedangkan Misi Katholik pada 1912. Namun sebelumnya agama Kristen telah masuk ke Sulawesi Tenggara sejak masuknya Belanda yaitu melalui para pegawai di tiap ibukota Onderafdeling. Gerakan Misi dan Zending dibarengi dengan pendidikan Misi sosial lainnya. Pada saat itu hampir seluruh penduduk Sulawesi Tenggara telah menganut agama Islam, walaupun kemantapan ajarannya dan syariatnya belum dihayati di sementara tempat di pedalaman termasuk daerah Moronene.

Zending kemudian berkembang sehingga daratan jazirah Tenggara pulau Sulawesi dibagi atas empat wilayah (ressort) pekabaran Injil yaitu;

- 1). Mowewe (Kolaka)
- 2). Sanggona (Kolaka)
- 3). Lambuya (Kendari)
- 4). Taubonto (Moronene - Buton).

Sampai pada pecahnya Perang Dunia II yaitu sesudah hampir 30 tahun kehadiran Zending dan Misi, pimpinan gereja/ressort masih tetap dalam tangan Pastor/Pendeta Belanda. Keadaan ini hampir-hampir saja berakibat fatal atas kehidupan agama Kristen (Katholik dan Protestan) di Sulawesi Tenggara pada waktu pendudukan Jepang. Jepang menganggap agama Kristen identik dengan Belanda sehingga amat dikekang dan dicurigai malah dilarang mengadakan kebaktian.³¹⁾

3. Sikap masyarakat terhadap Pemerintah Belanda

Pada dasarnya rakyat menolak kehadiran Belanda untuk memerintah secara langsung di Sulawesi Tenggara. Sebelum 1906 Kerajaan Buton dan Laiwui telah beberapa kali menandatangani perjanjian dengan Belanda, malah sejak zaman VOC. Perjanjian pertama dengan Belanda ditandatangani oleh Sultan Buton IV pada 1613. Perjanjian-perjanjian tersebut dianggap pada mulanya sebagai perjanjian persahabatan dan saling menolong. Kemudian pada zaman Hindia Belanda sesudah 1800 makna perjanjian itu menempatkan Belanda sebagai saudara tua. Sesudah pertengahan abad ke-19 kerajaan Buton dan Laiwui juga Luwu yang membawahi Mekongga (Kolaka) merupakan wilayah Hindia Belanda (*Lang Contract*) tetapi pemerintahan tidak dicampuri secara langsung. Tidak ada penempatan personil pemerintah Hindia Belanda. Tetapi sesudah 1906 apalagi setelah ditandatangani Perjanjian Pendek, Belanda secara langsung dengan dukungan tentaranya mencampuri pemerintahan. Hal ini tidak dapat diterima begitu saja oleh rakyat utamanya golongan elite tradisional. Namun Belanda berhasil memaksakan kehendaknya.

31). Dr. MC. Jongeling, op.cit.

Pada sekitar 1930 kesadaran politik secara pelan telah merambat masuk Sulawesi Tenggara yang tercetus dalam beberapa organisasi. Gerakan Kebangkitan Nasional ini memuncak pada 1935 - 1938. Dengan usaha maksimal Belanda dapat menetralsir gerakan yang berorientasi politik kemerdekaan Indonesia menjelang pecah Perang Dunia II (1938).

Warisan antipati elite tradisional yang menentang kehadiran langsung Belanda dalam pemerintahan yang disusul dengan segera oleh gerakan politik dengan orientasi Indonesia Merdeka mewarnai sikap masyarakat pada sekitar tahun 40-an. Dengan kata lain bahwa Belanda tidak disukai. Sikap ini menonjol sekali di Muna dimana masyarakat setelah pecahnya Perang Asia Timur Raya mengharap dengan segera kehadiran Jepang untuk mengusir Belanda dari sana. Bagi rakyat Muna Belanda berarti penindasan. Karena adanya Belanda maka ada pula pajak yang hampir-hampir tak dapat dibayar oleh rakyat. Tidak membayar pajak berarti penindasan.

Dengan dasar itulah maka menjelang kedatangan Jepang Belanda curiga akan mudahnya propaganda Jepang termakan oleh rakyat, sehingga perlu selebaran-selebaran yang menunjukkan kehebatan Belanda dan tekadnya tidak akan menyerah pada Jepang, dibarengi dengan tindakan-tindakan tegas jika diketahui adanya gejala pembangkangan. Sampai sebegitu jauh tidak terjadi hal-hal luar biasa baik dari rakyat maupun dari pemerintah Belanda, karena masing-masing menunggu perkembangan keadaan sebagai akibat meletusnya Perang Dunia II khususnya perang Asia Timur Raya.

4. Saat-saat terakhir Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara adalah wilayah yang dianggap "pelo-sok" dalam Pemerintahan Hindia Belanda. Sampai sebagai jauh tidak ada niat dan usaha Belanda untuk bertahan dan mempertahankan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Jepang. Tindakan pertama Belanda sesudah meletusnya Perang Asia Timur Raya adalah penangkapan orang-orang Jepang yang sejak lama bermukim di Sulawesi Tenggara (di Kendari, Raha dan Bau-Bau).

Menjelang kedatangan Jepang Belanda sudah bersiap untuk meninggalkan Sulawesi Tenggara. Malah tidak lama sebelum pendaratan Jepang di Kendari, suatu tim dari Makassar

(Ujung Pandang) datang menjemput personil Belanda.³²⁾ Dengan demikian maka pemerintahan terpusat pada pemerintahan Swapraja. Buton dan Muna dikosongkan sama sekali, sedangkan di Kendari masih tertinggal sepesukan KNIL dan beberapa personil Belanda yang juga selalu bersiap mengundurkan diri ke pedalaman dan kalau dapat menerobos ke Sulawesi Selatan. Dalam kota Kendari hanya terdapat satu peleton (lebih 20 orang) tentara KNIL.

Dalam keadaan demikian raja-raja (Kepala Swapraja) tidak mengambil suatu langkah politik, tetapi bersifat menunggu perkembangan. Pada dasarnya mereka bersama rakyat hanya menunggu akan kehadiran Jepang.

F. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

1. Propaganda Jepang

Tidak didapatkan informasi secara khusus yang menggambarkan adanya propaganda Jepang menjelang kedatangannya di Sulawesi Tenggara. Propaganda yang sedemikian rupanya dianggap tidak perlu karena rupanya dari awal Jepang telah menyadari bahwa pendudukan atas Sulawesi Tenggara tidak akan mengalami kesulitan baik dari segi militer maupun dari segi politik. Sulawesi Tenggara bagi Belanda adalah daerah pelosok yang berpenduduk jarang walaupun mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar (hasil hutan/pertanian, hasil laut dan hasil tambang).

Dalam perhitungan taktis militer Belanda yang terpusat di Jawa dengan andalan pengunduran adalah Australia, menempatkan Sulawesi Tenggara di luar jalur pertahanan strategis. Sebaliknya bagi Jepang dalam strategi ofensifnya menilai Sulawesi Tenggara khususnya Kendari sebagai tempat yang amat potensial setelah Morotai di Maluku Utara. Dalam menghadapi musuh di Australia - Morotai - Kendari dan Kupang merupakan rangkaian salah satu lini yang bersumber di Pilipina (Manila). Rupanya keadaan ini telah dinilai oleh Jepang jauh sebelum meletusnya Perang Dunia II khususnya Perang Asia Timur Raya. Dan rupanya persiapan ke arah penjajakan medan Sula-

32). Muna

wesi Tenggara yang strategis ini telah lama ditelusuri oleh Jepang.

Pada sekitar 1920 di Sulawesi Tenggara telah bermukim beberapa orang Jepang. Di Kendari datang *Tomutsu Ohitshi* (\pm 1915) dan membuka toko dan *onderneming* kelapa. Dia ini kawin dengan penduduk setempat (yang bernama Eidja) dan mempunyai 3 orang anak. Tomutsu Ohitshi meninggal pada 1930 di Kendari dan batu nisannya didatangkan dari Jepang karena rupanya dia adalah seorang perwira angkatan laut Jepang.³³⁾ Besar dugaan bahwa kedudukannya di Sulawesi Tenggara merupakan penugasan dari pemerintah Jepang. Di Buton *S. Fujita* yang berhasil memperoleh hak guna usaha tanah dari Pemerintah Belanda pada 1924. Usahanya adalah penyelaman dan pemeliharaan mutiara. Di Raha (Muna) tinggal tuan *Tani* sebagai pedagang kecil yang meninggal pada kira-kira 1930.

Kemudian menyusul pula orang-orang Jepang yang datang di sekitar 1930 yaitu:

- a. *K. Oda* di Bau-Bau yang merupakan pedagang hasil bumi khususnya hasil laut.
- b. *Nobuo Osyidari* di Raha yang hidupnya hanya berkeliling di pulau Muna dan Buton untuk menembak rusa dan sapi. Dia ini terkenal ahli tembak dan ahli mesin (perbengkelan).
- c. *Maeda* di Kendari yang membuka pabrik es.

Menjelang meletusnya Perang Asia Timur Raya beberapa kegiatan mereka ini agak luar biasa. *K. Oda* di Bau-Bau dengan *Osyidari* di Muna amat giat berkeliling pulau Buton dan muna mengamati pantai-pantai dan rawa-rawa dengan dalih usaha pembelian kayu bakau untuk dimasak kulitnya (bahan cat).

Dalam usaha ini mereka membuat peta-peta pantai, rawa, teluk yang dalam dan dangkal, tempat yang ramai penduduknya dan yang sunyi (kosong).³⁴⁾ *K. Oda* di Bau-Bau juga membeli sebanyak-banyaknya tuba yang dapat diperolehnya. *Maeda* di Kendari menerima kunjungan beberapa orang Jepang an-

330. Ny. M. Lakawa Andries B.A. (Ny. M. Lakawa Andries adalah anak dari bekas istri Tomutsu Ohitshi, suami kedua B.M. Andries).

34). Muna

taranya ada yang datang dengan pesawat terbang beberapa saat sebelum meletusnya perang. Juga Maeda mempunyai seorang pembantu bangsa Jepang yang amat dapat diduga sebagai mata-mata. ³⁵⁾

Sesudah meletusnya Perang Asia Timur Raya ketiga mereka ini (K. Oda, Osyidari dan Maeda) ditangkap oleh Pemerintah Belanda. Pada saat itulah baru diketahui bahwa ketiganya adalah intelijen Jepang malah mereka adalah perwira tentara yang rupanya sengaja ditempatkan di Sulawesi Tenggara dengan tugas khusus menyelidiki medan dan kekuatan tentara Belanda serta situasi sosial dan politik. Dari K. Oda disita oleh Belanda beberapa dokumen antaranya peta pantai pulau Muna dan Buton yang lengkap khususnya jika ditilik dari sudut kepentingan pendaratan pasukan.

Osyidari pada waktu akan menyerahkan diri (ditangkap) meninggalkan pakaian militer Jepang yang lengkap. Dia tidak mau menyerahkan diri dan dilucuti oleh Kontrolur di Raha dengan alasan bahwa pangkatnya lebih tinggi dari Kontrolur. Dapat diduga bahwa pangkat Osyidari dalam ketentaraan Jepang (Angkatan Laut?) sekurang-kurangnya Mayor atau Letnan. Kolonel. Dia kemudian menyerahkan diri pada Asisten Residen di Bau-Bau. Dalam penangkapan mereka ini semua harta bendanya dirampas walaupun mereka telah kawin dengan penduduk setempat dan telah mempunyai beberapa orang anak. Pada saat itu dua orang anak Tomitsu Ohitshi (almarhum) di Kendari ikut ditangkap dan ditawan Belanda ke Jawa (diinternir di Garut). ³⁶⁾

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Jepang telah memperoleh informasi lengkap tentang Sulawesi Tenggara yang strategis itu sebelum Perang Asia Timur Raya meletus. Informasinya begitu lengkap utamanya tentang keadaan medan yang amat dibutuhkan dan keadaan sosial politik tidak serta kekuatan militer Belanda. Dari informasi sosial politik tidak pandang perlu untuk propaganda terbuka kepada rakyat. Namun secara terselubung rupanya propaganda ini juga dijalankan.

35). Makmur.

36). Ny. M. Lakawa B.A.

2. Kedatangan pasukan Jepang

Beberapa waktu setelah serangan Jepang atas Pearl Harbour yang membuka Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik tentara Jepang telah menyerbu ke Selatan. Sasaran pertama ditujukan pada Pilipina yang dimulainya pada 10 Desember 1941. Pilipina yang dipertahankan kuat oleh tentara Amerika Serikat dibawah pimpinan Jendral Mac Arthur merupakan wilayah kepulauan yang amat diperhitungkan oleh Jepang. Kota Manila dapat direbut Jepang pada 2 Januari 1942 sedangkan Hongkong telah direbutnya beberapa hari sebelumnya yaitu 24 Desember 1941. Menjelang akhir Maret 1942 tentara Jepang telah menguasai wilayah antara kepulauan Andaman di Barat dan Midway di Timur.³⁷⁾

Serangan Jepang ke Selatan berlangsung dengan cepat walaupun sebenarnya pelawanan yang berat masih dihadapinya di Pilipina yang bermedan sulit itu yang baru dapat dirampungkannya dengan jatuhnya Bataan pada 9 April 1942, Corregidor pada 6 Mei 1942 dan Mindanao beberapa hari kemudian. Serangan kilat ke Selatan ini yang menjadi tugas dari Armada ke-2 Selatan dilaksanakan beberapa hari setelah jatuhnya Manila dengan melalui dua jalur, yaitu jalur Selat Makassar dan jalur Laut Maluku. Tarakan dan Balikpapan di Selat Makassar diduduki Jepang masing-masing pada 10 Januari 1942 dan 20 Januari 1942.³⁸⁾ Rupanya kedua tempat ini amat penting bagi Jepang karena bahan bakunya. Jalur Maluku yang dianggap penting dalam perhitungan strategis perang dalam jangka panjang, perhatian Jepang terpusat pada *Morotai* dan Kendari.

Kendari dapat diduduki Jepang pada 26 Januari 1942. Dari cara pendaratan Jepang ini dapat diketahui bahwa Jepang sebelumnya telah mendapatkan informasi lengkap tentang Sulawesi Tenggara, khususnya medan Kendari. Pendaratan Angkatan Laut Jepang ke Kendari dipimpin oleh Nakamura.³⁹⁾ Kota Kendari yang terletak dalam teluk yang indah dengan pintu keluar seakan tertutup dari luar (sempit) didarati tentara

37). Alfred Vagts, *Landing Operations*, 1952, hal. 650.

38). Sartono Kartodirjo, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia VI* 1975, hal. 1.

39). A.M. Zahari

Jepang dari tiga jurusan. Pasukan pertama mendarat di muara Sungai Sampara (muara sungai Konawehea) di sebelah utara Kendari. Pasukan kedua mendarat di Talia di seberang teluk Kendari (di muka pasar Kendari). Pasukan pendarat pertama yang mendarat pada subuh hari di muara sungai Sampara segera menuju Kendari dengan penunjuk jalan orang Jepang yang bernama *Nagata*.⁴⁰⁾

Pasukan ini mencapai Kendari beberapa saat setelah pasukan pendarat kedua (di Talia) dan ketiga (pasar Kendari) selesai mendarat (+ jam 7 pagi).

Ketiga pasukan pendaratan ini tidak mengalami perlawanan dari pihak tentara Belanda. di Ponggolaka (km. 9) mereka bertemu dengan rombongan pendeta Zending *Gouweloos* dengan dua orang pembantunya bersama *Lasandara* Kapita Kerajaan Laiwui.⁴¹⁾

Mereka meninggalkan Kendari menuju Wawotobi. Pendeta *Gouweloos* langsung ditembak mati di tempat. Mandor jalan Hamala (orang Tolaki) dibunuh di Anggilowu. Di Mandonga (km. 8) ditemukan pula Opseter Kehutanan *van der Staar* yang juga menghindari dari Kendari karena adanya pendaratan Jepang. *Van der Staar* juga ditembak mati di tempat.⁴²⁾ Pasukan Jepang dari Sampara dalam perjalanannya memasuki Kendari mendapat perlawanan dari KNIL di Km. 3. Di sini KNIL telah membuat pertahanan sebelumnya. Terjadilah pertempuran dengan perlawanan gigih dari tentara KNIL yang kecil ini, walaupun perlawanan itu sia-sia belaka.

Hampir seluruhnya jadi korban dalam pertempuran, tetapi di pihak Jepang juga jatuh banyak korban. Sesudah menduduki kota Kendari tentara Jepang menuju lapangan terbang Kendaridua yang jauhnya lebih 30 Km dari Kendari. Dengan cepatnya Kendari diatur dan dibenahi sebagai kota yang memegang peranan penting sebagai tempat pertahanan Jepang yang amat diperkuat. Kubu-kubu dibangun di Kendari utamanya di sekitar lapangan terbang Kendaridua. Kendari disamping basis komando juga merupakan tempat bengkel dan *docking (maintenance)* serta gudang perbekalan/peralatan dari tentara Jepang.

40). Dalam

41). Dr. MC. Jongeling, op.cit., hal. 9.

42). Abd. Hamid.

Daerah lain di Sulawesi Tenggara rupanya tidak terlalu menjadi perhatian Jepang ditinjau dari segi taktis dan strategi perang. Buton dan Muna didatangi Jepang pada bulan Desember 1942. ⁴³⁾ hampir setahun sesudah pendaratannya di Kendari, sedangkan Kolaka didatangi oleh tentara pendudukan dari Sulawesi Selatan. Dari Kendari Jepang dapat menduduki Ambon pada 1 Pebruari 1942, Makassar (Ujung Pandang) 11 Pebruari 1942 dan kemudian Timor. ⁴⁴⁾

3. Sikap Jepang terhadap aparat Pemerintah Hindia Belanda

Ekspansi Jepang ke Selatan yang dalam waktu singkat menduduki Filipina, Indo Cina, Malaya dan Singapura serta Indonesia bagian Utara segera terbukti memencilkan pusat Pemerintah Hindia Belanda di Jawa. Keadaan ini telah diperhitungkan sebelumnya sehingga sejak semula Belanda telah bersiap untuk mundur ke Australia jika keadaan amat mendesak. Terbukti bahwa Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan sekutu-sekutunya tak dapat membendung kemajuan tentara Jepang. Persiapan untuk mengungsi ke Australia menjadi kenyataan. Daerah-daerah pelosok yang tak mungkin dipertahankan lagi pagi-pagi telah dikosongkan. Aparat Pemerintah Hindia Belanda segera ditarik.

Suatu tim dari Makassar telah datang menjemput semua aparat Pemerintah Hindia Belanda untuk diungsikan. Tetapi rupanya pengungsian itu belum rampun betul, Jepang telah menduduki Kendari. Masih ada beberapa aparat Belanda yang tinggal termasuk sepasukan tentara KNIL di Kendari dan para pastor di Muna serta pendeta Zending di Kendari/Kolaka.

Pada saat kedatangan Jepang praktis pemerintahan Belanda di Sulawesi Tenggara telah tidak ada. Yang ada adalah pemerintahan Swapraja (*Zelfbestuur*) yang tetap menjalankan fungsinya walaupun dalam keadaan yang amat menegangkan.

Tentara pendudukan Jepang segera menawan semua pastor/pendeta (orang Belanda) dan sisa-sisa tentara KNIL. Di Kendari dapat ditawan 6 orang pendeta bangsa Belanda dan tenta-

43). Muna / A.M. Zahari.

44). M. Yamin, Atlas Sejarah (1956), hal. 23.

ra KNIL yang terdiri dari suku Jawa dan Ambon. Semua orang Belanda (Kulit Putih) ditawan di kamp Raha (Muna) sedangkan tentara KNIL ditempatkan di Wawotobi (64 Km dari Kendari) dengan memisahkan suku Jawa dan Ambon. Juga ditawan di Wawotobi beberapa orang Cina yang dianggap pro Belanda.

Pada bulan Desember 1942 Sultan Buton bersama para pembesar kerajaannya datang di Kendari menemui Panglima pendudukan Jepang (Nakamura). Di Kendari Sultan Buton diperintahkan untuk menjalankan pemerintahan di Buton sebagaimana biasa dan diberikan 40 pucuk senjata untuk polisi kerajaan. Demikian pula di Muna dimana pimpinan kerajaan (tidak ada lagi Raja Muna) tetap menjalankan fungsinya dibawah koordinator Sultan Buton.

Di Kendari (Laiwui) Raja *Tekaka* segera mengakui kekuasaan Jepang dan tetap menjalankan pemerintahan sebagai Raja I sedangkan Kapita La Sandara ditetapkan sebagai Raja II yang berkedudukan di Wawotobi.

Tidak lama kemudian pemerintahan sipil Jepang dibentuk dengan tetap mempertahankan sistem pemerintahan Belanda sebelumnya. *Afdeling* Buton dan Laiwui dijadikan *Ken* dengan pimpinan *Ken Kanrikan* bertempat di Bau-Bau sedangkan *Onderafdeling* menjadi *Bun - Ken* dibawah *Bun Ken Kanrikan*. *Bun Ken* Kolaka tetap didalam wilayah *Ken Luwu*. Distrik dan Onderdistrik menjadi *Gun* dibawah *Gun-co* sedangkan kampung atau *Son* dikepalai oleh *Son-co*.

Walaupun strukturnya sebagai pemerintahan Sipil tetapi dalam kenyataannya merupakan pemerintahan militer yang penuh ketegasan dengan segala tindakan ditujukan kepada kesuksesan perang sehingga terwujud dalam suatu pemerintahan fasis.

4. Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia

Pada mula kehadiran Jepang kelihatan bahwa Jepang ada usaha untuk mengambil hati rakyat dan aparat pemerintahan Swapraja. La Sandara yang menjabat Kapita dalam kerajaan Laiwui yang tertangkap di Ponggolaka pada hari pendaratan Jepang tidak diapa-apakan malah kemudian diangkat sebagai Raja II yang merupakan suatu promosi dalam jabatannya. Tindakan tegas Jepang pada orang Belanda dan Cina dibarengi de-

ngan menunjukkan "hati baik" pada penduduk asli. Tetapi organisasi sosial/politik yang ada pada saat itu seluruhnya dibubarkan dan dilarang oleh Jepang.

Penganut agama Kristen amat dicurigai sebagai antek Belanda sedangkan golongan Islam didekati. Orang Kristen amat dikekang kegiatannya malah pernah dilarang mengadakan kebaktian. Sampai saat kehadiran Jepang semua pendeta Kristen dan pastor adalah orang Belanda walaupun agama ini telah memasuki Sulawesi Tenggara sejak kedatangan Belanda.

Semua sekolah Zending dan Misi diambil alih menjadi sekolah negeri (pemerintah). Tetapi pemuka-pemuka Islam (golongan Muhammadiyah) di Wawotobi diperbolehkan mendirikan sekolah *Jamiatul Muslimin*, dan beberapa pemuda Islam diluaskan untuk melanjutkan pelajaran di sekolah-sekolah Islam di Makassar (Ujung Pandang).⁴⁵⁾

Pemuda-pemuda diberikan latihan-latihan kepemudaan yang tergabung dalam *Seinendan*. Beberapa di antaranya sempat memasuki pendidikan/latihan *Heiho*.

Untuk meningkatkan produksi rakyat diberikan bimbingan dalam bidang pertanian. Penanaman kapas digiatkan. Lum-bung-lumbung desa diadakan. Namun demikian keadaan ekonomi rakyat sangat merosot karena praktis usaha perdagangan mati sama sekali.

Dalam keadaan kegawatan itu muncullah sifat asli fasis dari Jepang terhadap rakyat. Kesalahan sedikit saja dapat berakibat fatal sekali. Dalam usaha mensukseskan perangnya Jepang amat membutuhkan banyak tenaga sukarela (tanpa dibayar). Maka timbullah *romusya*.

Rakyat digilirkan setiap dua bulan bekerja pada Jepang (Romusya) untuk membangun kubu-kubu dan lapangan-lapangan terbang. Juga untuk bekerja (tanpa dibayar) pada pertambangan nikel (Pomalaa) dan aspal di Buton. Terasa sekali bahwa tenaga rakyat amat dikuras, apalagi Kendari merupakan basis Jepang yang harus dibangun dengan segala kebutuhan pertahanan dan kepentingan perang. Disamping lapangan terbang Kendaridua dibangun pula lapangan terbang yang sifatnya dirahasiakan di Muna, Moronene dan Kolaka.

45). Abd. Hamid Hasan.

Pengurusan tenaga rakyat amat memerosotkan hasil pertanian sedangkan hasil yang ada sebagian dipool oleh Jepang untuk kepentingan perangnya. Di Muna semua hasil dimasukkan di lumbung-lumbung desa yang kemudian dibagi lagi (*catuh*) pada setiap penduduk dengan rata. Hasil rakyat tidak boleh diperjual-belikan. Kalau kedapatan ada yang menjual maka fatal akibatnya. ⁴⁶⁾

Kesimpulannya bahwa pendudukan Jepang di Sulawesi Tenggara merupakan masa yang paling pahit bagi rakyat. Makan tidak cukup, tenaga dikuras, pakaian hampir tidak punya malah penyakit merupakan ancaman tersendiri. Masa itu dikenal sebagai masa ketakutan yang penuh *tuma*. Setiap kain yang dipakai penuh dengan tuma-tuma yang mengisap darah.

5. Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang

Zaman pendudukan Jepang merupakan zaman penuh siksa yaitu zaman penderitaan yang dibayangi ketakutan dan kadang-kadang menonjol dalam bentuk penghinaan atas harkat kemanusiaan. Keadaan ini tentunya menusuk-nusuk hati nurani. Tetapi keadaan ini harus diterima dengan penuh pasrah karena tidak punya daya sama sekali. Namun demikian tidak pernah timbul suatu usaha perlawanan terbuka dari rakyat terhadap Jepang. Hanya di Wanci (p.p. Tukang Besi, Wawotobi) pada 1943, rakyat dibawah pimpinan La Ode Maniru dan La Ode Abduldu menyerang *Gunco* (Kepala Distrik) Wanci yang dikawal oleh dua orang polisi. *Gunco* luka sedangkan kedua orang polisinya jadi korban.

La Ode Maniru dan Pa Ode Abduldu ditangkap Jepang dan dihukum mati dimuka umum di Wanci.

Di Kolaka Utara Tojabi yang pernah menentang Belanda dan tua sekali ditangkap Jepang dan ditawan ke Palopo. Penangkapan ini tidak beralasan sama sekali, atau mungkin merupakan gertakan pada rakyat saja. Tojabi adalah penentang Belanda yang tak dapat ditangkap dan menduduki tersendiri dalam hati rakyat setempat. Mungkin pula untuk menunjukkan pada rakyat bahwa Tojabi yang tak dapat ditangkap Belanda dapat dipenjarakan oleh Jepang. Jadi Jepang lebih hebat dari Belanda.

46). Muna

Ketegasan dan kekejaman Jepang pada rakyat ini membawa suatu efek sampingan yang bersifat positif di kemudian hari yaitu pada umpamanya rakyat terutama para pemuda mengagumi keberanian dan disiplin dari orang Jepang. Pengenalan akan alat-alat perang modern juga membawa pengaruh khusus pada kalangan pemuda, demikian pula akan praktek dan tata cara kemiliteran Jepang. Kenyataannya tentara Jepang lebih rapat pada rakyat dari tentara Belanda sebelumnya. Latihan-latihan *taiso*, *Seinendan* dan *Heiho* memberi bekas tersendiri dalam diri para pemuda.

...

2. Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang

Karena pembudayaan Jepang merupakan zaman perantara antara zaman peradaban yang dibawanya ketertarikan dan ketertarikan yang mendalam dengan kebudayaan Asia Timur. Kebudayaan ini tentunya berakar-akar pada kebudayaan Jepang keadaban ini banyak diterima dengan penuh semangat karena tidak hanya daya saing saja. Namun demikian tidak pernah timbul suatu usaha perlawanan terbuka dari rakyat terhadap Jepang. Hal ini di Wanda (G. T. Tjallingii) pada tahun 1943 rakyat dibawa pimpinan La Ode Marni dan La Ode Marni (Kepala-Desa) Wanda yang dikawal oleh dua orang polisi Gwaco laka sedangkan kedua orang polisi jadi korban.

La Ode Marni dan Pa Ode Marni diangkat sebagai pemimpin karena mereka dikawal oleh Wanda. Di Kolaka Utara Tondra yang pernah menentang Belanda dan dia sekali ditangkis karena dia ditawan ke Balikpapan. Namun dia tidak berlawanan sama sekali, akan tetapi menentang dan berlawanan pada rakyat saja. Jepang adalah pembantu Belanda yang tak dapat ditolak dan meniadakan perasaan dan nilai rakyat setempat. Mereka pada waktu menangkis dan berlawanan pada Wanda Jepang yang tak dapat ditangkis. Tetapi hal yang dipergunakan oleh Jepang tadi Jepang lebih rapat pada rakyat.

BAB V PENUTUP

Dalam Perjanjian Bungaya yang diperbaharui (1824) dimana diatur adanya Persekutuan Kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan dan Tenggara yang kepemimpinannya berada ditangan Gubernur Celebes, kerajaan Buton merupakan salah satu anggotanya. Pada saat itu hanya kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara yang dapat dikatakan besar dan kuat. Kerajaan Muna yang bersama-sama dengan Tiworo menentang Buton dibawah pengaruh Arung Bakung dan Syarif Ali baru saja dikalahkan oleh Buton. Yang menjabat Raja Muna pada waktu itu adalah Laode Ngkumabusi atas penunjukan Sultan Buton. Arung Bakung yang menguasai politik di Tiworo karena perkawinannya dengan putri Raja (Lakina) Tiworo menghindar ke Kendari, sedangkan Syarif Ali kembali ke Sulawesi Selatan.

Kerajaan Laiwui baru saja mulai muncul atas bekas kerajaan Konawe yang telah terpecah sejak wafatnya Mokole Konawe terakhir *Lakidende* (Sangia Ngginoburu) pada akhir abad ke-18. Kemunculan Laiwui bersumber dari Ranomeeto salah satu wilayah bawahan Kerajaan Konawe. Pada saat itu memerintah seorang raja perempuan *Maho* yang oleh Belanda disebut *Vorstin van Laiwui*. Maho kawin dengan La Sambawa (Lakina Lapadaku di Tiworo) yaitu anak dari Arung Bakung. Perkawinan ini memperbesar ambisi dan aspirasi kerajaan Laiwui untuk berkembang dan mempersatukan kembali wilayah-wilayah bekas kerajaan Konawe yang saat itu secara kesatuan adat masih dipimpin oleh seorang Sulemandara (semacam Perdana Menteri) tanpa Mokole (Raja).

Maho meninggal pada 1858 dan digantikan oleh anaknya *La Mangu* dengan gelar raja Kendari atau Raja Laiwui. La Mangu menanda-tangani perjanjian dengan Belanda pada 15 mei 1858 yaitu Perjanjian Panjang (Lang Contract) yang pertama kali ditandatangani oleh seorang raja di Celebes (Sulawesi Selatan dan Tenggara). Perjanjian ini juga merupakan perjanjian pertama kali dari raja di jazirah Tenggara Sulawesi dengan Belanda, sedangkan kerajaan Buton menandatangani perjanjian pertamanya pada 1613 dengan VOC.

Hubungan Laiwui (Kendari) dengan Belanda menempatkannya dalam posisi yang kuat untuk menguasai seluruh bekas kerajaan Konawe. Perjanjian Panjang ditandatangani Buton pada 1873 sedangkan Luwu yang membawahi Mekongga (Kolaka) pada 1861.

Sampai pada awal abad ke-20 di Sulawesi Tenggara olen Belanda hanya dikenal adanya dua kerajaan yaitu Buton dan Laiwui. Kerajaan Muna merupakan wilayah istimewa dari Buton, walaupun orang Muna menganggap kerajaannya sebagai kerajaan merdeka dan tidak berada dibawah Buton. Demikian pula hubungan antara Mekongga terhadap Luwu. Tetapi dalam kenyataan politik keluar harus diakui bahwa Muna adalah merupakan wilayah kekuasaan yang mempunyai otonomi dari Buton, demikian pula Mekongga dari Luwu. Muna dan Mekongga sepanjang sejarahnya tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Belanda. Setiap perjanjian antara Belanda dengan Buton terutama sejak abad ke-19 berarti pula mengikat Muna demikian pula perjanjian Luwa Belanda berarti mengikat pula wilayah Mekongga.

Kedudukan Muna terhadap Buton dan Mekongga (Kolaka) terhadap Luwu lebih jelas lagi setelah Belanda hadir dalam pemerintahan di Sulawesi Tenggara sejak 1906. Oleh Belanda hanya diakui adanya dua Swapraja (*Zelfbestuur*) di Sulawesi Tenggara yaitu Buton dan Laiwui. Raja Muna tetap ada tapi terikat dalam keperintahan Sultan Buton walaupun otonomitasnya (khususnya dalam bidang keuangan dan pemerintahan ke dalam) tetapi diakui dan dihormati. Tetapi Mekongga lebur sama sekali sedangkan rajanya (Bokeo) hanya merupakan Kepala Distrik dalam *Onderafdeling* Kolaka sedangkan pemerintahan *Zelfbestuur* Luwu diwakili oleh seorang Sulewatang di Kolaka.

Kedudukan Muna yang sulit itu dan juga ketidak-relaan wilayah-wilayah bekas Konawe menggabung ke dalam Laiwui menjadi krikil tajam dalam kelancaran kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Tenggara. Baru pada 1927 pasifikasi Sulawesi Tenggara oleh Belanda dapat dirampungkan betul-betul, sedangkan kekuasaannya telah dapat diwujutkan sejak 1917 sesudah usaha pedudukan dimulai pada 1906. Di Muna dan Kendari (Laiwui) pemerintahan militer Belanda dihapuskan pada 1928 dan digantikan dengan pemerintahan sipil.

Pada 1909 - 1927 Buton dan Laiwui dalam sistem pemerintahan Belanda tergabung dalam *Bestuur afdeling Oost Celebes* yang wilayahnya meliputi pula Bungku, Kolonadale dan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), sedangkan Kolaka tergabung kedalam *Afdeling Luwu en Onderhoorigheden* yang pada mulanya meliputi pula Poso dan Bada (Sulawesi Tengah).

Kemudian dibentuklah *Afdeling Buton en Laiwuri* dengan Asisten Residen *Baretta* yang sebelumnya menjabat sebagai *Controleur* Buton ¹⁾ Afdeling Buton dan Laiwui terbagi atas tiga Onderafdeling yaitu:

1. Buton
2. Muna
3. Kendari

Kolaka tetap dalam wilayah *Afdeling Luwu*. Patut dicatat bahwa *Onderafdeling* Muna meliputi 7 Distrik, yang 4 di antaranya adalah wilayah kerajaan Muna (wilayah otonom dari *Zelfbestuur* Buton) sedangkan 3 Distrik lainnya adalah wilayah langsung dibawah Sultan Buton.

Sultan Buton menandatangani *Korte Verklaring* pada 1912 sedangkan *Laiwui* setelah dapat mempersatukan bekas Konawe atas bantuan Belanda pada 1917. Sao-Sao dilantik sebagai *Sangia Laiwui* pada 1918 dimana dia diakui sebagai Raja Laiwui yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Konawe. Sao-Sao adalah anak La Mangu yang naik takhta pada 1871.

Ada lima tindakan Belanda yang secara langsung membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara:

1. Pembentukan distrik-distrik sebagai wilayah bawahan kerajaan-kerajaan yang menggantikan wilayah tradisional yang ada sebelumnya.
2. Pembuatan jalan-jalan yang memperlancar hubungan sampai pedalaman.
3. Pengadaan pajak.
4. Pendirian sekolah-sekolah.
5. Pemasukan pegawai-pegawai yang multi suku.

1). A.M. Zahari.

Sejak kehadiran Belanda secara langsung dalam pemerintahan Sulawesi Tenggara elite tradisional merasa terancam kedudukannya. Banyak di antaranya menentang lebih-lebih setelah pembentukan distrik-distrik dan diadakannya pajak yang dianggap amat menekan kehidupan rakyat. Ditambah lagi dengan adanya pendidikan (sekolah) dan kedatangan para pegawai dari luar yang menembus batas-batas sistem masyarakat tradisional.

Kedadaan ini membawa kegoncangan sendi-sendi kemasyarakatan tradisional yang merupakan awal dari transformasi dan mobilitas sosial menuju masyarakat baru. Kegoncangan sosial ini berlangsung sampai menjelang 1920 dimana sesudahnya benih-benih modern telah tumbuh dan mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Maka timbullah golongan elite baru menggantikan elite tradisional yaitu golongan pegawai (Hindia Belanda dan Swapraja). Golongan elite kedua diduduki oleh golongan yang mempunyai kedudukan dalam usaha perdagangan.

Kedua golongan elite ini sebagian besar pada mulanya yaitu menjelang 1930 diduduki oleh pendatang atau pemukim baru. Golongan pegawai merupakan campuran dari segala macam suku antaranya Jawa, Sumatra / Kalimantan (Melayu), Timor/Flores, Ambon, Minahasa/Sangir dan Bugis/Makassar. Kaum pendatang kebanyakan terdiri dari orang-orang Bugis disamping penduduk setempat. Golongan pegawai dari rakyat setempat juga banyak terutama pegawai Swapraja tetapi pegawai pemerintah lainnya kebanyakan dari luar karena sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara pada saat itu (1930) paling tinggi sampai kelas V (Gouvernement 2 de klass). Munculnya Zending (1915) dan Misi yang beroperasi di pedalaman membawa pengaruh tersendiri dalam rangka transformasi sosial. Wawasan baru kemasyarakatan turut berubah karena giatnya Zending dan Misi dalam bidang pendidikan di desa-desa.

Kedatangan pegawai dari luar Sulawesi Tenggara yang pelosok dan sarang malaria membawa pengaruh baru yaitu hadirnya beberapa organisasi sosial dan politik. Beberapa pegawai yang ditempatkan adalah bersifat dipencilkan karena aspirasi dan ambisi politiknya di daerah asalnya. Organisasi-organisasi dikenal di Sulawesi Tenggara sesudah Sumpah Pemuda (1928). Yang pertama dikenal adalah Muhammadiyah. Di Buton dipe-

lopori oleh van der Buiken (Pondzen Daeng Mangawing) dan Akhmad Makkarasu Amansyah Daeng Ngilau, tetapi tidak berhasil memperoleh izin pendirian dari pemerintah setempat. Namun demikian orang-orang Muhammadiyah di Buton tetap mempunyai pengaruh karena ide modernisasi.

Akhmad Makkarasu kemudian dipindahkan ke Kendari sebagai guru dan disana berhasil mendirikan Muhammadiyah pada 1930. Dalam dakwah atau tabligh Muhammadiyah Kendari terutama oleh Sekretarisnya (M. Kasim Madualeng) Islam diidentikkan dengan kemerdekaan. Dengan kata lain Muhammadiyah Kendari mempunyai aspirasi politik sehingga mendapat pengawasan ketat malah ancaman-ancaman dari Belanda. Akibatnya Akhmad Makkarasu kembali dinyatakan sebagai *persona non grata* dari Kendari (1934) dan seterusnya Muhammadiyah Kendari membekukan diri karena tekanan dan ancaman Belanda.

Di Muna Muhammadiyah disponsori oleh HBA Zainuddin Daeng Manrapi dan organisasinya dipimpin oleh Abd. Kadir Kepala Kehutanan (1930). Muhammadiyah mendapat pengikut-pengikut yang berani dan konsekwen. Muhammadiyah Muna malah mendirikan dua buah sekolah dan dakwahnya cenderung untuk menentang Pemerintah Belanda. Pada 1934 dua orang Pengurus Muhammadiyah Muna yaitu La Kare dan Laode Buntu ditangkap dengan dalih menghasut rakyat untuk membayar pajak dan dituduh menghina seorang Pastor yang mendirikan gereja dan sekolah di pedalaman pulau Muna. La Kare dipenjara dan diasingkan selama 6½ tahun sedangkan Laode Buntu dibuang selama 5 tahun. Zainuddin dan Abd. Kadir masing-masing dilepas dari jabatannya.

Di Kolaka juga berdiri Muhammadiyah yang dipimpin oleh Mat Giri seorang guru *Gouv. 2 de klass* asal Kalimantan.

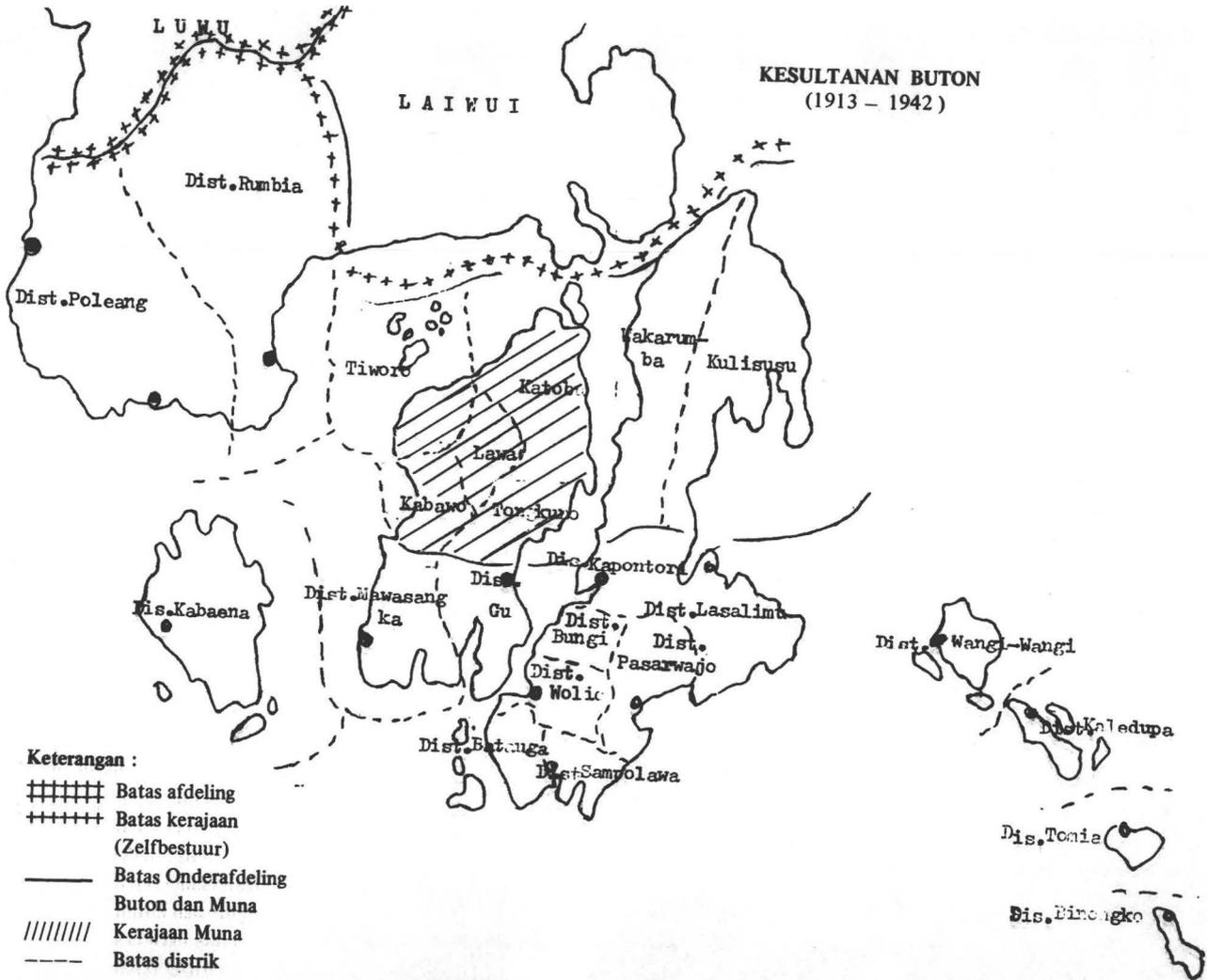
Partai politik yang pernah berdiri di Sulawesi Tenggara sebelum Perang Dunia II hanya dua yaitu PSII dan distrik Patampanua (Lasusua) di Kolaka Utara dan PARINDRA di Bau-Bau. PSII Cabang Lasusua mendapat penilikan keras dari Belanda tetapi sampai sebegitu jauh tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan politik dan tidak ada pengurusnya yang ditangkap Belanda. PSII ini dipelopori oleh seorang pensiunan polisi yaitu Abd. Rahim Daeng Nompo. PARINDRA di Bau-Bau tidak menunjukkan gerakan-gerakan yang dapat membuat Be-

landa memanggil tindakan terhadapnya.

Masa 1930 - 1938 di Sulawesi Tenggara merupakan masa timbulnya gerakan-gerakan yang berorientasi politik dengan tujuan Indonesia Merdeka. Yang menonjol dalam gerakannya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah Sulawesi Tenggara ini mempunyai keunikan karena orientasinya pada gerakan politik walaupun sebenarnya merupakan organisasi sosial. Sesudah 1938 aspirasi politik di Sulawesi Tenggara dapat dibenamkan oleh Belanda melalui tindakan-tindakan tegas (penangkapan, pembuangan) dan ancaman-ancaman.

Sesudah pecahnya Perang Asia Timur Raya Sulawesi Tenggara dapat dikatakan dikosongkan oleh Belanda sehingga dengan mudahnya tentara Jepang dapat mendarat tanpa perlawanan pada 26 Januari 1942.

Bagi Jepang Kendari adalah daerah yang paling strategis sehingga dijadikan suatu basis pertahanan yang tangguh dan kuat. Dibawah pemerintahan fasisme Jepang rakyat Sulawesi Tenggara amat menderita lahir batin.



Keterangan :

- ||||| Batas afdeling
- +++++ Batas kerajaan (Zelfbestuur)
- Batas Onderafdeling Buton dan Muna
- /////// Kerajaan Muna
- Batas distrik

I N D E K S

A

Abd. Kadir
Abd. Rahim
Abd. Rahim Daeng Nompo
Abd. Waris
Afdeling Buton dan Laiwui
Afdeling Loewoe dan daerah takluknya
Afdeling Luwu en Onder hoorigheden
Ahlusunnah waljamaah
Aidhil Rahim
Ajonga inda malusa
Akhmad Makkarausu
Alb. C.Kruyt, Dr.
A. Ligtvoet
Aliyna
Anakamia
Anakia Mombohanuako
Anana Bangule
Anawai Ngguluri
Antaran
Araaeta
Asaki

B

Balasari
Bangkudu
Barata
Barata i moeri
Barata i mohana
Baretta
Batara Guru
Batuangan
Bestuur Afdeling Oost Selebes
Beschrijving en Geschiedenis van Boeton

I N D E X

Berdasar Islam bersendi kerakyatan

Besilutu

Beteno ne tombula

Bevestiging

Bobato

Boka

Bokeo

Bokeo Bula

Bokeo I Bio

Bokeo Mekongga

Bond genootschap

Bonto

Bonto Balano

Bontoala

Bonto Ogena

Bonto Ogena matanayo

Bonto Ogena Sukanayo

Bontona Somba marusu

Bontona Wandailolo

Buburanda

Bulo Manurung

Bung Karno

Bun Ken

Bun Ken Kanrikan

C

C.C. Storm

Controleur Hekker

Controleur Selayar

Controleur van Eys

CVO

D

Daeng Pawata

Daeng Sirua

Daerah Moronene

D. Kok

De Ruyter

De Treffers

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

E

Een en Ander over de Tolaki van Mekongga

Een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch

— Indie en gevolgelijk staat onder de opperheerschappij van Nederland

Een nieuwe dubbeltjes

Elu

Establishment

F

Firdaus

Frits Sarasin

G

Gebied van Loewoe

Gebied van Tiworo

Gezaghebber

Goeuweloos

Ghofa

Gun

Gun co

H

Halu Oleo

Haribau

Heiho

H. Daeng Marakaa

Hendrik van Klift

H. Hasan

Hervormde Kerk

H. Idrus

Heterogen

Hisbulwathan

Homogen

I

Imam Pase

Indonesia Raya

Inea Sinumo

Inea Sinumo Wuta Mbinotiso

J Een en Ander over de Toksi van Mekongga

Jamiatul Muslimin Een guleste nimaakt van Nederlandisch

J. van Hocht Indje en Kewotjak staat onder de opperhoofden

K Een nieuw dubbeltje

Kabuto Een

Kadie Establishment

Kadie Walaka Een

Kamboru-mboru talu palena Een

Kampua Een

Kaneko Brits Saksien

Kanturuna molingkana Een

Kaosa Een

Kapere Gebied van Loewo

Kapita Gebied van Tiworo

Kapita Anamolepo Een gebied

Kapita Bontoala Een

Kapitalao Een

Kapitalao Matanayo Een

Kapitalao Sukanayo Een

Kapita Pombili Een

Kapten Helleks Een

Kapten de Yong Een

Karoro Een

Kaumu Een

Ke Bhinnekaan Een

Ken Een

Kendari Een

Kenepulu Een

Ken Kanrikan Een

Ke Tunggal Ikaan Een

Kinawo Een

K. Oda Een

Kometer yang ka ampat Een

Konawe Een

Konggaaha Een

Korte verklaring Een

Kotubitara Een

Kulidawa	Laode Saibuddin
Kumbewaha	Laode Saibudin
Kun faya kun	Laode Saibudin
L	Laode Saibudin
La Ati	Laode Saibudin
La Duma	Laode Saibudin
La Elangi	Laode Saibudin
La Hia Daeng Gassing	Laode Saibudin
Laiwui	Laode Saibudin
La Kampacu	Laode Saibudin
La Kare	Laode Saibudin
Lakidende	Laode Saibudin
Lakilaponto	Laode Saibudin
Lakina	Laode Saibudin
Lakina Agama	Laode Saibudin
Lakina Baadia	Laode Saibudin
Lakina Surawolio	Laode Saibudin
La Mangu	Laode Saibudin
Lamba-lambase	Laode Saibudin
Lakina Wuna	Laode Saibudin
Lambau	Laode Saibudin
La Manempa	Laode Saibudin
Landibau	Laode Saibudin
Land bouw	Laode Saibudin
Lang Kontrak	Laode Saibudin
La Ode Akhmad Maktubu	Laode Saibudin
Laode Amane	Laode Saibudin
Laode Bulai	Laode Saibudin
Laode Boha	Laode Saibudin
Laode Buntu	Laode Saibudin
Laode Husain Omputo Sangia	Laode Saibudin
La Ode Ijo	Laode Saibudin
La Ode Mizani	Laode Saibudin
Laode Ngkada	Laode Saibudin
Laode Ngkumabusi	Laode Saibudin
Laode Pagora	Laode Saibudin
Laode Pulu	Laode Saibudin
Laode Rere	Laode Saibudin
Laode Saete	Laode Saibudin

Laode Safiuddin	Kulidawa
Laode Sambira	Kumbewaba
Laode Sijai	Kan faya kon
Laode Sumaili	
Lapadaku	
Lapalewo	
La Rumpalangi	La Ab
La Sambawa	La Dons
La Saamana H.A. Gani (M. Taata)	La Elangi
La Sandara	La Ella Daeng Gasing
Lasehao	Laewi
La Singga	La Kampacu
Latambaga	La Kare
Latoma	Lakidende
Latollong	Laklilangto
Leen roege landen van Nederlandsch Indie	Lakina
Let. Inf. Pallack	Lakina Agana
Loekata	Lakina Radia
LVO	Lakina Sarawallo
	La Manu
	Lakina-lakina
M	Lakina Wana
Mabolu	Lakina
Maeda	La Manempu
Mafu	Landipau
Maho	Land bouw
Makolona Patani	Lang Kontak
Mambulo	La Ode Akmal Maklon
Manamang	Laode Amang
Mantigi	Laode Buisi
Martabat Tujuh	Laode Baha
Mat Giri	Laode Bantu
Mazai	Laode Hussin Omputo Sanga
Mbe-mbetoka	La Ode Ijo
Mbuokoi	La Ode Mizani
Mbuowai	Laode Ngkaba
Mbohago	Laode Ngkambusi
Mbusehe	Laode Pagora
Mbu Tobu	Laode Pulu
Melamba	Laode Rore
Mincara Ngapa	Laode Sate

Mia Patamiana	Pedagogica
M.J. Gouweloos	Pedagogica
Mohetena i tombula	Pedagogica
Mobetena i Paria	Pastor P. L. Ortel
Modern	Pandua
Mokole	Pastor Spels
Mokole More i Konawe	Paul Sarasin
Moluloi	Pedoman Rinkus
Morotai	Perjara Pariai
Muhammadiyah	Periyadar
M. Sanusi	Personen non gratia
Muh. Safei	Pita Dalabatu
Muh. Shalihi	Pondidatu
Muh. Umar	Pongawa
Murhum	Pongawa Tompunan
Munting Hapjuis	Politik Eris
	Ponden van der Brinken
N	Ponden Daeng Mangawa
Nagata	Posudo
Nakamura	Pua Tobu
Najamuddin Daeng Malewa	Puano Sana
Nederlandsch Indische Padvinderij	Paria Daeng Lolo
Naderlandsch Indische Stoomvaart maatschappij	PMI
Nederlandsche Zending vereniging	PSII
NIT	
Nobuo Osyidari	R
Normaal leergang	Raja Wajaka
NV Cultuur Maatschappij Claim Banda,	Randabintang
NV Cultuur Maatschappij Bungin Tomigan,	Residen de Gaman
NV Cultuur Maatschappij Tompenan	Reise van der Mierskoka naar
	Romusha
O	Rupelin
Omputo nigege	
Onggabo	S
Onderwijzer Sport Vereniging	Sabandata
Onrust veker	Sado Tompunan
Opa	Said Jatin
	Sala-salamata
P	Sangia Jaito
Pabitara	Sangia Jowo

Paelangkuta	Mia Patamiana
Pangalasa	M.L. Gouweloos
Panni Orai	Mobertens i Tombulu
Pastor P.I. Onel	Moberena i Patra
Parindra	Modern
Pastor Spels	Mokole
Paul Sarasin	Mokole More i Kona
Pedoman Ringkas	Mokole
Penjaga Pantai	Motorisi
Penyadar	Muanamandyan
Persona non grata	M. Samusi
Pitu Dulabatu	Mun. Sabei
Pondidaha	Mun. Sialiti
Ponggawa	Mun. Uman
Ponggawa Tongauna	Mun. Uman
Politik Etis	Mun. Uman
Pondzen van der Buiken	Mun. Uman
Pondzen Daeng Mangawing	Mun. Uman
Posudo	Mun. Uman
Puu Tobu	Mun. Uman
Puuno Sara	Mun. Uman
Putiri Daeng Lolo	Mun. Uman
PMI	Mun. Uman
PSII	Mun. Uman
R	
Raja Walaka	Mun. Uman
Ramandalangi	Mun. Uman
Residen Brugman	Mun. Uman
Reise von der Miengkoka Baai nach Kendari Sudost Celebes	Mun. Uman
Romusha	Mun. Uman
Rupelin	Mun. Uman
S	
Sabandara	Mun. Uman
Saido Johansyah	Mun. Uman
Said Jafar	Mun. Uman
Sala-salamata	Mun. Uman
Sangia Inato	Mun. Uman
Sangia Dowo	Mun. Uman

Sangaji
 Sangia Ndudu
 Sangia Nggiboburu
 Sangia Nibandera
 Sangia Laiwui
 Sanggaria Bajo
 Sara Kadie
 Sara Muna
 Saranani
 Sarana Kaindea
 Sanggona
 Sarana Wolio
 Sara Wonua
 Sarani
 Sara Owoseno Mekongga
 Sara Toono Motuo
 Sao-sao
 Sawerigading
 Sapati
 Sapati La Singga
 Sima Assappareng Atuwong
 Seinendan
 Sekolah Anak Bumi Putra
 Sekolah Arab
 Sekolah Landbouw
 Sio Lipuna
 Sio Limbona
 Siwole
 S. Fujita
 Syahbandar
 Syech Abd. Wahid
 Siwole Mbatohuu
 Syarif Ali
 Son
 Sonco
 Soga
 Sora Masigi
 Sope
 Soro Pinda
 Sugi Manuru

Sulemandara
 Sulemandara Saranani
 Suleman
 Sulemandara Kona
 Suleman Labgkari
 Sulewang Ngapa
 Sulewang
 Sulewara Wawotobi
 Sura Tobasa
 Stabawatin
 T
 Tamasi
 Tamaki
 Tambo i losano Olo
 Tambo i tepuliano Olo
 Tambo
 Tampla
 Tadu
 Tampuna Bale
 Taso
 Tana lindu
 Tani
 Tapi-capi
 Tarkar Wujudyah
 Tepaswo
 Te bota tula Ngadi
 Tekaka
 Tebu
 Tobejo
 To indera
 To jabi
 Toja
 Tolabanga
 Tomutu Olatshi
 Tomamung
 Toono motuo
 Toono motuo i Pahanggo
 Toono motuo i Saranani
 Toono motuo i Tawana

To tongano Wonua

Tunggu

Tuma

Tusa wuta

Tutuwi Motaha

U

Uwikau ambo

W

Wakaaka

Walaka

Walrawen

Wati

Wekoila

Weribundu

Weti

Wihdatul wujud

Wilayah Inti

Wilden school ordonantie

Wutesau

Y

Yayasan Santo Paulus

Z

Zainuddin Daeng Manrapi

DAFTAR SUMBER

A. DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bhurhanuddin B. *Jejak Sejarah Tomanurung* (Awal Sejarah Kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan Tenggara), Yayasan Karya Teknika, Kendari, 1977.
2. DG. Mattata, H.M. Sanusi, *Luwu dalam Revolusi*.
3. DG. Patunru, Abd. Razak, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar (1967).
4. Kartodirjo, Sartono, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen P dan K, Jakarta, 1975.
5. Ligtvoet, A. *Beschrijving en Geschiedenis van Boeton*, Gravenhagen, 1877.
6. Mededeelingen van de Afdeling Bestuur - zaken den der Buiten gewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuur, Serie A No. 3, *Overeen komsten met de Zelfbesturen in de Buiten gewesten*, Landsdrukkerij Weltevreden, 1929.
7. *Monografi Daerah Sulawesi Tenggara, 1974 - 1975*, Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara, Kendari.
8. Pingak, Ch. *Dokumenta Kolaka*, Bupati KDH Tingkat II Kolaka (1963).
9. Pingak, Ch. *Mekongga*, (Aneka ragam kebudayaan Kabupaten Kolaka).
10. Vagts, Alfred, *Landing Operations*, Military Service Publishing Company, Harrisburg, Pa, (1952).
11. Yamin, Prof. Muhammad, *Atlas Sejarah*, Jambatan (1956).
12. Jongeling, Dr. M.C., *Benih yang tumbuh 10*, Lembaga Penelitian dan studi DGI, Jakarta, (1972).
13. Zahari, A.M. *Kumpulan Perjanjian Kerajaan Buton* (Naskah).
14. Zahari, A.M. *Sejarah dan adat fi Darul Butuni* (Naskah).

B. DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Umur	Jabatan/Alamat	Keterangan
1.	Abd. Hamid Hasan	47 thn	Pengawas PMK Kanwil. Dep. P dan K Prop. Sultra/Kendari	
2.	Abd. Hasid	54 thn	Ka. Subid PSK Kanwil. Dep. P dan K Prop. Sultra/Kendari	
3.	A.M. Zahari	50 thn	ex Sekr. Pribadi Sultan Buton, ex Kep. Distrik/Bau-Bau.	
4.	Bunggasi	69 thn	Pensiunan, ex anggota Swapraja Laiwui/Kendari.	
5.	Ch. Pingak	60 thn	Pensiunan, ex Ketua DPR Kab. Sulawesi Tenggara, ex Ketua DPR Kab. Kolaka, ex Kepala P dan K Kab. Kolaka/Kolaka.	
6.	Dalami	60 thn	Pensiunan PU, ex anggota Rode Kreuz/Laosu Sampara Kendari.	
7.	Hama	58 thn	Tani, ex anggota Penjaga Pantai (tukang keker)/Kendari.	
8.	Husen A. Chalik	59 thn	Kabid PSK Kanwil. Dep. P dan K Prop. Sultra/Kendari.	
9.	Konggoasa	60 thn	Pensiunan ex Sekwilda Dati I Sultra/Kendari.	
10.	La Bau	63 thn	Pensiunan/Bau-Bau.	
11.	La Doho	58 thn	Pensiunan/Wawotobi	
12.	La Ero	56 thn	Kasubid PSK/Kendari.	

- | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|---|---|
| 13. | L.M. Shalihi | 56 thn | Anggota DPRD Dati I Sultra/ex Kep. Distrik (Muna)/Kendari. | Putra Sultan Buton/Raja Mu-na Syafiuddin. |
| 14. | La Ode Maane Bolu
BA | 56 thn | Kabid PMK Kanwil. Dep. P dan K Prop. Sultra/Kendari. | |
| 15. | Makmur Thayeb | 54 thn | Kasubag Urusan Dalam Kanwil. Dep. P dan K Prop. Sultra/Kendari. | |
| 16. | M. Kasim Maddualeng | 64 thn | Swasta, ex Sekretaris Muhammadiyah/Kendari. | |
| 17. | Ny. M. Lakawa Anries
BA, | 39 thn | Pengawas PMK Kanwil. Dep. P dan K Prop. Sultra/Kendari | |
| 18. | M. Saidelempek | 60 thn | - / Kendari. | |
| 19. | Muna (Kelompok) | | | |
| | - Laode Hibi | 63 thn | Pensiunan, anggota Swapraja (neo)/Raha | |
| | - La Kahalimbona | 68 thn | ex Kep. Distrik (Muna)/Raha. | |
| | - La Kunta | 68 thn | ex Bonto Balano Pembantu Raja Mu-na)/Raha. | |
| | - La Wudhu | 78 thn | ex aparat Swapraja (neo)/Lahia Raha. | |
| | - La Hude | 70 thn | ex Kepala Distrik (Muna)/Raha. | |
| | - Laode Mane-Mane | 58 thn | Peg. PU/Raha. | Putra Raja Mu-na Laode Rere. |
| | - Mateus Bakolu | 34 thn | Pastor/Raha. | |
| | - Laode Abu Jalil | 55 thn | Penerangan/Raha. | |
| | - La Ode Ibu | | Peg. Kandep. P dan K Kab. Muna, ex Kepala Kebudayaan Dati II Muna/Raha. | |

- La Kare 65 thn Imam/ex Pengurus Waara - Raha.
 - La Onda 52 thn Peg. Kehutanan/Raha.
 - Alifin 50 thn Pemuka masyarakat/Raha.
 - Laode Hoera 54 thn Peg. Daerah Muna/Raha.
 - Laode Kadampi 71 thn ex Kep. Kampung/Raha.
 - La Kadidaa 46 thn Ka Seksi SD Kandep P dan K.Kab. Muna/Raha.
 - La Walembaki 61 thn Kepala Desa/Raha.
 - Laode Pangudu 40 thn Peg. Seksi Kebudayaan Kandep P dan K.Kab. Muna/Raha.
 - Laode Sahidi 55 thn Peg. Kandep. P dan Putra Raja Mu-K Kab. Muna/Raha. na Laode Rere.
20. Opu Tosinile alm. (1976) ex Pabbicara Kerajaan Luwu.
21. Rambe 45 thn Guru SPG Neg. Kendari/Kendari.
-

001353.1

G3.1



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA